

MEMBAKAR RUMAH

**BAGAIMANA UNILEVER DAN MEREK-MEREK
GLOBAL LAINNYA TERUS MENGOBARKAN
KEBAKARAN DI INDONESIA**

GREENPEACE



21 September 2019, PT Kaswari Unggul, 1°17'50.699" S 103°45'41.92" T: Ekskavator sedang bekerja dalam kabut dari kebakaran lahan gambut di konsesi PT Bukit Barisan Indah Prima di Jambi. Perusahaan perkebunan tersebut saat ini tengah menghadapi pengadilan perdata. PT Kaswari Unggul disebut sebagai pemasok untuk Unilever, Mondelez, Nestlé dan Procter & Gamble serta Wilmar, GAR dan Cargill. ©Adimaja/Greenpeace

'Ketergantungan kita pada alam sangat penting, dan urgensi untuk melestarikannya adalah keharusan. Perlindungan hutan dan pengelolaan lahan yang lebih baik akan menjadi hal mendasar untuk mewujudkan Perjanjian Paris. Untuk mewujudkan hal ini, kita perlu mengubah cara produksi dan konsumsi kita – dan bisnis yang tidak melakukan perbaikan tidak akan memiliki masa depan.'

Alan Jope, CEO Unilever, KTT Aksi Iklim PBB tanggal 23 September 2019

TEMUAN-TEMUAN PENTING	01
PENGANTAR	06
BAGAIMANA SEKTOR MINYAK KELAPA SAWIT TERUS MEMBAKAR RUMAH	08
KELOMPOK-KELOMPOK PRODUSEN PALING TERIBALT DALAM KEBAKARAN TAHUN 2019	09
KELOMPOK PRODUSEN PALING KUAT TERKAIT PEMBAKARAN DI PERIODE 2015-2018	10
PUTUSAN PENGADILAN, SANKSI PEMERINTAH DAN KONSESI YANG DISEGEL	11
KASUS-KASUS KRIMINAL DAN PERDATA	13
SANKSI ADMINISTRASI	15
KAITAN PASAR	26
MASALAH TRANSPARANSI	29
LAMPIRAN 1: METODOLOGI DAN DATA	32
LAMPIRAN 2: KELOMPOK PRODUSEN YANG DIBAHAS DALAM LAPORAN INI	40
LAMPIRAN 3: YANG DIKELUARKAN DARI RANTAI PASOK	45
LAMPIRAN 4: RESPONS KELOMPOK PRODUSEN ATAS ANALISIS GREENPEACE TERHADAP TITIK API DAN DATA BEKAS KEBAKARAN PEMERINTAH	49
REFERENSI	57
CATATAN AKHIR	65

TEMUAN-TEMUAN PENTING

Perusahaan barang konsumen terkemuka Unilever, MondeľDz, Nestlé dan Procter & Gamble (P&G), serta pedagang minyak kelapa sawit terkemuka termasuk Cargill, GAR, Musim Mas dan Wilmar, membeli minyak kelapa sawit yang berasal dari produsen yang terkait dengan sejumlah kebakaran di Indonesia tahun ini, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian Greenpeace International.² Temuan-temuan ini juga menghubungkan para pedagang dan perusahaan konsumen ini – yang secara luas dianggap ‘pemimpin keberlanjutan’ di sektor minyak kelapa sawit – langsung ke operasi minyak kelapa sawit yang dikenai hukuman pengadilan, sanksi administratif atau intervensi pemerintah lainnya akibat kebakaran.

Hasil-hasil temuan mencakup:

- Hingga 10.000 titik api telah terdeteksi di seluruh operasi kelompok produsen kelapa sawit yang memasok Unilever, MondeľDz, Nestlé dan P&G pada tahun 2019.
- Unilever dipasok oleh kelompok usaha kelapa sawit yang bertanggung jawab atas kebakaran hampir 180.000 hektar (ha) lahan antara tahun 2015 dan 2018, dan pemasok yang disebutkan namanya termasuk delapan perusahaan perkebunan yang telah dijatuhi hukuman pengadilan atau sanksi terhadap mereka dan 20 perusahaan yang operasinya disegel untuk penyelidikan akibat kebakaran-kebakaran di tahun 2019.
- Wilmar – pedagang minyak kelapa sawit terbesar di dunia – dipasok oleh kelompok-kelompok usaha minyak kelapa sawit yang bertanggung jawab atas kebakaran lebih dari 140.000 ha lahan antara tahun 2015 dan 2018 dan atas hampir 8.000 titik api hingga saat ini di tahun 2019.
- Ke-30 kelompok produsen minyak kelapa sawit ini paling erat terkait dengan perdagangan krisis kebakaran Indonesia saat ini di pasar global.
- Dari titik api yang terdeteksi selama sembilan bulan pertama tahun 2019 di ke-30 konsesi kelompok produsen ini, tiga perempatnya terletak di dalam operasi yang dikendalikan oleh kelompok produsen yang merupakan anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).³

Analisis saat ini hampir pasti membuat perkiraan yang lebih rendah dari yang sebenarnya tentang tanggung jawab kelompok produsen atas kebakaran dan paparan pedagang dan perusahaan barang konsumen ke minyak kelapa sawit yang terkait dengan perusahaan lingkungan. Secara keseluruhan, akurasi dan kelengkapan data yang tersedia untuk umum tentang batas-batas dan kepemilikan perusahaan atas konsesi kelapa sawit bervariasi. Ini diakibatkan oleh kelambanan perusahaan dan pemerintah dan kegagalan untuk secara sistematis memenuhi kebutuhan akan transparansi. Data resmi titik api dan bekas kebakaran yang digunakan mungkin juga mengandung ketidakakuratan. Selain itu, pengungkapan rantai pasok pedagang dan perusahaan barang konsumen dinyatakan dalam pabrik yang memasok minyak kelapa sawit mereka, bukannya konsesi yang memasok bahan baku (tandan buah segar) ke pabrik-pabrik tersebut, yang berarti bahwa tidak semua kaitan ke konsesi, dan kelompok produsen yang mengendalikan mereka, dapat dikonstruksi. Lihat ‘Masalah transparansi’ dan Lampiran 1 di bawah untuk pembahasan lebih lanjut.

Tabel 1: Kaitan rantai pasok ke kelompok produsen minyak kelapa sawit yang paling bertanggung jawab atas krisis kebakaran

X = kaitan yang terungkap dalam pengungkapan rantai pasok pedagang atau merek terbaru

O = kaitan yang terungkap dalam pengungkapan rantai pasok pedagang dan merek terbaru namun bukti-bukti yang lebih baru (mis. daftar keluhan) menunjukkan bahwa pembelian mungkin sedang dibekukan sementara.⁴

	Pedagang				Perusahaan barang konsumen			
	Cargill	GAR	Musim Mas	Wilmar	Mondelēz	Nestlé	P&G	Unilever
Kelompok Produsen								
Agro Inti Semesta	X			X	X	X		X
Astra Agro Lestari	X	X	X	X	X	X	X	X
Austindo Nusantara Jaya (ANJ)					X	X	O	O
Bakrie	X	X	X	X	X	X	X	X
Best Agro Plantation					X			
Bumitama	X	X	X	X	X	X	X	X
Gitra Borneo Indah								X*
Fangiono family	X		X	X	X	X	X	X
Gagah Putera Satria	X	X			X	X		X
Gama	X*	X	X*	X	X	X	X*	X
Genting	X	X	X	X	X	X	X	X
IOI	X	X	X	X	X	X	X	X
Jaya Agra Wattie	X	X			X	X		X*
Korindo						X*		X*
Kuala Lumpur Kepong (KLK)	X		X	X	X	X	X	X
Matahari Kahuripan Indonesia (Makin)	X	X	X	X	X	X	X	X
Musim Mas	X		X		X	X	X	X
NPC Resources	X			X	X	X	X	X
Pasifik Agro Sentosa	X		X	X	X	X	X	X
Perkebunan Nusantara	X	X	X	X	X	X	X	X
Rachmat	X	X	X	X	X	X	X	X
Rajawali/Eagle High	X	X	X	X	X	X	X	X
Salim	X*		O		X	X*	O*	X*
Sime Darby	X		X	X	X	X	X	X
Sinar Mas/GAR	X	X	X	X	X	X	X	X
SIPEF	X	X	X	X	X	X	X	X
Sungai Budi/Tunas Baru Lampung	O		O		X	X	X	O*
Tianjin Julong	X	X			X	X	X	X
TSH Resources	X			X	X	X	X	X
Wilmar	X			X	X	X	X	X

*Lihat Lampiran 3 untuk rincian lebih lanjut.



9 Agustus 2019, Palangkaraya, Kalimantan Tengah ©lfansasti/Greenpeace

Tabel 2: Rangkuman kaitan rantai pasok ke kebakaran: angka menunjukkan jumlah total titik panas yang tercatat, luas area kebakaran, jumlah konsesi yang mendapat hukuman pengadilan atau sanksi, dan jumlah konsesi yang disegel yang terkait dengan kelompok produsen pada Tabel 1 dan terkait dengan rantai pasok masing-masing pedagang minyak kelapa sawit atau perusahaan barang konsumen

	Titik api di tahun 2019 (sampai 30 September)	Total area kebakaran tahun 2015-2018 (ha)	Kaitan lewat kelompok produsen ke perusahaan perkebunan yang mendapat sanksi/ hukuman pengadilan	Perusahaan perkebunan yang mendapat sanksi/ dihukum pengadilan yang disebut sebagai pemasok dalam daftar pabrik	Konsesi yang disegel dalam rantai pasok langsung di tahun 2019
Pedagang:					
Gargill	8.800	161.300	19	8	17
GAR	6.300	106.600	14	4	12
Musim Mas	6.600	116.400	11	2	9
Wilmar	7.900	141.200	12	4	13
Perusahaan barang konsumen:					
Mondeléz	9.900	186.200	19	5	19
Nestlé	9.700	190.500	20	10	21
P&G	8.400	152.000	14	6	15
Unilever	8.900	179.500	20	8	20

PENGANTAR

Dari Brasil hingga Boreal hingga Kalimantan, hutan dunia terbakar, dikobarkan oleh pertumbuhan yang tak henti-hentinya dalam permintaan makanan, energi, dan sektor industri lainnya untuk sumber daya alam dan komoditas pertanian. Kebakaran-kebakaran ini, yang kerap dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan untuk perkebunan atau pertanian, adalah sebuah seruan penyadar yang masif yang menunjukkan seberapa dalam sektor-sektor ini terlibat dalam kerusakan iklim dan ekologi. Karena mereka, ekonomi global kita membakar rumah yang ditinggali kita semua.

Selama dekade terakhir, banyak komitmen diutarakan kalangan industri untuk mendapatkan komoditas berisiko tinggi (komoditas yang proses produksinya menimbulkan risiko tinggi bagi hutan dan ekosistem lainnya) 'secara bertanggung jawab'. Sepuluh tahun yang lalu, Dewan Forum Barang Konsumen (CGF), yang mewakili lebih dari 400 pengecer dan perusahaan manufaktur terkemuka, membuat komitmen untuk mewujudkan nol deforestasi dalam rantai pasok anggotanya pada tahun 2020.⁵ Lima tahun lalu, lebih dari 150 perusahaan berkumpul bersama pemerintah, masyarakat adat dan organisasi masyarakat sipil untuk menandatangani Deklarasi New York tentang Hutan (NYDF), berjanji untuk menghilangkan deforestasi untuk komoditas-komoditas yang mencakup kedelai, sapi, minyak kelapa sawit dan produk kayu (termasuk kayu, bubur kayu, dan kertas) di tahun yang sama.⁶

Di bulan September 2019, kajian resmi NYDF menyimpulkan bahwa mencapai tujuan ini di saat ini 'kemungkinan tidaklah mungkin' karena 'upaya-upaya yang ada hingga saat ini belum memadai untuk mewujudkan perubahan yang sistemik'.⁷ Temuan ini bukan lagi sesuatu yang mengejutkan. Seperti yang dilaporkan berulang kali oleh Greenpeace⁸ dan organisasi non-pemerintah (LSM) lainnya, inisiatif sektor swasta dan upaya 'bertahap' (step-wise) untuk membersihkan rantai pasok telah gagal membawa hasil yang memadai untuk hutan, iklim atau hak asasi manusia.

Sektor minyak kelapa sawit – salah satu dari sedikit sektor industri yang membuat komitmen publik yang terdengar serius untuk melakukan reformasi – masih merasa bimbang dalam satu dekade ini, terlepas dari upaya dan penanganan banyak LSM dan uang yang dihabiskan untuk konsultan keberlanjutan dan inisiatif-inisiatif yang mentereng.

Bulan Januari 2019, Greenpeace setuju untuk terlibat dengan mereka yang disebut sebagai 'pemimpin keberlanjutan' di sektor ini – Wilmar, Unilever dan MondeLiz – untuk mewujudkan apa yang seharusnya menjadi lompatan besar ke depan untuk sektor ini dan untuk perdagangan komoditas secara umum, yaitu platform pemantauan rantai pasok yang kredibel, transparan dan independen. Jika dilakukan dengan benar, platform semacam itu akan memungkinkan perusahaan konsumen dan pedagang untuk menunjukkan kepada publik sejauh mana rantai pasok mereka bebas dari minyak kelapa sawit yang berasal dari kelompok produsen⁹ yang terkait dengan deforestasi, kebakaran, pelanggaran hak asasi manusia atau ilegalitas. Greenpeace melihat inisiatif ini sebagai kesempatan terakhir bagi industri kelapa sawit dan para pemimpin ini untuk menunjukkan kesediaan mereka untuk menghilangkan deforestasi sebelum tenggat waktu tahun 2020 yang disepakati perusahaan-perusahaan pada tahun 2010.

Namun, di bulan Agustus – tepat sebelum kebakaran kembali menyelimuti area yang luas di Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Filipina dalam kabut asap,¹⁰ membahayakan hampir 10 juta anak akibat pencemaran udara¹¹ – Greenpeace mengambil keputusan sulit untuk mundur dari proses tersebut. Diskusi yang berlangsung hampir delapan bulan gagal menghasilkan kesepakatan tentang elemen-elemen paling dasar dari platform pemantauan yang kredibel, transparan, dan independen, sebagian besar dikarenakan kurangnya komitmen yang serius dari perusahaan.

Perusahaan konsumen seperti Unilever dan pedagang seperti Wilmar mengatakan kepada dunia bahwa mereka telah membuat kemajuan besar dalam membersihkan rantai pasok mereka dan mendukung transparansi. Kenyataannya – seperti yang ditunjukkan oleh analisis Greenpeace – mereka terus-menerus gagal melakukannya. Perusahaan-perusahaan yang terkait dengan kebakaran hutan dan lahan gambut Indonesia yang menghancurkan masih bercokol di rantai pasok semua pedagang besar dan perusahaan barang-barang konsumen, termasuk yang disebut 'pembela keberlanjutan' ini. Kelompok-kelompok produsen yang bertanggung jawab termasuk perusahaan-perusahaan yang dihukum oleh pengadilan Indonesia atau diberi sanksi oleh pemerintah, banyak di antaranya telah gagal membayar kompensasi yang diperintahkan untuk memulihkan area yang terbakar (lihat di bawah).

Kesimpulannya sangat jelas: sektor minyak kelapa sawit – seperti sektor komoditas berisiko tinggi lainnya – belum mau melakukan reformasi. Sektor ini adalah bagian dari sistem pangan dan pertanian global yang rusak.

Proposisi bahwa prakarsa sukarela yang digerakkan oleh pasar akan membawa perubahan telah terbukti salah. Kegagalan untuk mengakhiri deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan gambut yang merusak – yang bersama-sama terus menghancurkan peluang kita untuk mencegah kerusakan iklim – pastilah memiliki konsekuensi serius. Waktu sudah habis untuk perdagangan komoditas yang diproduksi oleh kelompok-kelompok usaha yang masih terlibat dalam kehancuran lingkungan.

Perusahaan perlu mengubah model bisnis mereka secara mendasar untuk mencegah bencana iklim dan keanekaragaman hayati dan mendukung hak asasi manusia. Tanggung jawabnya ada pada perusahaan konsumen yang menggunakan komoditas berisiko tinggi seperti, tetapi tidak terbatas pada, daging sapi, minyak kelapa sawit, kertas/bubur kertas dan kedelai untuk menunjukkan bahwa rantai pasok mereka bebas dari deforestasi. Perusahaan seperti Unilever yang menggunakan minyak kelapa sawit dalam produk mereka menghadapi pilihan yang sangat jelas: mereka harus memaksa Cargill, Golden Agri-Resources (GAR), Musim Mas, Wilmar dan pedagang lainnya untuk membatasi pengambilan pasokan mereka hingga tingkat yang dapat mereka tunjukkan kepada publik tidak berasal dari kelompok yang bertanggung jawab atas perusakan hutan atau lingkungan lainnya, atau – jika mereka tidak mau atau tidak mampu melakukan apa yang diperlukan untuk memperbaiki perdagangan komoditas global – mereka harus sepenuhnya menghindari komoditas berisiko tinggi tersebut. Selain itu, untuk transisi ke paradigma bisnis ‘komoditas yang melindungi hutan,’ mereka perlu menyediakan pembiayaan dan dukungan untuk konservasi dan restorasi hutan dan ekosistem alami.



2 September 2019, PT Globalindo Agung Lestari, 2°28'54.079" S 114°34'58.08" T: Tim Greenpeace Asia Tenggara melakukan pengukuran suhu di dalam konsesi kelapa sawit yang dimiliki oleh perusahaan Malaysia Genting Plantations Berhad yang telah disegel oleh KLHK untuk investigasi. Semua perusahaan konsumen dan pedagang yang ditinjau untuk laporan ini dipasok oleh Genting. ©Sukarno/Greenpeace

BAGAIMANA SEKTOR MINYAK KELAPA SAWIT TERUS MEMBAKAR RUMAH

Kebakaran yang merusak Indonesia pada tahun 2015 sejauh ini dianggap sebagai salah satu bencana lingkungan terbesar abad ke-21. Bank Dunia memperkirakan bahwa krisis kebakaran tahun 2015 mengakibatkan kerugian ekonomi bagi Indonesia sebesar US\$ 16 miliar, jumlah yang lebih besar dari perkiraan nilai tambah dari ekspor minyak kelapa sawit bruto Indonesia (US\$ 8 miliar) dan nilai tambah dari seluruh produksi minyak kelapa sawit negara tahun 2014 (US\$ 12 miliar).¹² Kabut asap tahun 2015 menyebabkan penyakit pernafasan dan penyakit lainnya pada ratusan ribu orang di seluruh wilayah dan, menurut sebuah penelitian, kemungkinan menyebabkan lebih dari 100.000 kematian dini.¹³

Pemerintah Indonesia merespons dengan serangkaian komitmen untuk mencegah krisis lain seperti itu dan berjanji untuk meminta pertanggung jawaban dari mereka yang bertanggung jawab, termasuk perusahaan yang memiliki kejadian kebakaran di tanah mereka.¹⁴ Indonesia memiliki tanggung jawab korporat yang ketat terkait dengan kebakaran hutan, yang berarti bahwa perusahaan kehutanan, perkebunan atau pertambangan secara hukum bertanggung jawab atas kebakaran di dalam konsesi mereka, terlepas dari sumber apinya.¹⁵

Setelah tiga tahun berlalu di mana kebakaran yang terjadi memiliki dampak yang relatif rendah, sebagian besar berkat pola cuaca La Niña yang membatasi penyebarannya,¹⁶ Indonesia kembali menjadi pusat kebakaran besar dan krisis emisi yang membawa dampak iklim global. Badan Nasional Penanggulangan Bencana pemerintah melaporkan bahwa antara bulan Januari dan September 2019 diperkirakan ada 857.000 ha lahan terbakar, di mana 227.000 ha merupakan lahan gambut.¹⁷ Kebakaran lahan gambut dapat bertahan lama, terus membara di bawah permukaan tanah, dan menyebabkan pelepasan karbon secara besar-besaran ke atmosfer, menurut Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS).¹⁸ Perkiraan terbaru tentang total emisi dari kebakaran hutan Indonesia, berdasarkan Global Fire Emissions Database (GFED), adalah 465 megaton (Mt) CO₂ untuk periode dari tanggal 1 Januari hingga 22 Oktober 2019.¹⁹ Ini menempatkan tahun 2019 sebagai tahun terburuk ketiga untuk emisi terkait kebakaran dalam dekade terakhir, dan yang terburuk sejak tahun 2015.²⁰

Untuk memberi gambaran tentang skala krisis ini, hal ini berarti bahwa hingga tanggal 22 Oktober 2019 emisi kebakaran Indonesia saja sudah mendekati total emisi gas rumah kaca (GRK) tahunan negara Inggris.²¹

Selama kebakaran tahun 2019, yang masih membara pada akhir bulan Oktober, sebagian besar area negara ini – dan negara tetangganya Singapura, Malaysia dan Filipina – sekali lagi diliputi kabut, yang mengubah langit menjadi merah darah di seluruh Sumatera²² dan menyebabkan hampir 10 juta anak beresiko terganggu kesehatannya akibat polusi udara, menurut PBB.²³ Lebih dari 900.000 orang di Indonesia dilaporkan menderita infeksi saluran pernapasan akut akibat kabut asap dari kebakaran tahun 2019.²⁴ Para pejabat mengakui bahwa hampir semua kebakaran tersebut 'terjadi akibat faktor manusia'.²⁵

Dalam laporan ini, analisis Greenpeace membuka siapa-siapa yang bertanggung jawab atas kontribusi industri kelapa sawit terhadap krisis kebakaran yang sedang berlangsung di Indonesia, pertama-tama mengidentifikasi kelompok produsen yang paling terkait dengan kebakaran, kemudian menyelidiki apakah minyak kelapa sawit dari kelompok-kelompok ini ada dalam rantai pasok beberapa pedagang dan perusahaan barang konsumen yang paling penting. Di antara temuan penting dari analisis Greenpeace adalah:

- Dari peringatan kebakaran (juga dikenal sebagai titik api, atau FHS) yang dicatat dalam sembilan bulan pertama tahun 2019 dalam konsesi milik kelompok produsen yang diidentifikasi Greenpeace sebagai yang paling kuat terkait dengan krisis kebakaran, sekitar tiga perempatnya terkait dengan kelompok-kelompok yang menjadi anggota badan keberlanjutan sektor industri ini, yaitu RSPO.
- Mondelēz, Nestlé, P&G, dan Unilever semuanya membeli minyak kelapa sawit yang berasal dari kelompok-kelompok produsen yang sangat terkait dengan krisis kebakaran berulang, yang secara kolektif telah terlibat dalam ribuan kebakaran hanya di tahun ini saja.

KELOMPOK-KELOMPOK PRODUSEN PALING TERLIBAT DALAM KEBAKARAN TAHUN 2019

'Tahun 2019 telah terbukti sebagai tahun yang menantang dalam hal karhutla karena, sekali lagi, faktor gabungan dari cuaca kering/kekeringan yang berkepanjangan, suhu yang lebih tinggi dari rata-rata yang secara umum menjadi indikasi perubahan iklim, dan kembalinya beberapa pemain ke praktik tebang-bakar mengingat harga CPO yang lebih rendah dan faktor-faktor ekonomi lainnya.'²⁶

**Ian Suwarganda, Kepala Kebijakan & Advokasi,
GAR, 7 November 2019**

Untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok produsen minyak kelapa sawit yang paling kuat terkait dengan kebakaran dalam sembilan bulan pertama tahun 2019, Greenpeace menggunakan data satelit untuk memetakan titik api ke masing-masing konsesi kelapa sawit (lihat Lampiran 1 untuk penjelasan tentang sumber data dan metodologi). Greenpeace telah mengonsolidasikan data ini untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok produsen minyak kelapa sawit yang memiliki titik api terbanyak dalam konsesi mereka di seluruh Indonesia.

Analisis Greenpeace telah mengidentifikasi 21 kelompok usaha minyak kelapa sawit dengan lebih dari 250 titik api (ambang batas yang mengindikasikan keberadaan kebakaran yang cukup banyak) di seluruh operasi mereka antara tanggal 1 Januari dan 30 September 2019. Secara total, 145.275 titik api diidentifikasi terjadi di seluruh Indonesia selama periode ini, dengan 19,6% di antaranya berada di konsesi kelapa sawit. Sekitar 35% dari titik api di konsesi kelapa sawit adalah tanggung jawab ke-30 kelompok produsen yang diidentifikasi dalam laporan ini sebagai yang paling kuat terkait dengan krisis kebakaran – yang hanya mewakili kurang dari 7% dari semua titik api dalam periode ini.

Tabel 3: Kelompok usaha minyak kelapa sawit dengan titik api terbanyak dalam konsesinya

Kelompok usaha minyak kelapa sawit	Titik api Jan–Sep 2019 (MODIS+VIIRS)
Rajawali/Eagle High	837
Genting	765
Rachmat/Amara, Dharma Satya Nusantara, Triputra Agro Persada (including Union Sampoerna Triputra Persada)	669
Bumitama	545
Sungai Budi/Tunas Baru Lampung	529
Gama	504
Perkebunan Nusantara	495
Gagah Putera Satria	426
NPC Resources	418
Fangiono family/First Resources, Fangiono Agro Plantation, Ciliandry Anky Abadi	359
Austindo Nusantara Jaya	346
Salim/IndoAgri, Indofood and IndoGunta	332
Bakrie	331
Sime Darby	325
Sinar Mas/GAR	323
Makin	310
TSH Resources	293
Wilmar	288
SIPEF	274
Tianjin Julong	263
IOI	251

KELOMPOK PRODUSEN PALING KUAT TERKAIT PEMBAKARAN DI PERIODE 2015-2018

Sekitar 3,4 juta ha lahan mengalami kebakaran minimal satu kali antara tahun 2015 dan 2018 di Indonesia, menurut analisis Greenpeace terhadap data bekas kebakaran resmi pemerintah.²⁷ Di tahun 2015 saja lebih dari 2,6 juta ha lahan terbakar. Menghitung kebakaran berulang di lahan yang sama yang terjadi di tahun-tahun yang berbeda membuat luas total lahan terbakar menjadi lebih dari 3,7 juta ha. Pemetaan area terbakar untuk tahun 2019 tidak tersedia pada saat penulisan.

Tabel 4: Kelompok usaha minyak kelapa sawit dengan area terbakar terluas dalam konsesinya²⁸

Kelompok usaha minyak kelapa sawit*	Total area kebakaran 2015–2018 (ha), termasuk kebakaran berulang	Total area lahan yang terdampak kebakaran 2015–2018 (ha)	Perkiraan luas lahan terbakar lebih dari sekali (ha)
Rachmat	18.400	14.300	4.100
Bakrie	18.200	16.500	1.700
Sungai Budi/ Tunas Baru Lampung	17.800	16.500	1.300
Agro Inti Semesta	13.000	13.000	0
Korindo	11.500**	11.500	0
Genting	8.200	8.100	100
Salim	7.800	7.800	0
Gama	7.600	7.300	300
Fangiono family	7.400	6.800	600
SIPEF	7.300	7.300	0
Best Agro Plantation	7.200	6.200	1.000
Tianjin Julong	6.900	6.800	100
Citra Borneo Indah	6.800	6.800	0
Rajawali/Eagle High	6.200	6.000	200
Pasifik Agro Sentosa	6.200	5.800	400
Jaya Agra Wattie	6.200	5.000	1.200
Musim Mas	6.100	5.600	500
Makin	6.000	5.400	600
TSH Resources	5.800	5.700	100
Astra Agro lestari	5.300	4.300	1.000
Perkebunan Nusantara	5.100	4.700	400

* Lihat Lampiran 2 untuk rincian kelompok-kelompok yang diidentifikasi di sini.

** Ini mungkin adalah perkiraan yang lebih tinggi dari yang sebenarnya, sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran 4, meskipun angka-angka yang telah direvisi tidak akan mengubah peringkat perusahaan-perusahaan dalam daftar ini.

PUTUSAN PENGADILAN, SANKSI PEMERINTAH DAN KONSESI YANG DISEGEL

Selain data yang secara langsung merekam skala dan prevalensi kebakaran di dalam konsesi milik kelompok produsen minyak kelapa sawit tertentu, Greenpeace telah mengumpulkan data tentang sanksi resmi yang dikenakan pada kelompok-kelompok produsen dan masing-masing konsesi terkait respons mereka terhadap kebakaran.

Sanksi pemerintah terhadap perusahaan yang konsesinya terkena kebakaran dapat diterapkan melalui sarana pidana, perdata atau administratif. Kasus pidana dapat mengakibatkan denda bagi perusahaan dan/atau manajernya, dan/atau hukuman penjara bagi manajer/pemilik. Kasus-kasus pengadilan perdata dapat mengakibatkan perintah untuk membayar ganti rugi, yang sering disebut di media sebagai denda. Sanksi administratif, yang dikenakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tanpa proses pengadilan, dapat melibatkan pencabutan izin atau pembekuan izin atau penerbitan perintah paksaan pemerintah. Teguran tertulis juga sering dikirim ke perusahaan. Tahap pengumpulan bukti sebelum penerbitan sanksi administratif dapat melibatkan 'penyegelan' lahan yang baru saja terbakar, di mana selama waktu itu perusahaan dilarang melakukan kegiatan di area yang disegel untuk menghindari penghilangan/perusakan bukti. Perintah paksaan dan pembekuan izin dapat dicabut jika perusahaan mengambil tindakan yang diperintahkan oleh KLHK untuk memperbaiki praktik mereka di wilayah konsesi yang terkena sanksi. Informasi tentang tindakan-tindakan yang harus diambil oleh perusahaan, atau apakah tindakan tersebut telah diambil, biasanya tidak tersedia bagi LSM atau pemangku kepentingan lainnya.

Illegalitas yang meluas dan tindakan pemerintah yang terbatas

Tanggal 23 Agustus 2019, Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia (BPK) mengumumkan bahwa mereka telah menyimpulkan bahwa 81% dari konsesi kelapa sawit di negara tersebut – termasuk konsesi milik 'semua pemain besar' – telah melanggar satu atau lebih undang-undang atau standar pengelolaan wajib yang harus mereka patuhi.²⁹ Pelanggaran yang dilaporkan termasuk beroperasi secara ilegal di kawasan hutan lindung, hutan produksi atau kawasan hutan lainnya; beroperasi di luar batas konsesi; beroperasi tanpa izin yang sesuai; dan gagal mengembangkan kebun plasma untuk masyarakat setempat sebagaimana diwajibkan. Seorang komisioner BPK menyerukan kepolisian nasional dan jaksa agung untuk membantu melakukan pembersihan.

Secara terpisah, penyelidikan pemerintah baru-baru ini mendapati bahwa 3,1 juta ha perkebunan kelapa sawit, atau sekitar 19% dari total perkebunan kelapa sawit negara tersebut, telah didirikan tanpa izin di kawasan hutan. Pihak berwenang sedang dalam proses mengidentifikasi pemilik perkebunan yang tidak berizin ini dan mencari nasihat hukum tentang cara menanganinya, menurut seorang pejabat di Kementerian Urusan Ekonomi Indonesia.³⁰

Peraturan Moratorium Minyak Kelapa Sawit unggulan Presiden Joko Widodo, yang dijanjikan pada tahun 2016³¹ dan diterbitkan pada tahun 2018,³² diharapkan dapat memulai sebuah tinjauan izin konsesi lintas-kementerian yang dikoordinasikan melalui Kementerian Urusan Ekonomi, tetapi tidak ada bukti publik bahwa telah ada kemajuan yang signifikan.³³

Gambaran mengenai tindakan khusus terhadap perusahaan yang ada kebakaran di tanah mereka tidak terlalu membawa optimisme. Di bulan September 2019, Greenpeace Asia Tenggara mengungkapkan kegagalan pemerintah Indonesia untuk menegakkan undang-undang yang dimaksudkan untuk mencegah kebakaran hutan, yang telah memungkinkan banyak kelompok produsen minyak kelapa sawit dan kayu pulp dengan area terbakar terluas di konsesi mereka meloloskan diri dari sanksi pidana, perdata atau administrasi seluruhnya atau mendapatkan hukuman yang ringan, menerima sanksi yang tidak sepadan dengan skala kerusakan yang ditimbulkan.³⁴

Data yang dikumpulkan oleh Greenpeace Asia Tenggara yang mencakup periode antara tahun 2015 dan 2018 mengungkapkan bahwa:

- Tidak satu pun dari ke-10 konsesi kelapa sawit di Indonesia yang memiliki total area terbakar terluas selama periode ini telah menerima sanksi perdata atau administrasi yang serius.
- Tidak ada perusahaan kelapa sawit yang dicabut izinnya oleh pemerintah akibat kebakaran selama periode ini. Ada tiga kasus pencabutan izin dalam periode ini namun semuanya adalah izin hutan tanaman industri untuk produksi pulp (konsesi HTI).
- Sejak tahun 2012, dari semua perusahaan perkebunan kelapa sawit yang diperintahkan untuk membayar ganti rugi atas penggunaan api secara ilegal atau kegagalan mengendalikan kebakaran yang terjadi di tanah mereka – total lebih dari US\$ 163 juta dalam kasus yang telah diputuskan hingga saat ini – tak satupun mematuhi sampai saat ini.³⁵

Indonesia tidak sendirian dalam kegagalan dalam penindakan. Sekitar setengah dari titik api yang tercatat dalam sembilan bulan pertama tahun 2019 di lahan yang dikuasai oleh kelompok-kelompok produsen yang paling kuat terkait dengan krisis kebakaran – dan diperkirakan sepertiga dari area yang terbakar antara tahun 2015 dan 2018 – terletak di konsesi-konsesi yang dimiliki oleh kelompok-kelompok usaha yang berkantor pusat di dan/atau terdaftar di bursa di Singapura atau Malaysia. Namun, walaupun memiliki opsi-opsi hukum, pemerintah negara-negara ini juga telah gagal menindak perusahaan-perusahaan yang terkait dengan kebakaran.

Misalnya, meskipun Singapura memiliki Undang-Undang Polusi Asap Lintas Batas 2014 (THCP) yang banyak dibanggakan – yaitu, undang-undang Parlemen Singapura yang mempidanakan perilaku yang menyebabkan atau berkontribusi terhadap kabut asap polusi di negara ini – dan krisis kabut asap baru pada tahun 2019, pemerintah negara tersebut tidak mengambil tindakan serius untuk memastikan bahwa produsen, pedagang, atau merek-merek konsumen yang berbasis di Singapura atau yang pemilikinya berkewarganegaraan Singapura dikenai sanksi atas kontribusi mereka terhadap kebakaran. Di bulan September 2019, seorang juru bicara Badan Lingkungan Hidup Nasional mengatakan bahwa Pemerintah Singapura 'telah mengirim surat diplomatik ke Indonesia, menyatakan keprihatinan mereka' terhadap kebakaran dan kabut asap, tetapi namun tidak menyebutkan adanya tindakan lain.³⁶

Respons Malaysia bahkan lebih lunak lagi; memang, Menteri Industri Primer negara itu Teresa Kok telah menyatakan keprihatinan tentang penyegelan KLHK Indonesia terhadap konsesi-konsesi milik Malaysia: '[Perusahaan-perusahaan] Malaysia yang disebutkan adalah pembudidaya kelapa sawit yang paling dihormati ... Saya tetap merasa khawatir tuduhan saat ini akan langsung jatuh ke permainan kampanye anti minyak kelapa sawit.'³⁷ Selanjutnya, Menteri Lingkungan Hidup Malaysia, Yeo Bee Yin, sampai hari ini menolak untuk mengundurkan diri dari jabatannya meskipun ada klaim atas diamnya kementerian atas dan konflik kepentingan yang sebagian berdasarkan pada tuduhan pemerintah Indonesia terhadap IOI Corporation, sebuah minyak kelapa sawit perusahaan yang berkaitan dengan keluarga suaminya, sebagai salah satu pihak yang berkontribusi terhadap kebakaran dan kabut asap.³⁸ Dia menyatakan bahwa itu adalah tanggung jawab pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan terhadap mereka yang melanggar undang-undang negara tersebut.

KASUS-KASUS KRIMINAL DAN PERDATA

Greenpeace telah menyusun sebuah daftar, berdasarkan informasi yang disediakan oleh KLHK dan sumber-sumber data lainnya, dari masing-masing perusahaan perkebunan yang dilaporkan terlibat dalam kasus-kasus pengadilan karena kebakaran di tanah mereka. Di bulan Juli 2019 pemerintah Indonesia, dalam menanggapi permintaan Kebebasan Informasi Greenpeace, memberikan beberapa rincian perusahaan yang telah menerima sanksi administratif antara Januari 2015 dan Januari 2019, serta jumlah pengadilan perdata (17) dan pidana (13) dan penyelidikan-penyelidikan yang sedang dilakukan atau telah diselesaikan dalam periode tersebut.³⁹ Namun, responsnya tidak termasuk nama perusahaan atau rincian lengkap dari proses peradilan perdata dan pidana. Tabel di bawah ini disusun dari informasi yang diterima sebagai tanggapan atas permintaan Kebebasan Informasi yang telah diajukan Greenpeace kepada KLHK, serta dokumen pemerintah lainnya dan sumber-sumber media. Ini mungkin tidak mewakili gambaran lengkap dari semua tindakan pengadilan perdata dan pidana terhadap perusahaan kelapa sawit yang berkaitan dengan kebakaran, karena informasi ini tidak tersedia untuk umum.

Tabel 5: Proses pengadilan terhadap perusahaan minyak kelapa sawit akibat kebakaran⁴⁰

Perusahaan	Kelompok produsen (jika diketahui)	Jumlah denda terhutang dan/atau status	Informasi tambahan atau terbaru
Kasus Perdata			
PT Agro Tumbuh Gemilang Abadi		Sedang naik banding	Melakukan pembakaran kembali tahun 2019. ⁴¹
PT Arjuna Utama Sawit		Rp.261.6 milyar (US\$18,5 juta) ⁴²	Disegel KLHK tahun 2019.
PT Jatim Jaya Perkasa	Gama	Rp.491 milyar (US\$34,7 juta)	Menggugat pakar kebakaran atas dakwaan pemerintah di tahun 2018 (perusahaan kemudian menarik kasus ini). ⁴³
PT Kalimantan Lestari Mandiri	Tianjin Julong	Peradilan sedang berjalan	
PT Kallista Alam		Rp.366 milyar (US\$25,9 juta)	Ditemukan bersalah atas pembakaran ilegal di tahun 2012, namun perusahaan terus melawan perintah pengadilan dan di bulan Juli 2019 mengajukan gugatan memperlumahkan legalitas keputusan tersebut. ⁴⁴
PT Kaswari Unggul	Bukit Barisan Indah Prima (BBIP)	Peradilan sedang berjalan	Disegel KLHK tahun 2019. ⁴⁵
PT Palma Utama	Tianjin Julong	Rp.22,3 milyar (US\$1,6 juta)	
PT Ricky Kurniawan Kertapersada	Makin	Rp.191 milyar (US\$13,5 juta)	Disegel KLHK tahun 2019.
PT Surya Panen Subur II	Rachmat/ Amara	Rp.439 milyar (US\$31 juta) ⁴⁶	
PT Waimusi Agroindah		Rp. 29,6 milyar (US\$2,1 juta)	
PT Waringin Agro Jaya	Cempaka Mas Abadi	Rp.466,5 milyar (US\$33 juta)	Disegel KLHK tahun 2019.
Kasus pidana			
PT Adei Plantation and Industry	Kuala Lumpur Kepong (KLK)	Rp.16,6 milyar ⁴⁷ (US\$1,4 juta)	Disegel KLHK tahun 2019. ⁴⁸ Pihak perusahaan, yang juga dihukum karena pembakaran ilegal pada tahun 2001, ⁴⁹ menerima putusan pidana atas kebakaran di lahannya pada tahun 2013 ⁵⁰ tetapi dilaporkan masih belum membayar kompensasi untuk rehabilitasi lahan yang terkena dampak. ⁵¹ Manajer umumnya juga dijatuhi hukuman satu tahun penjara dan didenda Rp2 miliar (US\$ 130,000), ⁵² dan direktur serta dua pejabat lainnya kemudian dilaporkan melarikan diri. ⁵³ Perusahaan induk PT Adei, KLK, mengklaim kepada Greenpeace bahwa para pejabat itu dihukum karena gagal mendapatkan izin yang benar, bukan karena peran mereka dalam kebakaran, namun perusahaan tidak memberikan bukti pendukung klaim mereka. ⁵⁴ KLK baru-baru ini disebut sebagai 'salah satu pembudidaya kelapa sawit yang paling dihormati' oleh menteri Industri Primer Malaysia. ⁵⁵
PT Jatim Jaya Perkasa	Gama	Rp. 1 milyar (US\$75.000)	Perusahaan didenda Rp.1 milyar di tahun 2017. ⁵⁶
PT Kaswari Unggul	Bukit Barisan Indah Prima	Sedang berjalan ⁵⁷	Disegel KLHK tahun 2019.
PT Ricky Kurniawan Kertapersada	Makin	Rp.2 milyar (US\$140.000)	Kepala perusahaan dihukum 10 bulan penjara dan denda sebesar Rp.2 milyar. ⁵⁸
PT Surya Agro Palma	Genting	Tengah diselediki	Dua manajer dilaporkan ditangkap pada Agustus 2019. ⁵⁹ Namun, dalam korespondensinya dengan Greenpeace Genting membantah hal ini dan menyatakan bahwa 'manajer kami kooperatif dan membantu penyelidikan yang sedang dilakukan'. ⁶⁰
PT Surya Panen Subur II	Rachmat/Amara	Rp.3 milyar (US\$210.000)	Tiga karyawan perusahaan dipenjara dan perusahaan didenda Rp.3 milyar. ⁶¹
PT Triomas FDI		Rp.14 milyar (US\$930.000)	Perusahaan didenda Rp.14 milyar tahun 2018. ⁶²

SANKSI ADMINISTRASI

Data yang diperoleh dari KLHK pada 2019 menanggapi permintaan Kebebasan Informasi dari Greenpeace memberikan informasi tentang perusahaan-perusahaan yang menerima sanksi administrasi serius antara Januari 2015 dan Januari 2019. Ini termasuk perusahaan yang memegang konsesi kelapa sawit serta perkebunan kayu pulp dan beberapa konsesi penebangan. Data tersebut menunjukkan bahwa dalam periode ini ada total 174 sanksi administratif dijatuhkan: 115 surat peringatan dan 41 perintah paksaan pemerintah dikeluarkan, 16 izin dibekukan dan tiga izin dicabut.⁶³ Rincian lengkap tentang surat peringatan, seperti nama perusahaan dan sifat peringatannya, tidak disediakan. Siaran pers oleh KLHK pada 29 Agustus 2019 melaporkan berbagai tindakan administratif sejak 2015 - 'pengawasan' terhadap 168 perusahaan, 65 'sanksi administrasi' yang tidak ditentukan dan 325 surat peringatan - namun KLHK tidak memberikan rincian perusahaan-perusahaan yang terlibat.⁶⁴

Tabel 6: Sanksi administrasi yang dijatuhkan pada perusahaan perkebunan minyak kelapa sawit yang terkait kebakaran⁶⁵

Perusahaan perkebunan	Kelompok produsen (apabila diketahui)	Tahun	Jenis sanksi
PT Agrindo Green Lestari	Keluarga Fangiono/ Ciliandry Anky Abadi (CAA)	2017	Perintah paksaan
PT Agrindo Green Lestari	Keluarga Fangiono/ Ciliandry Anky Abadi (CAA)	2018	Perintah paksaan
PT Bahana Karya Semesta	Sinar Mas/GAR	2015	Perintah paksaan
PT Banyu Kahuripan Indonesia	Makin	2016	Perintah paksaan
PT Bulungan Agro Citra Persada	TSH Resources	2015	Pembekuan izin
PT Bumi Sawit Sejahtera	IOI	2015	Perintah paksaan
PT Citra Agro Abadi	Keluarga Fangiono/ Ciliandry Anky Abadi (CAA)	2018	Perintah paksaan
PT Graha Agro Nusantara	Gama	2018	Perintah paksaan
PT Guntung Hasrat Makmur		2016	Perintah paksaan
PT Heroes Green Energy	Keluarga Fangiono/ Ciliandry Anky Abadi	2015	Pembekuan izin
PT Kaswari Unggul	Bukit Barisan Indah Prima	2015	Perintah paksaan
PT Langgam Inti Hibrindo		2015	Pembekuan izin
PT Pinang Witmas Abadi		2018	Perintah paksaan
PT Prana Indah Gemilang		2019	Perintah paksaan
PT Priatama Riau	Keluarga Fangiono/First Resources	2016	Perintah paksaan
PT Putra Lirik Domas	Gama	2018	Perintah paksaan
PT Roempoen Enam Bersaudara		2016	Perintah paksaan
PT Russelindo Putra Prima Block I	Rachmat/DSN	2015	Pembekuan izin
PT Sindora Seraya		2016	Perintah paksaan
PT Sumatera Unggul Makmur	Gama	2018	Perintah paksaan
PT Sumur Pandan Wangi		2015	Pembekuan izin
PT Surya Panen Subur 2	Rachmat/Amara	2018	Perintah paksaan
PT Tempirai Palm Resources		2015	Pembekuan izin
PT Waringin Agro Jaya	Cempaka Mas Abadi	2015	Pembekuan izin

KONSESI YANG DISEGEL KLHK UNTUK PENYELIDIKAN KEBAKARAN DI TAHUN 2019

Antara bulan Agustus dan Oktober 2019, KLHK menyegel (melarang aktivitas di) lebih dari 60 konsesi (termasuk konsesi bukan kelapa sawit) atau area di dalam konsesi yang telah terbakar, untuk mencegah penghilangan bukti sambil menanti penyelidikan dilakukan. Ini termasuk konsesi kelapa sawit milik banyak kelompok produsen utama, yang sebagian di antaranya telah dikenai sanksi perdata atau administratif pada tahun-tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa tindakan-tindakan sebelumnya oleh pihak berwenang belum berhasil memaksa perusahaan-perusahaan ini menangani masalah kebakaran mereka.

Informasi mengenai konsesi kelapa sawit yang disegel oleh KLHK karena kebakaran dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk dari daftar KLHK yang bocor,⁶⁶ daftar yang diterbitkan oleh surat kabar Indonesia Kompas⁶⁷ dan sejumlah laporan media.⁶⁸ Meskipun penyegelan konsesi – seperti yang dijelaskan di atas – tidak dengan sendirinya merupakan sanksi atau menunjukkan bahwa perusahaan bersalah atas penggunaan api ilegal, data-data ini melengkapi data-data mengenai sanksi dengan tambahan daftar konsesi-konsesi di mana kebakaran yang dianggap mencurigakan telah terjadi.

Tabel 7. Konsesi kelapa sawit yang disegel KLHK dari bulan Agustus sampai Oktober 2019

Nama perusahaan perkebunan	Kelompok produsen (jika diketahui)	Luas area terbakar yang diidentifikasi KLHK (dalam hektar, jika ada)
PT Adei Plantation and Industry	Kuala Lumpur Kepong (KLK)	4,25
PT Agro Sejahtera Manunggal ⁶⁹	Bumitama	
PT Andes Agro Investama	Cargill	100
PT Arjuna Utama Sawit		65
PT Arrtu Borneo Perkebunan	Rajawali/Eagle High	85
PT Arrtu Energi Resources	Rajawali/Eagle High	100
PT Bara Eka Prima		
PT Borneo Sawit Perdana		4
PT Bumi Perkasa Gemerlang	Sungai Budi/Tunas Baru Lampung	58
PT Central Sejahtera Sukses		4
PT Dendymarker Indah Lestari	SIPEF	
PT Gandaerah Hendana	Gama and Samsung (JV)	100
PT Gelora Sawita Makmur		150
PT Global Kalimantan Makmur	Djarum/HPI Agro	20
PT Grand Mandiri Utama	Tianjin Julong	37,6
PT Ichtiar Gusti Pudi		4
PT Jalin Vaneo	Pasifik Agro Sentosa	
PT Kalimantan Bina Permai		4,8
PT Kaswari Unggul	Bukit Barisan Indah Prima	
PT Kayung Agro Lestari	Austindo Nusantara Jaya (ANJ)	120
PT Kebun Ganda Prima	Salim/IndoAgri	2,3
PT Kedaag Sayaq		200
PT Kumai Sentosa	Gagah Putra Satria	2.300
PT Limpah Sejahtera	Fangiono family/ First Resources	
PT Mega Anugerah Sawit		300
PT Menteng Jaya Sawit Perdana	Kuala Lumpur Kepong (KLK)	50

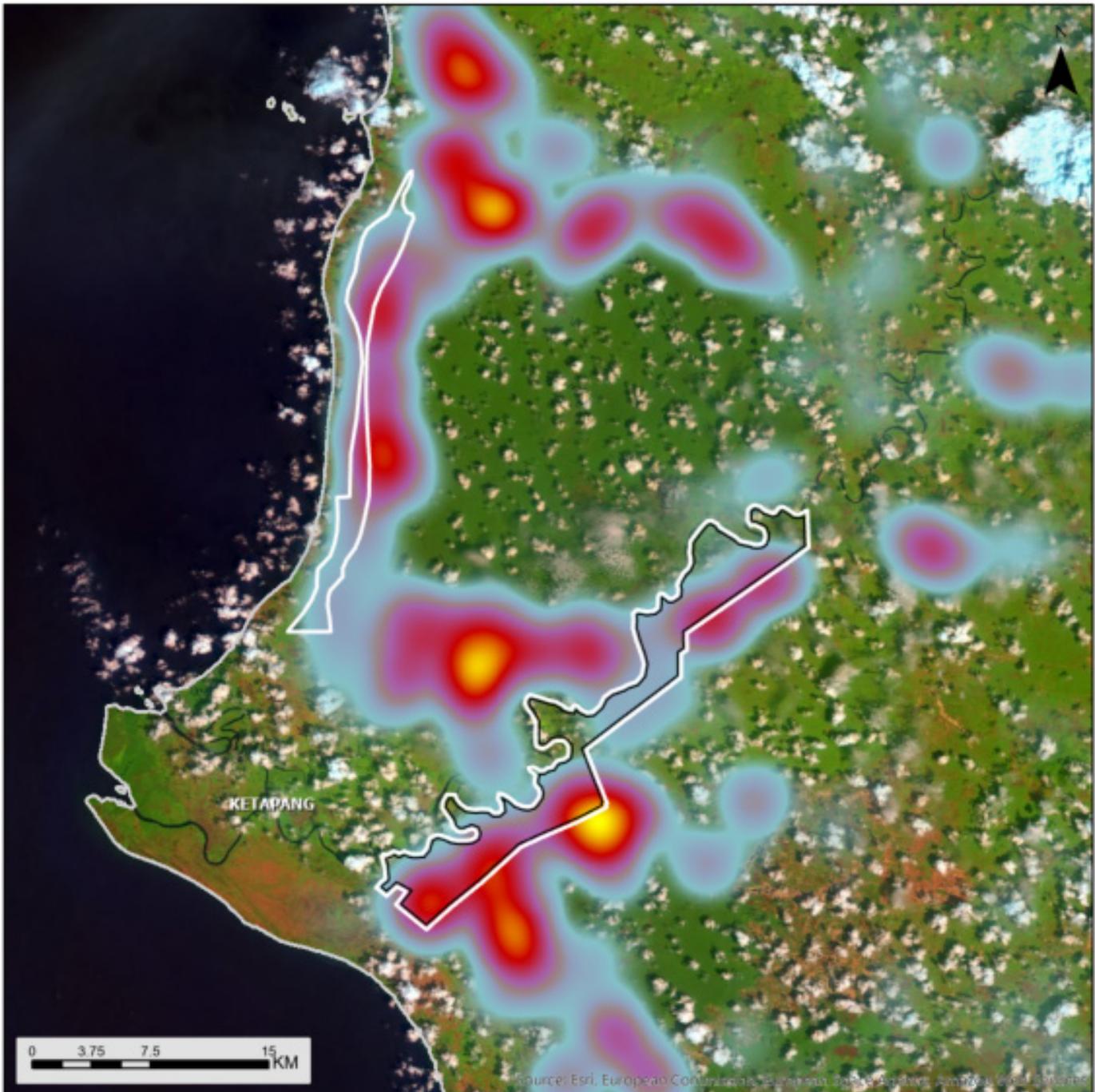
Nama perusahaan perkebunan	Kelompok produsen (jika diketahui)	Luas area terbakar yang diidentifikasi KLHK (dalam hektar, jika ada)
PT Mitra Andalan Sejahtera		60
PT Mitra Austral Sejahtera	Sime Darby/Inti Nusa Sejahtera ⁷⁰	4
PT Mohairson Pawan Khatulistiwa		200
PT Musim Mas	Musim Mas	
PT Mutiara Bunda Jaya	Sampoerna Agro	
PT Nala Palma Gadudasa	NPC Resources	40
PT Nityasa Idola	Rachmat/DSN	14
PT Nusantara Sawit Persada		110
PT Putra Lirik Domas	Gama	30
PT Rafi Kamajaya Abadi		600
PT Rezeki Kencana	Tianjin Julong	
PT Ricky Kurniawan Kertapersada	Makin	
PT Rimbun Sawit Sejahtera		
PT Safari Riau	Kuala Lumpur Kepong (KLK)	
PT Sawit Mitra Abadi	Genting	10
PT Sawit Sumbermas Sarana	Citra Borneo Indah	
PT Sime Indo Agro	Sime Darby	3,34
PT Sinar Karya Mandiri		800
PT Sukses Karya Sawit	IOI	35
PT Sumatera Unggul Makmur	Gama	70
PT Sungai Putri Agro Sawit		121
PT Surya Bratasena Plantation		
PT Teguhkarsa Wanalestari	RGE palm-linked	8
PT Teso Indah		40
PT TH Indo Plantations	Gama	3.9
PT Waringin Agro Jaya	Cempaka Mas Abadi	

Tabel 8: Rangkuman kelompok produsen minyak sawit yang terkait erat dengan kebakaran

Kelompok produsen	Jumlah titik api tahun 2019 (Jan–Sep)	Luas area terbakar 2015–2018 (ha)	Area yang terbakar lebih sekali	Jumlah tindakan hukum (perdata/pidana) yang teridentifikasi 2013–2019	Jumlah sanksi administratif 2015–Januari 2019	Jumlah penyegelan 2019
Agro Inti Semesta	76	12.996	0			
Astra Agro Lestari	151	4.515	188			
Austindo Nusantara Jaya (ANJ)	346	61	61			1
Bakrie	331	18.219	1.744			
Best Agro Plantation	153	7.153	912			
Bumitama	545	3.803	132			1
Citra Borneo Indah	105	6.814	8			1
Fangiono family	3598	7.433	596		4	1
Gagah Putera Satria	426	0	0			1
Gama	504	7.608	332	1	3	4
Genting	765	8.184	84	1		1
IOI	251	4.276	328		1	1
Jaya Agra Wattie	129	6.182	1.232			
Korindo		11.461	0			
Kuala Lumpur Kepong (KLK)	188	1.113	31	1		3
Matahari Kahuripan Indonesia (Makin)	310	6.022	656	1	1	1
Musim Mas	61	6.066	465			1
NPC Resources	418	3.562	428			1
Pasifik Agro Sentosa	214	6.246	441			1
Perkebunan Nusantara	495	5.091	373			
Rachmat	669	18.382	4.057	1	2	1
Rajawali/Eagle High	837	6.174	160			2
Salim	332	7.811	29			1
Sime Darby	325	2.008	0			2
Sinar Mas/GAR	323	3.148	29		1	
SIPEF	274	7.316	28			1
Sungai Budi/Tunas Baru Lampung	529	17.772	1.237			1
Tianjin Julong	263	6.879	90	2		2
TSH Resources	293	5.800	140		1	
Wilmar	288	1.610	0			



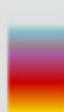
3 Desember 2015, PT Arttu Energi Resources, 1°43'53.999" S 110°14'33" T": Sisa-sisa hutan yang terbakar setelah kebakaran baru-baru ini dalam konsesi kelapa sawit milik Rajawali/Eagle High di Kalimantan Barat. Tampak di latar belakang perkebunan kelapa sawit yang dioperasikan oleh perusahaan yang berbeda, yang tampaknya tidak terkena dampak kebakaran. Semua perusahaan konsumen dan pedagang yang ditinjau untuk laporan ini dipasok oleh Rajawali/Eagle High.
©lfansasti/Greenpeace



Source: Esri, European Commission, DigitalGlobe, GeoEye, AeroGRID, IGN, SDA, CNES-Airbus DS, USDA, AeroGRID, IGN, SDA, CNES-Airbus DS

-  Blok PT Arrtu Energi Resources yang disegel*
-  PT Arrtu Energi Resources**
-  Batas Kabupaten

Peringatan titik api Jan-Sep 2019***

 Jarang

 Sering

*Konsesi yang disegel KLHK 2019
 **Batas wilayah konsesi hasil digitasi Greenpeace
 ***Peringatan titik api berdasarkan data MODIS dan VIIRS (01/01)





12 September 2019, PT Globalindo Agung Lestari, 2° 29'7.12" S 114°34'46.03" T dan 2° 29'21.829" S 114°34'40.6" T: Tangkapan drone dari asap yang membung dari pembakaran hutan lahan gambut di atas sebuah kanal pengeringan dalam konsesi kelapa sawit milik perusahaan Malaysia Genting Plantations Berhad yang telah disegel oleh KLHK untuk penyelidikan. Semua perusahaan konsumen dan pedagang yang ditinjau untuk laporan ini dipasok oleh Genting. ©Rizky/Greenpeace





22 September 2019, PT Dyera Hutani Lestari, Jambi: Seekor burung elang (*Nisaetus cirrhatus*) terbang di atas lahan gambut yang terbakar. ©Adimaja/Greenpeace

'Transparansi, partisipasi, dan akses ke keadilan sangat penting bagi tata kelola yang baik. Pemerintah dan perusahaan memainkan peran integral dalam memastikan transparansi dan akses ke informasi terkait hutan, yang merupakan hal mendasar untuk menciptakan kondisi yang diperlukan untuk melindungi dan meningkatkan hutan. Transparansi sangat penting untuk tata kelola yang baik karena memungkinkan praktik-praktik yang bertanggung jawab, inklusif, sah, dan demokratis. Inklusivitas ini selanjutnya bergantung pada mekanisme untuk memungkinkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan masalah hutan. Terakhir, akses ke keadilan memberdayakan warga negara untuk menentang keputusan dan tindakan setelah dijalankan, melalui mekanisme peradilan dan administrasi.

Akses sejati juga bergantung pada keberadaan sarana dan dukungan untuk bermanuver di seluruh sistem-sistem ini. Informasi seperti laju deforestasi, penguasaan hutan, dan konsesi di kawasan hutan memungkinkan para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dan memengaruhi pengambilan keputusan dan pemantauan dengan mengecek pemerintah dan aktor-aktor lain. Namun, untuk membuat perbedaan, informasi tidak hanya harus tersedia dan dapat diakses. Para pemangku kepentingan juga harus tahu cara mencarinya dan memiliki sarana untuk memperoleh dan menggunakannya.⁷⁸⁰

Laporan Penilaian Lima Tahun Mitra Penilaian NYDF, September 2019

KAITAN PASAR

Sebagai kajian proksi atas kemajuan yang telah dibuat pasar global untuk mengakhiri hubungannya dengan kerusakan lingkungan, Greenpeace meninjau pengungkapan paling baru yang tersedia untuk umum tentang rantai pasok beberapa pedagang terbesar dan paling berpengaruh (Cargill, GAR, Musim Mas dan Wilmar⁷¹) dan perusahaan barang konsumen (MondelDz, Nestlé, P&G dan Unilever⁷²) yang terlibat dalam perdagangan dan pembelian minyak kelapa sawit dari Indonesia (untuk sumber data dan metodologi lihat Lampiran 1).

Hasilnya mengungkapkan bahwa rantai pasok dari pedagang dan perusahaan barang-konsumen tersebut mencakup banyak kelompok produsen minyak kelapa sawit yang paling terlibat dalam krisis kebakaran – yaitu mereka yang memiliki kebakaran terbanyak di konsesi mereka dalam sembilan bulan pertama tahun 2019, yang memiliki luas area terbakar terbesar di konsesi mereka antara tahun 2015 dan 2018 dan/atau yang telah dikenai sanksi atas kebakaran. Selain mengungkapkan hubungan-hubungan tingkat kelompok usaha ini, daftar pabrik dari perusahaan-perusahaan konsumen ini mengidentifikasi, sebagai pemasok, sejumlah perusahaan perkebunan tertentu, yang sebagian besar dimiliki kelompok yang diidentifikasi dalam laporan ini, yang telah dikenai sanksi atau yang konsesinya telah disegel untuk penyelidikan akibat terjadi kebakaran.

Ada kemungkinan bahwa masing-masing pedagang dan perusahaan barang konsumen (atau pemasok mereka) mungkin telah menghilangkan beberapa kelompok produsen bersangkutan dari rantai pasok mereka sejak menerbitkan daftar pabrik terbaru mereka. Jika memungkinkan, proses peninjauan Greenpeace memperhitungkan informasi di pelacak keluhan yang tersedia untuk umum milik pedagang atau perusahaan – yaitu daftar pemasok yang diketahui tidak patuh dengan persyaratan ‘tanpa deforestasi, tanpa gambut, tanpa eksploitasi’ (NDPE), beserta tindakan-tindakan yang diambil – yang menunjukkan bahwa pihak perusahaan telah berhenti mengambil pasokan dari suatu kelompok produsen, bahkan meskipun ini tidak tercermin dalam daftar pabrik terbaru yang dikeluarkan pihak perusahaan.⁷³ Dalam hal pelacak keluhan tidak tersedia untuk umum, ada kemungkinan perubahan-perubahan terbaru tidak diperhitungkan. Perusahaan harus bertanggung jawab atas informasi yang mereka pilih untuk publikasi.

Perlu dicatat bahwa kedelapan perusahaan konsumen dan pedagang yang dikaji adalah anggota atau bahkan anggota dewan RSPO, begitu juga halnya dengan lebih dari dua pertiga kelompok produsen bermasalah yang dikaitkan oleh analisis ini.⁷⁴ Memang, tiga perempat dari titik api tahun 2019 yang dikaitkan dengan kelompok produsen minyak kelapa sawit yang paling terlibat dalam kebakaran (sebagaimana diidentifikasi dalam laporan ini) berada di konsesi yang dikendalikan oleh kelompok usaha yang menjadi anggota penuh atau parsial RSPO – sebuah dakwaan yang cukup serius terhadap sebuah organisasi dengan sejarah 15 tahun yang tujuannya adalah untuk ‘mentransformasi pasar dengan menjadikan minyak kelapa sawit berkelanjutan sebagai norma’.⁷⁵ Di bawah aturan RSPO, sebuah kelompok usaha harus menjadi anggota pada tingkat yang mencakup semua operasi minyak kelapa sawitnya,⁷⁶ yang berarti keanggotaan parsial adalah pelanggaran terhadap aturan ini. Untuk laporan ini, semua operasi suatu kelompok usaha diperlakukan sebagai operasi terkait RSPO di mana bagian mana pun dari kelompok usaha bersangkutan saat ini adalah anggota RSPO.

Tabel 9: Kaitan RSPO dengan kebakaran⁷⁷

	Jumlah kelompok usaha	Titik api tahun 2019 (sampai 30 September)	Total luas kebakaran 2015–2018 (ha)
Semua kelompok usaha dalam laporan ini	30	9,60	204.514
Kelompok usaha terkait RSPO	21	7.427	149.663
Persentase terkait RSPO	70%	75%	73%

Sebelum publikasi, Greenpeace telah menawarkan kesempatan kepada semua kelompok produsen minyak sawit dan pengguna akhir yang disoroti dalam laporan ini untuk memberikan tanggapan. Respons dibahas dalam Lampiran 3 dan tersedia untuk umum.⁷⁸ Bukti-bukti telah diminta untuk mendukung semua klaim tentang kesalahan dalam analisis pemetaan. Demikian pula, setiap perubahan terhadap dugaan kesalahan dalam kaitan lacak balak harus didukung oleh publikasi daftar pabrik yang telah diperbaiki.

Tabel 10: kaitan rantai pasok pedagang dan perusahaan barang konsumen yang disebutkan di sini dengan perusahaan perkebunan yang dikenai tindak perdata/pidana atau sanksi administrasi

Perusahaan perkebunan	Kelompok produsen	Jenis tindakan/sanksi	Pedagang				Perusahaan barang konsumen			
			Cargill	GAR	Musim Mas	Wilmar	Mondeléz	Nestlé	P&G	Unilever
PT Adei Plantation and Industry	Kuala Lumpur Kepong (KLK)	Pidana	X			X	X	X	X	X
PT Arjuna Utama Sawit		Perdata	X	X	X	0	X	X		
PT Bahana Karya Semesta	Sinar Mas/GAR	Administrasi		X				X	X	X
PT Banyu Kahuripan Indonesia	Makin	Administrasi	X					X	X	X
PT Jatim Jaya Perkasa	Gama	Perdata dan pidana	X			X		X	X	
PT Langgam Inti Hibrindo		Administrasi	X			X	X	X	X	X
PT Palma Utama	Tianjin Julong	Perdata	X	X			X	X		X
PT Ricky Kurniawan Kertapersada	Makin	Perdata dan pidana	X	X				X		X
PT Surya Panen Subur	Rachmat/Amara	Perdata dan pidana	0					X	X	X
PT Waimusi Agroindah		Perdata	X		X	X	X	X		X

Tabel 11: Kaitan rantai pasok pedagang dan perusahaan barang konsumen yang disebutkan dalam laporan ini dengan konsesi kelapa sawit yang disegel tahun 2019

Perusahaan perkebunan	Kelompok usaha	Pedagang				Perusahaan barang konsumen:			
		Cargill	GAR	Musim Mas	Wilmar	Mondeléz	Nestlé	P&G	Unilever
PT Adei Plantation and Industry	Kuala Lumpur Kepong (KLK)	X		X	X	X	X	X	X
PT Agro Sejahtera Manunggal	Bumitama	X	X		X	X	X	X	X
PT Andes Agro Investama	Cargill		X						
PT Arjuna Utama Sawit		X	X	X	0	X	X		
PT Dendymarker Indah Lestari	SIPEF	X			X	X	X		X
PT Gandaerah Hendana	Gama and Samsung (JV)	X	X	X	X	X	X	X	
PT Global Kalimantan Makmur	Djarum/HPI Agro	X	X		X	X	X		X
PT Ichtiar Gusti Pudi		X			X	X	X	X	X
PT Kayung Agro Lestari	Austindo Nusantara Jaya (ANJ)						X		X
PT Limpah Sejahtera	Fangiono family/First Resources	X				X	X	X	X
PT Mitra Austral Sejahtera	Sime Darby/Inti Nusa Sejahtera ⁷⁹	X	X	X	X	X	X		X
PT Musim Mas	Musim Mas	X		X		X	X	X	X
PT Mutiara Bunda Jaya	Sampoerna Agro	X	X		X	X	X	X	X
PT Nala Palma Cadudasa	NPC Resources	X				X	X	X	X
PT Nusantara Sawit Persada		X	X		X	X	X	X	X
PT Rezeki Kencana	Tianjin Julong	X	X			X	X	X	X
PT Ricky Kurniawan Kertapersada	Makin	X	X				X		X
PT Sawit Mitra Abadi	Genting								
PT Sawit Sumbermas Sarana	Citra Borneo Indah								X
PT Sime Indo Agro	Sime Darby	X	X	X	X	X	X	X	X
PT Sukses Karya Sawit	IOI		X	X	X	X	X	X	X
PT Surya Bratasena Plantation				X	X	X	X	X	X
PT Teguhkarsa Wanalestari	RGE palm-linked	X		X		X	X	X	X
PT TH Indo Plantations	Gama				X	X	X	X	X

MASALAH TRANSPARANSI



22 September 2019, PT Agro Tumbuh Gemilang Lestari, 1° 14'54,94" S 103°58'37,65" T: Lambang perusahaan dekat lahan gambut terbakar di konsesi kelapa sawit di Jambi yang tengah menghadapi pengadilan sipil. ©Adimaja/Greenpeace

Temuan-temuan dari analisis ini melampaui paparan pasar yang berkelanjutan terhadap kelompok-kelompok produsen minyak kelapa sawit yang paling kuat terkait dengan kebakaran baru-baru ini di Indonesia. Transparansi – dan penyediaan data dalam format yang berguna, yang memungkinkan dilakukannya peninjauan independen – merupakan prasyarat untuk reformasi sektoral, terutama untuk mengakhiri kaitan minyak kelapa sawit dengan deforestasi, kebakaran, dan kegiatan merusak lingkungan lainnya serta eksploitasi manusia.

Agar perusahaan yang memperdagangkan atau mengonsumsi minyak kelapa sawit dapat menunjukkan dengan meyakinkan bahwa rantai pasoknya tidak terkait dengan deforestasi, penggunaan api, pelanggaran hak asasi manusia, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya, informasi yang disebar untuk umum harus mutakhir, komprehensif, dan transparan. Pandangan luas tentang komposisi masing-masing kelompok produsen minyak kelapa sawit, termasuk hubungan kendali dan kepemilikannya, sangat penting mengingat sifat kelompok-kelompok ini yang seringkali sulit dipahami (lihat Lampiran 2). Pedagang atau perusahaan barang konsumen yang hanya berfokus pada minyak kelapa sawit fisik dalam rantai pasok langsung mereka dapat memuaskan diri sendiri bahwa konsesi atau pabrik kelapa sawit dari mana minyak mereka berasal tidak terlibat dalam deforestasi atau praktik merusak lainnya, sambil mengabaikan fakta bahwa kelompok produsen yang memiliki konsesi atau pabrik tersebut mungkin saja membuka atau membakar lahan di tempat lain.

Banyak pedagang, termasuk Cargill, GAR dan Wilmar, menyatakan bahwa kebijakan NDPE mereka dimaksudkan untuk diterapkan pada seluruh kelompok produsen, sebuah konsep yang memperhitungkan tidak hanya kepemilikan tetapi juga kontrol keuangan, manajerial dan/atau operasional bersama. Beberapa perusahaan barang konsumen besar juga kurang lebih telah mengadopsi prinsip tanggung jawab tingkat kelompok dalam implementasi NDPE, meskipun dalam praktiknya mereka tampaknya nyaris tidak melakukan upaya untuk menegakkan kepatuhan. Accountability Framework Initiative (AFI),⁸¹ RSPO⁸² dan CGF⁸³ (serta FSC⁸⁴ di sektor kayu dan pulp) semuanya mengadopsi sejenis tanggung jawab tingkat kelompok.

Namun, terlepas dari pentingnya identifikasi tingkat kelompok dalam menerapkan kebijakan NDPE, tidak ada database konsesi, pabrik dan kelompok produsen kelapa sawit yang mengendalikannya yang tersedia untuk umum. Akibatnya, analisis rantai pasok seringkali memerlukan penelitian yang melelahkan jika ingin memberikan gambaran lengkap tentang pabrik dan konsesi yang dikendalikan oleh masing-masing kelompok usaha.

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak pedagang komoditas telah mengambil langkah-langkah penting menuju transparansi dan mengimplementasikan komitmen NDPE dalam rantai pasok minyak kelapa sawit mereka dengan menerbitkan, biasanya tiga bulan sekali, nama-nama dan lokasi pabrik-pabrik yang memasok mereka, bersama dengan perusahaan perkebunan dan, dalam beberapa kasus, kelompok produsen yang mengendalikan setiap pabrik ini. Pada awal tahun 2018, Greenpeace menantang 17 dari perusahaan-perusahaan barang konsumen terbesar untuk mempublikasikan informasi penting yang sama ini untuk rantai pasok mereka sendiri. Analisis Greenpeace untuk laporan Hitung Mundur Terakhir bulan September 2018 terhadap pengungkapan yang dilakukan sebagai respons atas tantangan Greenpeace ini menunjukkan bahwa, terlepas dari sangat pentingnya informasi tersebut, informasi kepemilikan pabrik dalam pengungkapan perusahaan dalam banyak kasus adalah tidak lengkap dan tidak konsisten⁸⁵

Tinjauan terhadap daftar pedagang dan pabrik perusahaan konsumen terbaru menunjukkan bahwa transparansi di seluruh sektor tetap memprihatinkan.

Salah satu masalah gamblang dengan sebagian daftar-daftar pabrik yang dipertimbangkan ini – khususnya yang diberikan perusahaan-perusahaan barang konsumen – adalah lamanya waktu penerbitan. Sementara daftar yang diterbitkan oleh para pedagang relatif mutakhir dan umumnya diperbarui setiap tiga bulan, daftar yang diterbitkan oleh perusahaan konsumen sejauh ini maksimal hanya diperbarui setiap tahun dan dalam beberapa kasus mencakup periode jauh sebelum penerbitannya. Sangat sulit untuk memahami bagaimana P&G dapat membenarkan tidak adanya penerbitan daftar pabrik tahun 2018 sampai saat ini, sementara dalam kasus Mondelez dan Nestlé bahkan tidak jelas ‘usia’ informasi yang disertakan pada saat ‘foto’ diambil. Daftar dari Nestlé, meskipun menampilkan informasi dari bulan April 2018 (dan karenanya mungkin berasal dari tahun 2017 dalam beberapa kasus, mengingat penundaan yang tak terelakkan selama beberapa bulan dalam penyediaan informasi oleh pedagang), baru diterbitkan di bulan Agustus 2019.

Dalam hal konten aktual dari daftar-daftar tersebut, masalah yang mendalam dan terus-menerus ada masih mengenai penggunaan pabrik sebagai proksi untuk asal minyak kelapa sawit yang dipasok, bukannya mengungkapkan lokasi aktual dari konsesi atau perkebunan. Informasi geospasial tentang batas-batas konsesi merupakan hal mendasar untuk transparansi rantai pasok.

Kelompok produsen juga terus-menerus kurang teridentifikasi dalam data pedagang dan perusahaan konsumen, di mana sejumlah daftar mengidentifikasi masing-masing perusahaan perkebunan, bukannya kelompok produsen keseluruhan, sebagai perusahaan induk dari pabrik pemasok. Khususnya, MondelDz tidak memasukkan sama sekali informasi perusahaan induk atau kelompok produsen dalam daftarnya, mengidentifikasi pabrik hanya dengan nama dan koordinat GPS. Ketiadaan data kepemilikan perusahaan yang penting menimbulkan pertanyaan akan komitmen perusahaan terhadap implementasi NDPE di tingkat kelompok, dan mempersulit pemangku kepentingan untuk memantau kinerja NDPE mereka.

Banyak kelompok produsen terkait kebakaran yang ditampilkan dalam laporan ini memiliki jaringan kepemilikan dan kontrol yang kompleks yang tidak diakui secara publik (lihat Lampiran 2). Jika bukan sebelumnya, pedagang dan perusahaan barang konsumen baru disadarkan akan identitas beberapa kelompok ini oleh Greenpeace dan LSM lain pada tahun 2017 dan 2018. Sebagian besar pedagang yang disuplai oleh kelompok-kelompok ini, termasuk Cargill, GAR, Musim Mas dan Wilmar, telah memasukkan kelompok dan pabrik/konsesi mereka ke dalam pelacak keluhan mereka; namun, dalam banyak kasus, data pabrik pedagang dan perusahaan konsumen masih gagal mengidentifikasi kelompok-kelompok tersebut sebagai pemilik pabrik dan perkebunan terkait. Dalam beberapa kasus, pedagang gagal mengidentifikasi suatu pabrik dalam daftar pabrik mereka sebagai milik kelompok tertentu bahkan ketika mereka terlibat dengan kelompok itu atas dugaan ketidakpatuhan.

Terakhir, data akurat tentang kepemilikan dan batas-batas konsesi tidak tersedia di Indonesia, dan meskipun ada upaya-upaya yang dilakukan oleh LSM untuk menekan perusahaan dan pemerintah untuk mengeluarkan data ini, kemajuannya sangat terbatas. Namun, Greenpeace dan LSM lain mampu menghimpun data konsesi nasional 'terbaik yang tersedia' dari berbagai sumber, di tengah minimnya kerja sama. Yang memprihatinkan, pemerintah Indonesia dan negara-negara lain di kawasan ini lebih banyak menghalangi daripada mendukung upaya-upaya untuk menciptakan sistem pemantauan yang transparan untuk memastikan bahwa rantai pasok dan kegiatan keuangan tidak berkontribusi terhadap perusakan ekosistem atau konflik sosial.

Secara keseluruhan, keakuratan dan kelengkapan data yang tersedia untuk memverifikasi kepatuhan dengan komitmen NDPE korporat diragukan dan bervariasi, bahkan di antara perusahaan konsumen yang bergantung pada mitra implementasi bersama sehingga seolah-olah memiliki akses ke informasi istimewa yang sama tentang kepemilikan kelompok usaha. Kelompok produsen yang bertanggung jawab atas deforestasi, kebakaran, atau pelanggaran hak asasi manusia terus 'bersembunyi di depan mata' dalam pengungkapan rantai pasok.

Sementara semua upaya yang wajar telah dilakukan untuk memastikan agar data kelompok usaha dan konsesi yang digunakan untuk analisis dalam laporan ini akurat, dikarenakan perbedaan sumber data dan kurangnya transparansi pemerintah dan perusahaan, mungkin terjadi beberapa ketidakakuratan. Kelompok usaha diberi kesempatan untuk memberi tanggapan sebelum publikasi laporan ini dan diminta untuk memberikan bukti-bukti untuk mendukung perubahan apapun pada temuan-temuan ini. Tanggapannya dibahas dalam Lampiran 3 dan Lampiran 4.

Analisis Greenpeace mengungkapkan bahwa merek-merek terkemuka dan perusahaan-perusahaan barang konsumen secara luas terpapar pada kelompok-kelompok produsen yang ditinjau dalam laporan ini – namun akibat kelemahan yang serius dalam hal transparansi, banyak dari paparan ini tidak tampak jelas dalam pengungkapan rantai pasok publik mereka, yang memerlukan analisis yang melelahkan untuk mengungkapkan sepenuhnya kaitan mereka dengan perusahaan-perusahaan yang bertanggung jawab atas kebakaran, deforestasi dan eksploitasi manusia. Selain itu, akibat berbagai tantangan data yang dipaparkan di atas, analisis ini hampir pasti merendahkan (membuat perkiraan yang lebih rendah dari yang sebenarnya tentang) tingkat keterpaparan merek dan pedagang terhadap kelompok-kelompok produsen yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan.

Karena alasan ini, Greenpeace mencurahkan kapasitas dan sumber daya yang signifikan selama delapan bulan pertama tahun 2019 untuk melakukan diskusi kolaboratif dengan Wilmar, Unilever, MondelDz dan Aidenvironment untuk mengembangkan sebuah platform pemantauan rantai pasok yang kredibel, transparan dan independen untuk sektor minyak kelapa sawit dan perdagangan komoditas global. Ketidakmampuan untuk mencapai kesepakatan bahkan pada elemen-elemen inti minimal yang diperlukan untuk membentuk platform semacam itu telah membuat Greenpeace mengambil kesimpulan yang jelas bahwa terlepas dari satu dekade komitmen yang diutarakan dan banyak inisiatif tentang rantai pasok 'berkelanjutan' dan 'bertanggung jawab', baik oleh para pemain utama di industri minyak kelapa sawit itu sendiri dan pengguna akhirnya, sektor minyak kelapa sawit telah membuktikan dirinya tidak mampu atau tidak mau melakukan reformasi.

LAMPIRAN 1: METODOLOGI DAN DATA

Analisis dalam laporan ini disandarkan pada sejumlah sumber data dan informasi untuk:

- lokasi titik api dan area terbakar (bekas kebakaran tahunan) di area penanaman kelapa sawit di Indonesia;
- lokasi, batas dan kepemilikan langsung dari konsesi kelapa sawit sekitar yang terkena dampak kebakaran;
- identitas, lokasi dan kepemilikan langsung dari pabrik pengolah tandan buah segar (TBS) yang berasal konsesi ini;
- berbagai tindakan penegakan yang diambil terhadap perusahaan yang konsesinya mengalami kebakaran;
- identitas kelompok produsen minyak kelapa sawit yang pada akhirnya memiliki dan/atau mengendalikan konsesi yang terkena dampak kebakaran dan pabrik terkaitnya (antara lain), baik melalui struktur induk-anak perusahaan formal atau melalui jaringan dari kaitan kepemilikan, manajemen dan kaitan lain yang bersifat informal, dan seringkali rahasia; dan
- keberadaan dalam rantai pasok perusahaan (pedagang dan perusahaan barang konsumsi) minyak kelapa sawit hilir baik yang berasal langsung dari pabrik yang memproses TBS dari konsesi yang terkena dampak kebakaran atau dipasok oleh kelompok produsen yang mengoperasikan pabrik tersebut dan/atau konsesi yang memasok mereka.

Sumber-sumber untuk masing-masing jenis data dan informasi ini dijelaskan di bawah, diikuti dengan penjelasan singkat tentang bagaimana analisis kami menganalisis mereka semua untuk menghasilkan apa yang disajikan dalam laporan ini. Sebagian besar tipe data menunjukkan satu macam atau lebih kekurangan dan keterbatasan yang tidak dapat dihindari, yang dibahas dalam setiap kasus.

AREA TERBAKAR

Informasi resmi pemerintah Indonesia digunakan untuk analisis area terbakar. Pemerintah Indonesia, melalui KLHK, telah menerbitkan peta resmi bekas kebakaran tahunan⁸⁶ setiap tahunnya sejak 2015. Greenpeace menganalisis data untuk tahun 2015 hingga 2018 (pemetaan bekas kebakaran untuk tahun 2019 tidak tersedia pada saat penulisan).

Keterbatasan

Meskipun ada kemungkinan bahwa peta-peta ini mengandung beberapa ketidakakuratan, peta-peta ini digunakan di sini karena merupakan satu-satunya sumber data resmi untuk area terbakar di Indonesia. Greenpeace berpandangan bahwa jika perusahaan mengidentifikasi ketidakakuratan dalam peta-peta ini, yang tersedia untuk umum, adalah tanggung jawab mereka untuk membahas dan menyelesaikan masalah-masalah ini secara langsung dengan pemerintah. Adalah tanggung jawab pemerintah untuk memastikan bahwa peta-peta ini mutakhir dan akurat.

Perusahaan yang dihadapkan dengan bukti-bukti pemetaan area yang terbakar dalam konsesi mereka seringkali berargumen bahwa kebakaran dimulai bukan oleh mereka tetapi oleh masyarakat setempat atau pihak ketiga lainnya untuk membuka lahan, atau kebakaran terjadi secara spontan (misalnya akibat sambaran petir), dan bahwa kebakaran-kebakaran ini mungkin dimulai di luar konsesi mereka dan menyebar ke sana. Penjelasan seperti itu tidak diragukan adalah benar dalam banyak kasus. Seringkali, adalah mustahil bagi suatu penyelidikan untuk menetapkan penyebab kebakaran dengan pasti. Meskipun demikian, mengingat bahwa undang-undang Indonesia secara jelas menetapkan bahwa perusahaan perkebunan secara hukum bertanggung jawab atas setiap kebakaran dalam konsesi mereka, terlepas dari sumber apinya,⁸⁷ Greenpeace berpendapat bahwa adalah sepenuhnya dibenarkan menyajikan data untuk kebakaran yang mempengaruhi konsesi kelompok tertentu, terlepas dari penyebabnya. Ini mewakili gambaran terbaik yang tersedia tentang paparan kelompok produsen atau perusahaan hilir terhadap krisis kebakaran di Indonesia, dan tanggung jawab sektor perkebunan secara keseluruhan.

TITIK API

Data titik api diunduh dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Indonesia (LAPAN)⁸⁸ dan mencakup data dari satelit MODIS Aqua dan Terra dan VIIRS SNPP⁸⁹ dari semua nilai kepercayaan (confidence values).⁹⁰ Menggabungkan data peringatan dari berbagai satelit ini, melintas di waktu-waktu yang berbeda di siang hari, meningkatkan kemungkinan menangkap api di dalam area konsesi. Hitungan titik api untuk setiap konsesi diambil dengan analisis spasial dalam Sistem Informasi Geografis (SIG). Pemerintah Indonesia menerapkan data sensor satelit yang sama untuk sistem pemantauannya sebagaimana diterapkan dalam analisis ini.

Penggunaan rentang tingkat kepercayaan yang lengkap untuk titik api dapat dibenarkan atas dasar berikut:

1. Tidak ada hubungan yang didefinisikan dengan jelas antara tingkat kepercayaan dan positif palsu (false positive) atas lanskap Indonesia, sehingga tidak ada tingkat cutoff optimal yang apriori. World Resources Institute (WRI) telah menyatakan: 'Kebakaran dengan tingkat kepercayaan rendah adalah kebakaran dengan intensitas lebih rendah yang bisa berasal dari aktivitas pembukaan lahan nonhutan dengan api (membuka lahan atau membakar rumput), atau bisa juga kebakaran yang lebih lama yang intensitasnya telah menurun (lebih merupakan bara daripada kobaran api).'⁹¹ Demikian pula, kebakaran gambut cenderung dikecualikan dari data titik api yang dibatasi hingga tingkat kepercayaan di atas 80%. Penggunaan semua titik api akan berpotensi melewatkan lebih sedikit kebakaran yang sebenarnya.
2. Kami menggunakan titik api sebagai indikator dan telah menyimpulkannya untuk konsesi dan kelompok konsesi, jadi kami tidak membuat kesimpulan tentang keakuratan masing-masing titik api.

Keterbatasan

Kebakaran mungkin terjadi tanpa terdeteksi oleh sistem yang digunakan untuk analisis ini dikarenakan interval pengambilan data, karena awan atau asap atau tutupan pohon yang menghalangi deteksi, atau karena kebakaran terlalu dingin di permukaan untuk dideteksi (salah satu masalah dengan kebakaran lahan gambut). Sebaliknya, penggunaan semua tingkat kepercayaan tak terelakkan lagi akan mengarah pada dimasukkannya beberapa positif palsu (false positive). Tak ada satu pun sistem pendeteksi kebakaran yang sempurna yang tersedia saat ini.

Selain itu, menggabungkan data dari beberapa satelit, meskipun mengurangi risiko luputnya titik api, memang menciptakan kemungkinan bahwa sebagian kebakaran dihitung lebih dari satu kali.

Seperti halnya dengan data bekas kebakaran, perusahaan-perusahaan yang dihadapkan dengan data titik api sering berargumentasi bahwa titik api di dalam konsesi mereka dapat menunjukkan kebakaran yang dimulai oleh pihak ketiga atau terjadi secara spontan, dan bahwa kebakaran mungkin telah menyebar dari luar batas konsesi mereka atau bahkan berada di luar konsesi. Selain itu, mereka menunjukkan bahwa banyak titik api yang tercantum dalam data adalah positif palsu dan tidak menunjukkan kebakaran sama sekali. Sekali lagi, meskipun ada keterbatasan dalam data ini, kami berpendapat bahwa data yang digunakan untuk keperluan analisis dalam laporan ini bagaimanapun juga memberikan gambaran terbaik yang tersedia. Keakuratan keseluruhan dari data satelit tinggi dan lebih dari cukup untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok produsen yang mengalami kebakaran yang signifikan dalam konsesi yang mereka miliki atau operasikan.

BATAS-BATAS DAN KEPEMILIKAN KONSESI

Pemetaan konsesi Greenpeace didasarkan pada peta konsesi terbaik yang tersedia yang dihimpun oleh Greenpeace dan LSM lain, dengan merujuk pada berbagai sumber perusahaan atau pemerintah resmi.⁹² Identitas perusahaan perkebunan yang merupakan pemilik langsung setiap konsesi berasal dari dokumen perizinan.

Keterbatasan

Peta yang akurat dan terperinci yang menunjukkan lokasi dan batas-batas konsesi, dan data tentang kepemilikan perusahaan perkebunan, tidak tersedia saat ini di Indonesia. Meskipun Greenpeace dan LSM lain terus berupaya menekan perusahaan dan pemerintah untuk merilis data ini, kemajuannya sangat terbatas. Akibatnya, data terbaik yang tersedia, meskipun benar sejauh yang diketahui Greenpeace, tentu masih jauh dari lengkap. Kelompok produsen (termasuk perusahaan konstituen mereka yang paling menonjol) diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan sebelum publikasi laporan, dan semuanya diminta untuk memberikan data konsesi resmi mereka. Hanya satu yang melakukannya.

KEPEMILIKAN PABRIK

Penentuan kepemilikan langsung pabrik dimulai dari asumsi kerja bahwa pabrik yang berlokasi di dalam atau berdekatan dengan konsesi kelapa sawit mungkin dimiliki oleh perusahaan konsesi yang sama. Namun, hal ini tidak selalu terjadi, dan terlebih lagi dalam beberapa kasus Greenpeace mungkin tidak memiliki informasi tentang konsesi apa pun yang terkait dengan pabrik tersebut, atau pabrik tersebut mungkin tidak berlokasi di dalam atau berdekatan dengan konsesi kelapa sawit. Selain itu, meskipun beberapa pabrik mungkin menyebutkan nama perusahaan perkebunan yang sama, mereka seringkali tidak melakukannya. Karenanya, sumber-sumber lain (termasuk akta notaris dan profil pendaftaran perusahaan, laporan tahunan dan situs web) harus dipelajari untuk mengidentifikasi atau menguatkan kepemilikan langsung pabrik. Beberapa daftar pabrik hilir juga dapat memberikan beberapa informasi kepemilikan yang bermanfaat.

TINDAKAN PENEGAKAN

Transparansi masih terbatas di pihak pemerintah Indonesia berkenaan dengan tindakan penegakan hukum terhadap perusahaan perkebunan, tanpa adanya daftar kasus atau penyelidikan yang tersedia untuk umum. Pada bulan Mei-Juli 2019 pemerintah, menanggapi permintaan Kebebasan Informasi dari Greenpeace dan serangkaian surat tindak lanjutnya, akhirnya memberikan beberapa perincian perusahaan yang telah menerima sanksi administratif antara Januari 2015 dan Januari 2019, serta jumlah kasus dan penyelidikan pengadilan perdata dan pidana yang sedang berlangsung atau telah diselesaikan dalam periode tersebut.⁹³ Namun, tanggapannya tidak termasuk nama perusahaan atau perincian lain yang berkaitan dengan kasus dan penyelidikan perdata dan pidana. Oleh karena itu, Greenpeace berkewajiban untuk mengumpulkan informasi tentang tuntutan dan penyelidikan perdata dan pidana saat itu dan baru-baru ini dari tanggapan terhadap permintaan Kebebasan Informasi lainnya yang telah diajukan kepada KLHK, bersama dengan pernyataan pemerintah dan laporan media lainnya yang tersedia untuk umum.⁹⁴

Informasi tentang konsesi kelapa sawit yang disegel (seluruhnya atau sebagian) oleh KLHK antara bulan Agustus dan Oktober 2019 yang menunggu penyelidikan karena kebakaran dikumpulkan dari berbagai sumber resmi dan tidak resmi, termasuk daftar KLHK yang bocor,⁹⁵ daftar yang diterbitkan oleh surat kabar Indonesia Kompas⁹⁶ dan sejumlah laporan media lainnya.⁹⁷

Keterbatasan

Akibat mengandalkan sumber yang sepotong-sepotong di tengah ketiadaan daftar publik, informasi yang dihimpun oleh Greenpeace mungkin tidak mewakili gambaran menyeluruh dari semua tindakan hukum perdata dan pidana yang baru-baru ini diselesaikan terhadap dan penyelidikan terhadap perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang berkaitan dengan kebakaran. Data tentang sanksi administratif mungkin memberi perkiraan yang lebih rendah dibandingkan skala sesungguhnya dari sanksi di sektor kehutanan ini; memang, sebuah siaran pers tanggal 29 Agustus dari KLHK (yang tidak menyebutkan nama masing-masing perusahaan) memberikan angka yang jauh lebih tinggi daripada sumber yang kami gunakan, untuk periode yang hanya sedikit lebih lama.⁹⁸ Selain itu, data yang diberikan kepada Greenpeace oleh pemerintah tidak termasuk nama-nama perusahaan yang telah menerima sanksi administrasi dari jenis yang paling umum dan paling ringan (surat teguran), jadi, dengan tidak adanya sumber data alternatif, jenis sanksi ini harus dihilangkan dari analisis kami. Jumlah konsesi yang disegel juga mungkin lebih kecil dari yang sesungguhnya, dikarenakan alasan yang sama dengan jumlah kasus perdata dan pidana. The number of concessions sealed may also be understated, for similar reasons to the numbers of civil and criminal cases.

KELOMPOK PRODUSEN

Tidak ada database standar yang tersedia untuk umum yang berisi perincian lengkap tentang konsesi dan pabrik kelapa sawit Indonesia, serta kelompok produsen yang mengendalikannya. Banyak konsesi dan pabrik memang dimiliki perusahaan yang didirikan secara formal, yang terdaftar di bursa dengan struktur induk-anak perusahaan konvensional yang mendaftarkan anak perusahaan dan/atau perkebunan mereka yang kurang lebih cukup komprehensif di situs web mereka atau dalam laporan tahunan mereka – sumber-sumber yang menjadi dasar karakterisasi Greenpeace terhadap kelompok-kelompok ini, dilengkapi oleh informasi yang diambil dari dokumen perizinan dan dari daftar pabrik yang diterbitkan pedagang dan perusahaan barang konsumsi (lihat di bawah).

Namun, konsesi dan pabrik lain memiliki kepemilikan dan kontrol yang jauh lebih tidak jelas, yang menjadi bagian jaringan kompleks perusahaan yang dimiliki oleh perorangan atau keluarga yang hubungannya tidak (atau hanya sebagian) diakui secara publik. Dalam beberapa kasus, sebuah perusahaan yang terkenal mungkin memiliki sekelompok 'perusahaan bayangan' yang terhubung secara rahasia di samping anak perusahaan perkebunan yang diakui; dalam kasus lain tidak ada perusahaan induk tunggal dan kelompok usaha ini sebagian besar terdiri dari perusahaan swasta, yang tidak terdaftar di bursa saham mana pun. Anggota keluarga yang berbeda mungkin menjadi pemegang saham utama di berbagai perusahaan, atau bagian-bagian dari kelompok usaha ini mungkin berada di luar negeri, sehingga pemilik akhirnya tidak mungkin diketahui. Adalah perlu untuk mengambil pandangan luas tentang apa yang menjadi suatu kelompok usaha, yang melampaui hubungan kepemilikan yang jelas untuk juga mencakup bentuk-bentuk kontrol lain (keuangan, manajerial, operasional atau lainnya), untuk mengatasi cara-cara ini di mana pemilik yang tidak bermoral mengaburkan kepemilikan mereka atas operasi perkebunan yang terlibat dalam perusakan hutan atau bersalah atas pelanggaran HAM, untuk menghindari membahayakan akses pasar dari anak perusahaan mereka yang diakui secara publik.

Komposisi sejumlah kelompok produsen yang tidak begitu jelas ini, dan alasan di balik penafsiran Greenpeace tentang mereka (secara umum dan masing-masing), diuraikan dalam laporan Greenpeace, *Hitung Mundur Terakhir*.⁹⁹ Kerja tersebut tengah berlangsung, menjadi lebih menantang akibat kegagalan sektor ini dan pengguna akhir untuk bekerja sama.

Apabila memungkinkan, kepemilikan dikaitkan dengan tingkatan tertinggi dari perusahaan induk.

Sumber-sumber berikut telah digunakan untuk mengidentifikasi struktur perusahaan; kaitannya lebih bersifat indikatif daripada eksklusif. Daftar ini disusun berdasarkan signifikansi, dengan memprioritaskan sumber-sumber yang diserahkan oleh perusahaan itu sendiri ke badan resmi (apabila sumber-sumber tersebut tidak tersedia, kami mengandalkan sumber-sumber tambahan, umumnya dengan memprioritaskan informasi yang lebih baru daripada sumber-sumber yang lebih tua):

1. Profil registri resmi perusahaan atau akta notaris
2. Laporan tahunan perusahaan yang tersedia untuk umum dan surat edaran bursa efek
3. Dokumen RSPO, termasuk profil keanggotaan, laporan audit, dokumen Prosedur Penanaman Baru dan notulen Panel Pengaduan
4. Situs web perusahaan
5. Publikasi dari konsultan (misalnya Aidenvironment)
6. Publikasi dari LSM (mis. Auriga, awasMIFEE, Pusaka)

Sumber-sumber berikut dianggap indikatif jika dikonfirmasi oleh setidaknya satu sumber lain dalam daftar ini untuk memberikan bukti yang memadai tentang adanya suatu kaitan. Hal ini disebabkan karena informasi dalam sumber-sumber tersebut biasanya merupakan informasi dari tangan kedua dan mungkin sudah kedaluwarsa:

1. Daftar pabrik (lihat 'Kaitan Hilir' di bawah) dan, dalam kasus-kasus di mana informasi kelompok usaha dilampirkan bersama nama perusahaan pabrik/konsesi, dashboard keterlacakan (pedagang umumnya memperbarui daftar pabrik/dashboard mereka tiga bulan sekali, namun meskipun mereka memiliki tanggal tertentu, informasi yang dikandungnya seringkali tidak mutakhir; daftar pabrik perusahaan barang konsumen paling sering didasarkan pada informasi yang diberikan oleh pedagang yang memasok mereka, tetapi karena mereka saat ini lebih jarang mengungkapkan data tingkat pabrik mereka daripada pedagang, data mereka mungkin bahkan lebih ketinggalan jaman dan tidak akurat)
2. Profil jejaring sosial (misalnya profil LinkedIn dan akun Facebook dan Instagram karyawan/pemilik perusahaan)
3. Alamat perusahaan yang sama
4. Laporan media (bobot yang lebih besar diberikan pada artikel yang mengutip juru bicara perusahaan yang diidentifikasi atau yang berisi siaran pers, dibandingkan dengan artikel di mana nama/pemilik hanya disebutkan oleh wartawan)
5. Transkrip pengadilan
6. Dokumentasi lapangan (misalnya tanda/lambang di atau berdekatan dengan perkebunan yang memuat logo perusahaan, kesaksian dari pekerja)
7. Penelitian internet lainnya, seperti informasi investor internet (mis. Bloomberg, Thompson-Reuters) dan kepemilikan alamat IP

Keterbatasan

Tugas membangun struktur dan cakupan kelompok produsen informal adalah tugas yang kompleks, sebagaimana dibuktikan oleh berbagai sumber potensial yang tercantum di atas, dan hasil yang diperoleh tak terhindarkan lagi harus dianggap berpotensi tidak lengkap. Khususnya, sebagaimana dicatat dalam Hitung Mundur Terakhir, banyak dari kelompok produsen informal yang dibahas seringkali merestrukturisasi kepemilikan atau manajemen perusahaan perkebunan mereka – mungkin sebagian untuk mengaburkan pemegang kontrol sebenarnya. Oleh karena itu, kerja memetakan struktur mereka masih terus berlangsung, dan keseluruhan kendali suatu kelompok perusahaan terhadap pabrik dan pabrik mungkin lebih rendah dari yang sebenarnya.

KAITAN HILIR

Greenpeace meninjau pengungkapan paling baru yang tersedia untuk umum dari rantai pasok beberapa pedagang dan perusahaan barang konsumen terbesar dan paling berpengaruh yang terlibat dalam perdagangan dan pembelian minyak kelapa sawit dari Indonesia. Pengungkapan ini, selanjutnya disebut sebagai 'daftar pabrik', adalah daftar pabrik yang memproduksi minyak kelapa sawit mentah (CPO) yang diterima oleh perusahaan bersangkutan selama periode tertentu, dan biasanya mencakup, untuk setiap pabrik, nama perusahaan induk – yang mungkin berupa perusahaan perkebunan yang dilayani oleh pabrik, perusahaan induk atau kelompok induk keseluruhan – serta perincian lokasi pabrik. Dalam beberapa kasus, dimungkinkan untuk memperbarui gambaran kaitan rantai pasok perusahaan ke kelompok produsen bermasalah yang daftar pabriknya didapat dengan merujuk pada pelacak keluhan milik perusahaan – daftar pemasok yang diketahui tidak patuh dengan persyaratan NDPE, bersama dengan tindakan-tindakan yang diambil untuk memperbaiki ketidakpatuhan tersebut atau untuk membekukan atau mengakhiri hubungan perdagangan.

Keterbatasan

Periode waktu yang dicakup oleh daftar pabrik perusahaan yang dinilai berbeda-beda, dengan terbitan perusahaan barang konsumen merupakan yang kurang mutakhir dan dalam setidaknya satu kasus kurang spesifik untuk periode yang dicakup.¹⁰⁰ Ada juga variasi yang cukup besar dalam tingkat kepemilikan pabrik dan informasi lokasi yang disediakan, yang berarti bahwa beberapa pabrik yang terkait dengan kelompok produsen terkait kebakaran mungkin tidak mungkin dapat diidentifikasi dengan pasti (sudah biasa pabrik-pabrik di lokasi yang berbeda memiliki nama yang sama). Selain itu, beberapa perusahaan tidak memiliki pelacak keluhan yang tersedia untuk umum, sehingga tidak mungkin untuk memperbarui informasi yang disediakan dalam daftar pabrik mereka dengan memperhitungkan keputusan baru-baru ini untuk menghentikan pasokan dari kelompok produsen tertentu.

Secara lebih luas, kelemahan utama dari data yang Greenpeace gunakan dalam analisisnya untuk mengaitkan pedagang dan konsumen minyak kelapa sawit dengan kebakaran, deforestasi atau masalah lain adalah bahwa data ini menggunakan pabrik sebagai proksi untuk asal minyak kelapa sawit yang dipasok, bukannya menghubungkan perusahaan hilir secara langsung ke perkebunan aktual di mana perusakan hutan terjadi. Ini khususnya merupakan masalah karena pabrik mungkin mengolah TBS dari lokasi selain konsesi di atau dekat tempat pabrik berada, sementara sebaliknya TBS dari konsesi yang terkait dengan perusakan hutan mungkin diolah di tempat lain selain di pabrik terdekat. Selain itu, dalam beberapa kasus, konsesi yang terkait dengan pabrik tertentu tidak diketahui. Informasi geospasial tentang batas-batas konsesi (dan area petani plasma) yang memasok pabrik-pabrik tersebut amat penting untuk transparansi dan pemantauan rantai pasok yang efektif.

ANALISIS DATA

Tujuan analisis yang disajikan dalam laporan ini adalah untuk mengungkap mereka yang bertanggung jawab atas kontribusi industri kelapa sawit terhadap krisis kebakaran yang terus melanda Indonesia, pertama mengidentifikasi kelompok produsen yang paling terkait dengan kebakaran, kemudian menyelidiki apakah minyak kelapa sawit dari kelompok-kelompok ini ada di rantai pasok dari beberapa pedagang dan perusahaan barang konsumen yang paling penting.

Perangkat lunak SIG memungkinkan pengguna untuk menghasilkan dan menganalisis semua jenis data geografis dan spasial, seperti peta. Dengan menggunakan SIG, data bekas kebakaran untuk setiap tahun dari 2015 hingga 2018 dipetakan ke pemetaan terbaik yang tersedia untuk batas-batas konsesi kelapa sawit milik Greenpeace, dan dirangkum berdasarkan produsen untuk mengidentifikasi total area yang terbakar setiap tahun dalam konsesi yang dikendalikan oleh kelompok produsen tertentu (seperti yang diidentifikasi oleh Analisis Greenpeace, yang dijelaskan di atas). Area terbakar untuk setiap tahunnya dijumlahkan untuk menghasilkan total area kebakaran yang terkait dengan masing-masing konsesi kelompok usaha selama periode empat tahun tersebut. Jumlah total ini dalam beberapa kasus lebih besar dari keseluruhan area yang terdampak kebakaran selama periode tersebut, karena mencakup beberapa area yang terbakar lebih dari satu tahun.

Data titik api harian untuk periode 1 Januari hingga 30 September 2019 juga dipetakan ke batas-batas konsesi kelapa sawit untuk mengidentifikasi jumlah titik api yang terkait dengan konsesi yang dikendalikan oleh kelompok produsen tertentu selama sembilan bulan pertama tahun ini.

Hubungan pasar pedagang dan perusahaan konsumen terpilih dengan kelompok produsen yang paling kuat terkait dengan krisis kebakaran kemudian dibentuk dengan merujuk silang daftar pabrik yang baru-baru ini diterbitkan perusahaan dengan informasi kepemilikan pabrik dan konsesi milik Greenpeace untuk masing-masing kelompok produsen. Selain mengungkapkan kaitan tingkat kelompok ini, mencermati daftar pabrik ini mengungkapkan bahwa para pedagang dan perusahaan konsumen kesemuanya dipasok oleh setiap perusahaan perkebunan yang menurut data Greenpeace telah dikenai sanksi atau disegel untuk penyelidikan akibat kebakaran.

KESEMPATAN UNTUK MEMBERI TANGGAPAN

Sementara semua upaya yang wajar telah dilakukan untuk memastikan agar data kelompok usaha dan konsesi yang digunakan untuk analisis dalam laporan ini akurat, dikarenakan beragamnya sumber data yang digunakan dan kurangnya transparansi pemerintah dan perusahaan mungkin terdapat beberapa ketidakakuratan.

Sebagaimana dengan laporan sebelumnya tentang sektor minyak kelapa sawit, sebelum publikasi laporan ini, Greenpeace menawarkan kesempatan kepada semua kelompok produsen, pedagang, dan pengguna akhir kelapa sawit yang ditampilkan di sini untuk memberikan tanggapan dan menyediakan data konsesi dan data terkait lainnya untuk membantu memastikan keakuratan semua temuan. Tanggapan dibahas dalam Lampiran 3 dan 4. Bukti-bukti telah diminta untuk mendukung klaim yang dibuat oleh perusahaan tentang kesalahan dalam pemetaan. Sama halnya, segala dugaan kesalahan dalam rantai pasok harus didukung oleh publikasi daftar pabrik yang telah dikoreksi.

Salinan tanggapan perusahaan tersedia di sini:

https://drive.google.com/drive/folders/1XadmdtXMzT_Xg8vQM7tigywjF6MjBKyb?usp=sharing

TRANSPARANSI DAN PEMANTAUAN

Penyebaran platform pemantauan deforestasi daring berbasis satelit kini telah tersedia – terutama GFW, GFW-Pro, Starling, dan Atlas Kalimantan/Papua milik Cifor. Selain itu, ada pemberitahuan berkala tentang perkembangan teknologi baru, seperti peringatan deforestasi mendekati waktu sebenarnya (near real-time) yang disediakan oleh Radar Alerts for Detecting Deforestation (RADD)¹⁰¹

Bukanlah kurangnya teknologi yang menjadi penghalang untuk membersihkan rantai pasok, namun tidak adanya transparansi mengenai kepemilikan dan kontrol atas tanah, dimulai dari kelompok produsen. Pedagang dan perusahaan barang konsumen harus bertindak segera, menjadikan penyediaan peta yang menunjukkan lokasi kepemilikan lahan suatu kelompok usaha sebagai syarat perdagangan, untuk memastikan agar pemantauan mereka terhadap kelompok produsen dalam rantai pasok mereka mencakup bank tanah kelompok usaha tersebut sepenuhnya. Selain memastikan agar pengungkapan mereka selanjutnya memberikan gambaran yang lengkap dan jelas tentang kelompok produsen dalam rantai pasok mereka, perusahaan kemudian harus menghilangkan dari rantai pasok mereka kelompok produsen yang tidak dapat mereka tunjukkan bebas dari keterkaitan dengan kebakaran, deforestasi atau kerusakan lingkungan lainnya.

Di saat yang sama, untuk memastikan agar pedagang dan perusahaan barang konsumen dapat dimintai pertanggungjawabannya, akses terbuka ke data yang andal yang memungkinkan pemantauan independen terhadap rantai pasok pasar minyak kelapa sawit global adalah prasyarat untuk reformasi apapun dari sektor ini. Saat ini, akses tersebut dirugikan oleh fakta bahwa platform pemantauan yang memiliki akses ke data rantai pasok klien mereka hanya dapat diakses oleh pemangku kepentingan tertentu dan dengan pembayaran.

Mengingat kegagalan baru-baru ini dari usaha patungan Wilmar/Unilever untuk mewujudkan komitmennya terhadap platform pemantauan transparan untuk sektor ini, Greenpeace akan segera menerbitkan versi terbaru dari peta konsesi kelapa sawitnya – termasuk rincian kepemilikan/kendali oleh produsen kelompok dan data spasial relevan lainnya – dalam upaya untuk mengkatalisasi transparansi yang lebih besar dalam, dan akuntabilitas, sektor minyak kelapa sawit.

Greenpeace secara aktif mencari mitra yang akan berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas dan transparansi data. Data ini sepenuhnya terbuka untuk ditinjau dan kami menyambut baik koreksi data dari perusahaan dan organisasi.

LAMPIRAN 2: KELOMPOK PRODUSEN YANG DIBAHAS DALAM LAPORAN INI

‘Kelompok perusahaan perkebunan adalah kumpulan orang atau badan usaha perkebunan yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan.’¹⁰²

Peraturan Menteri Pertanian Indonesia, 2013

Sebagian besar industri perkebunan, terutama di Asia Tenggara, selalu dikendalikan oleh konglomerasi kompleks yang dimiliki oleh individu dan keluarga. Dalam banyak kasus, suatu kelompok usaha tidak memiliki perusahaan induk tunggal dan sebagian besar mungkin terdiri dari perusahaan-perusahaan swasta. Struktur kelompok yang dihasilkan seringkali rumit, informal dan tidak jelas. Konsep kelompok seperti yang digunakan dalam laporan ini mencerminkan kompleksitas ini: ia melampaui hubungan formal induk-anak perusahaan dan memperhitungkan indikator-indikator seperti kontrol keuangan, manajerial dan operasional bersama.

Untuk mengidentifikasi kelompok produsen dan operasi terkaitnya, Greenpeace menghimpun sebuah daftar konsesi dan pabrik yang diketahui dimiliki atau terkait dengan kelompok-kelompok ini, menggunakan berbagai sumber termasuk akta perusahaan, laporan tahunan dan informasi perizinan. Struktur semua kelompok yang dibahas dijelaskan dalam tabel di bawah ini. Banyak dari kelompok-kelompok ini sebelumnya dikarakterisasi dalam laporan Hitung Mundur Terakhir.¹⁰³

Tabel 12: Karakteristik kunci dari kelompok produsen minyak sawit yang dibahas dalam laporan ini

Kelompok Kantor Pusat/ Terdaftar di bursa	Dijelaskan dalam 'Hitung Mundur Terakhir'	Anggota RSPO/ HGSA/ POIG¹⁰⁴	Deskripsi tipe kelompok
Agro Inti Semesta Indonesia/none	Tidak	RSPO	PT Agro Inti Semesta tampak menyatakan seluruh perusahaan terkaitnya kepada RSPO. ¹⁰⁵
Astra Agro Lestari Jakarta/IDX	Tidak	Tak satupun	PT Astra Agro Lestari adalah kelompok usaha berbadan hukum yang terdaftar di bursa dengan struktur kepemilikan induk-anak perusahaan formal. ¹⁰⁶
Austindo Nusantara Jaya (ANJ) Jakarta/IDX	Ya	RSPO	PT Austindo Nusantara Jaya adalah kelompok usaha berbadan hukum yang terdaftar di bursa, meskipun mayoritas dimiliki oleh keluarga Tahija, termasuk Komisaris George Santosa Tahija dan Sjakon George Tahija. ¹⁰⁷ ANJ memiliki struktur kepemilikan induk-anak perusahaan secara formal. ¹⁰⁸
Bakrie Jakarta/IDX	Tidak	RSPO (anak perusahaan PT Bakrie Sumatera Plantations)	Bakrie adalah konglomerat berbadan hukum dengan berbagai usaha di sejumlah industri. ¹⁰⁹ Anak perusahaannya PT Bakrie Sumatera Plantations adalah kelompok usaha berbadan hukum yang terdaftar di bursa saham ¹¹⁰ dengan struktur kepemilikan induk-anak perusahaan formal. ¹¹¹
Best Agro Plantation Jakarta/none	Tidak	Kemungkinan RSPO (anak perusahaan PT Batara Elok Semesta Terpadu) ¹¹²	Best Agro Plantation adalah kelompok usaha swasta yang dimiliki oleh keluarga Tjajadi dari Indonesia; perusahaan ini memiliki konsesi kelapa sawit dan pengilangan minyak kelapa sawit. ¹¹³
Bumitama Singapore/SGX	Ya	RSPO	Bumitama Agri Limited (BAL) adalah kelompok usaha berbadan hukum yang terdaftar di bursa; perusahaan ini adalah usaha patungan antara Harita Group, yang dikendalikan oleh anggota keluarga Lim Hariyanto, dan konglomerat Malaysia IOI Group (lihat di bawah). ¹¹⁴ Meskipun BAL memiliki struktur kepemilikan induk-anak perusahaan formal, dengan perkebunan dan perusahaan penggilingannya di bawah kendali dua anak perusahaan langsungnya Bumitama Gunajaya Agro dan Bumitama Sawit Lestari, ¹¹⁵ Bumitama dan keluarga Lim Hariyanto memiliki sejarah panjang dan rumit dalam menyembunyikan hubungan mereka dengan konsesi yang terlibat dalam deforestasi dengan menjualnya sementara kepada perusahaan yang sengaja didirikan untuk tujuan tersebut oleh rekan dari kelompok tersebut, sebagaimana dirinci dalam laporan Greenpeace Hitung Mundur Terakhir tahun 2018. ¹¹⁶
Citra Borneo Indah Pangkalan Bun, Central Kalimantan/IDX (PT SSMS)	Ya	RSPO (anak perusahaan PT SSMS)	Citra Borneo Indah Group bergerak dalam berbagai industri, mulai dari manufaktur hingga pengiriman. ¹¹⁷ Kelompok usaha ini terdiri dari perusahaan swasta PT Citra Borneo Indah ¹¹⁸ dan anak-anak perusahaannya, termasuk anak perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit utama yang terdaftar di bursa, yaitu Sumbermas Sarana (PT SSMS). ¹¹⁹ PT SSMS tampaknya memiliki struktur kepemilikan induk-anak perusahaan formal. ¹²⁰ Namun, seperti yang dilaporkan dalam laporan Greenpeace Hitung Mundur Terakhir pada tahun 2018, ada bukti kuat bahwa Citra Borneo Indah, atau keluarga Rasyid yang mengendalikannya, tetap memiliki kepentingan dalam perusahaan perkebunan lain, PT Sawit Mandiri Lestari, yang dijualnya pada tahun 2015 pada saat perusahaan tersebut diadakan ke RSPO. ¹²¹
Keluarga Fangiono (First Resources, Fangiono Agro Plantation, Ciliandry Anky Abadi) Singapore/SGX (First Resources), Jakarta/none (Fangiono Agro Plantation, Ciliandry Anky Abadi)	Ya	RSPO (First Resources)	Anggota keluarga Fangiono dari Indonesia mengendalikan sejumlah perusahaan produsen yang tampaknya terpisah, yaitu First Resources (terdaftar di bursa ¹²²), ¹²³ Fangiono Agro Plantation ¹²⁴ dan Ciliandry Anky Abadi. ¹²⁵ Namun, tinjauan terhadap profil registri perusahaan menyoroti sejumlah hubungan antara perusahaan-perusahaan ini, termasuk alamat yang sama dan manajemen yang tumpang tindih. Karena itu, Greenpeace menganggap mereka sebagai satu kelompok. Perusahaan lain dapat dihubungkan ke kelompok usaha ini melalui individu yang dikenal sebagai Sulaidy, pemegang saham pengendali di PT Setia Agrindo Jaya (PT SAJ) ¹²⁶ – perusahaan induk perkebunan patungan dengan First Resources hingga Juni 2018, ketika First Resources membeli saham perusahaan mitranya. ¹²⁷ Profil registri perusahaan mengungkapkan bahwa Sulaidy tetap menjadi pemegang saham pengendali dari beberapa perusahaan perkebunan lain yang tidak memiliki hubungan formal dengan keluarga Fangiono, yang beberapa di antaranya ternyata memiliki hubungan manajemen atau pemegang saham dengan bisnis Fangiono. Pembelian PT SAJ oleh First Resources mungkin telah dirancang untuk mengaburkan kaitan keluarga ini ke perusahaan-perusahaan tersebut. ¹²⁸
Gagah Putera Satria Banjarmasin, South Kalimantan/none	Tidak	Tak satu pun	PT Gagah Putera Satria memiliki beberapa unit bisnis termasuk pertambangan, perkebunan, dan pemrosesan kayu. ¹²⁹ Perusahaan ini tampaknya memiliki struktur kepemilikan induk-anak perusahaan formal namun tak banyak yang diketahui tentang operasi minyak kelapa sawit kelompok usaha ini.

Kelompok Kantor Pusat/ Terdaftar di bursa	Dijelaskan dalam 'Hitung Mundur Terakhir'	Anggota RSPO/ HCSA/ POIG¹⁰⁴	Deskripsi tipe kelompok
Gama Jakarta/none	Ya	RSPO (S&G Biofuel PTE Ltd, sebuah usaha patungan dengan Samsung C&T ¹³⁰)	Hingga akhir tahun 2018, Gama adalah kelompok usaha keluarga informal yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang secara formal terpisah yang dimiliki oleh saudara laki-laki Martua Sitorus dan Ganda bersama dengan anggota-anggota keluarga mereka, termasuk saudara ipar mereka Hendri Saksti dan putra Ganda Darwin dan Andy Indigo. ¹³¹ Sitorus, Ganda, Saksti dan Darwin Indigo yang semuanya terkait erat dengan Wilmar (lihat di bawah). ¹³² Untuk keperluan analisis kami, kelompok usaha ini juga dibawa untuk juga memasukkan S&G Biofuel, perusahaan patungan Gama dengan Samsung C&T. ¹³³ Sejak akhir tahun 2018, Gama Group melakukan restrukturisasi formal. Kelompok usaha ini juga telah mengubah namanya dari Gama menjadi KPN Corp. ¹³⁴
Genting Kuala Lumpur/Bursa Malaysia (Genting Berhad and Genting Plantations Berhad)	Ya	RSPO (Genting Plantations Berhad)	Genting Group memiliki struktur kepemilikan induk-anak perusahaan formal ¹³⁵ dengan berbagai perusahaan perkebunan yang utamanya dipegang oleh anak perusahaan Genting Plantations Berhad, meskipun satu adalah anak perusahaan tidak langsung dari perusahaan induk kelompok usaha tersebut Genting Berhad. ¹³⁶ Selain itu, Greenpeace telah menemukan bukti bahwa Genting mungkin masih terkait dengan perusahaan perkebunan yang dijualnya pada tahun 2017 dan yang sejak itu terlibat dalam deforestasi. ¹³⁷ Genting Berhad dan Genting Plantations Berhad terdaftar di bursa, demikian juga anak perusahaan Genting Malaysia dan Genting Singapore. ¹³⁸ Genting Berhad dan Genting Plantations Berhad memiliki kepala eksekutif yang sama, yaitu Tan Sri Lim Kok Thay. ¹³⁹
IOI Putrajaya, Malaysia/ Bursa Malaysia	Ya	RSPO, HSCA	IOI Group (terdaftar di Bursa Malaysia sebagai IOI Corporation Berhad) memiliki struktur kepemilikan induk-anak perusahaan formal. ¹⁴⁰ IOI adalah pemilik sebagian Bumitama (lihat di atas). ¹⁴¹
Jaya Agra Wattie Jakarta/IDX	Tidak	Tak satu pun	PT Jaya Agra Wattie terlibat dalam budidaya, pengolahan, dan pemasaran karet dan kelapa sawit. Perusahaan ini adalah kelompok usaha berbadan hukum dan terdaftar di bursa dan tampaknya memiliki struktur kepemilikan induk-anak perusahaan formal. ¹⁴²
Kuala Lumpur Kepong (KLK) Ipoh, Perak, Malaysia/ Bursa Malaysia	Tidak	RSPO, Dewan pengganti RSPO, HCSA	KLK adalah kelompok usaha berbadan hukum yang terdaftar di bursa yang bergerak di industri kimia dan pengembangan properti serta bisnis intinya dari perkebunan (terutama kelapa sawit). ¹⁴³ Perusahaan ini memiliki struktur kepemilikan induk-anak perusahaan formal. ¹⁴⁴
Korindo Jakarta/none	Ya	Tak satu pun	Korindo adalah perusahaan swasta yang dikendalikan oleh keluarga Seung dari Korea Selatan. ¹⁴⁵ Perusahaan ini menerbitkan sedikit sekali informasi keuangan atau kepemilikan. ¹⁴⁶
Matahari Kahuripan Indonesia (Makin) Jakarta/none	Tidak	Tak satu pun	PT Matahari Kahuripan Indonesia (Makin Group) adalah kelompok usaha swasta. Perusahaan ini menerbitkan sedikit sekali informasi keuangan atau kepemilikan. ¹⁴⁷
Musim Mas Singapore/none	Tidak	RSPO, Dewan RSPO, HCSA, POIG	Musim Mas Holdings Pte Ltd adalah kelompok usaha swasta dengan bisnis di setiap tahap rantai pasok minyak kelapa sawit, dari perkebunan dan penggilingan melalui pengilangan hingga pengiriman, pemasaran dan pembuatan produk bernilai tambah dan barang-barang konsumen. ¹⁴⁸ Perusahaan ini mencantumkan sejumlah perkebunan dan anak perusahaan lainnya di situs web RSPO. ¹⁴⁹
NPC Resources Sandakan, Sabah/ Bursa Malaysia	Ya	Tak satu pun	NPS Resources Berhad adalah perusahaan induk investasi yang terdaftar di bursa dengan anak perusahaan yang bergerak dalam produksi minyak kelapa sawit dan sektor lainnya. ¹⁵⁰ Struktur kelompok usaha NPC Resources tidak jelas – perusahaan memiliki (atau pernah memiliki pada akhir tahun 2015) sebuah struktur kepemilikan induk-anak perusahaan formal untuk paling tidak sebagian dari operasinya. ¹⁵¹
Pasifik Agro Sentosa Jakarta/none	Tidak	RSPO (anak perusahaan PT Barumon Agro Sentosa)	Pasifik Agro Sentosa adalah perusahaan swasta yang berfokus pada minyak kelapa sawit dan gula. ¹⁵² Perusahaan ini adalah bagian dari Artha Graha Network, sebuah kelompok perusahaan swasta yang berbisnis antara lain di bidang properti, keuangan, agribisnis, dan perhotelan. ¹⁵³
Perkebunan Nusantara Indonesia/none (state companies)	Tidak	RSPO (PT PN III, IV, V and VI)	PT Perkebunan Nusantara adalah nama yang digunakan untuk masing-masing dari 14 perusahaan milik negara yang beroperasi di sektor perkebunan (kelapa sawit dan komoditas lainnya) di seluruh Indonesia. ¹⁵⁴

Kelompok Kantor Pusat/ Terdaftar di bursa	Dijelaskan dalam 'Hitung Mundur Terakhir'	Anggota RSPO/ HCSA/ POIG ¹⁰⁴	Deskripsi tipe kelompok
Rachmat (Amara, Dharma Satya Nusantara, Triputra Agro Persada (including Union Sampoerna Triputra Persada)) Jakarta/none (Amara, TAP), Indonesia/IDX (PT DSN)	Tidak	RSPO (TAP/PT DSN)	<p>Grup Rachmat adalah sebutan informal untuk kerajaan bisnis taipan Indonesia Teddy Rachmat dan keluarganya. Kelompok usaha ini termasuk perusahaan swasta¹⁵⁵ Triputra Group, dengan usaha di bidang agribisnis, manufaktur, dan pertambangan.¹⁵⁶ Anak perusahaan Triputra Group, yaitu Triputra Agro Persada (TAP)¹⁵⁷ bergerak dalam produksi minyak kelapa sawit dan karet dan mencantumkan tiga anak perusahaan di situs web RSPO.¹⁵⁸ Perusahaan sawit PT Agro Maju Raya (Amara) – yang sebelumnya dilaporkan secara terpisah oleh Greenpeace Asia Tenggara¹⁵⁹ – menurut laporan juga merupakan anak perusahaan dari Triputra Group,¹⁶⁰ meskipun juga dikaitkan dengan PT Dharma Satya Nusantara (PT DSN, lihat di bawah).¹⁶¹</p> <p>Bisnis lain yang terkait dengan keluarga tersebut melalui kepemilikan dan/atau manajemen dan keterlibatan dalam produksi dan pemrosesan minyak kelapa sawit mencakup PT Union Sampoerna Triputra Persada (usaha patungan antara Triputra dan PT Union Sampoerna)¹⁶² dan PT DSN (didirikan sebagai perusahaan patungan dengan almarhum Winarto Oetomo¹⁶³). PT DSN adalah kelompok usaha yang dibentuk secara formal dan terdaftar di bursa dengan struktur kepemilikan induk-anak perusahaan formal,¹⁶⁴ perusahaan tersebut mencantumkan sejumlah anak perusahaannya di situs web RSPO.¹⁶⁵</p>
Rajawali/Eagle High Jakarta/IDX (Eagle High), note 37% stake through FELDA	Tidak	RSPO (Eagle High)	<p>PT Eagle High Plantations, anak perusahaan konglomerasi Indonesia Rajawali Corpora,¹⁶⁶ adalah kelompok usaha berbadan hukum dan terdaftar di bursa dengan struktur kepemilikan induk-anak perusahaan formal.¹⁶⁷ Satu saham di Eagle High diperoleh dalam keadaan kontroversial pada tahun 2015 oleh badan pemerintah Malaysia Federal Land Development Authority (FELDA),¹⁶⁸ yang juga memiliki sebagian perusahaan minyak kelapa sawit kontroversial Felda Global Ventures, yang dilaporkan dalam laporan Greenpeace tahun 2018 Hitung Mundur Terakhir.¹⁶⁹</p>
Salim (First Pacific, IndoAgri, Indofood and IndoGunta) Hong Kong/SEHK (holding company First Pacific), Singapore/SGX (IndoAgri), Jakarta/IDX (Indofood), Jakarta/none (IndoGunta)	Ya	Tak satu pun ¹⁷⁰	<p>Salim Group memiliki struktur informal yang kompleks, dengan segmen-segmen formal bersama berbagai segmen informal yang terkoneksi lewat kaitan operasional, manajerial, dan mungkin finansial kelompok.¹⁷¹</p>
Sime Darby Petaling Jaya, Malaysia/ Bursa Malaysia	Tidak	RSPO, HCSA	<p>Sime Darby Plantation Berhad adalah sebuah perusahaan berbadan hukum dan terdaftar di bursa dengan struktur kepemilikan induk-anak perusahaan formal.¹⁷² Perusahaan ini berfokus pada produksi, pemrosesan, pemurnian, dan pemasaran minyak kelapa sawit dan turunannya, dan dibentuk lewat pemisahan unit usaha (demerger) dari konglomerasi Malaysia Sime Darby Berhad.¹⁷³</p>

Kelompok Kantor Pusat/ Terdaftar di bursa	Dijelaskan dalam 'Hitung Mundur Terakhir'	Anggota RSPO/ HCSEA/ POIG¹⁰⁴	Deskripsi tipe kelompok
Sinar Mas/Golden Agri-Resources Jakarta/none (Sinar Mas), Singapore/SGX (GAR), Jakarta/IDX (PT SMART)	Tidak	RSPO (GAR), Dewan RSPO, HCSEA	<p>Golden Agri-Resources Ltd adalah cabang agribisnis dari grup Sinar Mas, cxxiv sebuah kelompok usaha swasta dengan struktur longgar yang dikendalikan oleh keturunan sang pendiri, Eka Tjipta Widjaja, yang meninggal bulan Januari 2019.¹⁷⁵</p> <p>GAR adalah perusahaan berbadan hukum dan terdaftar di bursa (walaupun mayoritas dimiliki oleh keluarga Widjaja)¹⁷⁶ dengan struktur kepemilikan induk-anak perusahaan formal.¹⁷⁷ Anak perusahaannya PT SMART sendiri juga terdaftar di bursa.¹⁷⁸</p> <p>Sebuah pengaduan telah diajukan ke RSPO oleh Forest Peoples Programme yang menuding bahwa tanah di Kalimantan Barat sedang dibuka oleh 'perusahaan bayangan' milik GAR,¹⁷⁹ yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mungkin tidak mengungkapkan seluruh operasi terkaitnya.</p>
SIPEF Schoten, Belgium/ Euronext Brussels	Tidak	RSPO, Dewan pengganti RSPO	<p>SIPEF adalah perusahaan berbadan hukum, terdaftar di bursa dan tampaknya memiliki struktur kepemilikan induk-anak perusahaan formal.¹⁸⁰ Perusahaan ini terutama bergerak dalam penanaman kelapa sawit namun juga menanam karet, teh dan pisang, dengan perkebunannya tersebar di Indonesia, Papua Nugini dan Pantai Gading.¹⁸¹</p>
Sungai Budi/Tunas Baru Lampung Jakarta/IDX (Tunas Baru Lampung)	Ya	RSPO (Tunas Baru Lampung)	<p>Sungai Budi/Tunas Baru Lampung adalah kelompok usaha milik keluarga, yang dikendalikan oleh keluarga Widarto Oey. cxxvii Konsesi yang diketahui tampaknya memiliki struktur kepemilikan formal.¹⁸³</p>
Tianjin Julong Tianjin, China/none	Tidak	Tak satu pun	<p>Tianjin Julong adalah kelompok usaha swasta¹⁸⁴ dengan struktur formal yang informasi mengenai amat minim.¹⁸⁵ Operasi kelapa sawitnya di Indonesia dijalankan oleh anak perusahaan Julong Indonesia.¹⁸⁶</p>
TSH Resources Kuala Lumpur/Bursa Malaysia	Tidak	RSPO	<p>TSH Resources Berhad adalah perusahaan berbadan hukum dan terdaftar di bursa yang tampaknya memiliki struktur kepemilikan induk-anak perusahaan formal.¹⁸⁷</p>
Wilmar Singapore/SGX	Ya	RSPO, RSPO board, HCSEA	<p>Wilmar International adalah kelompok usaha berbadan hukum dan terdaftar di bursa dan tampaknya memiliki struktur kepemilikan induk-anak perusahaan formal,¹⁸⁸ meskipun situs web dan laporan tahunannya tidak memberikan daftar anak perusahaan perkebunannya. Selain itu, sampai saat ini kelompok usaha ini memiliki sejarah bermasalah tentang pengaburan kaitannya dengan konsesi yang terkait dengan pelanggaran lingkungan atau hak asasi manusia dengan menjualnya ke Gama (lihat di atas), kelompok usaha ini dipimpin oleh sang pendiri bersama Martua Sitorus, seperti diungkap Greenpeace di tahun 2018 lewat laporan Pedagang Jahat.¹⁸⁹ Masih harus dilihat apakah Wilmar akan membawa transparansi baru ke operasinya di masa depan.</p>

LAMPIRAN 3: YANG DIKELUARKAN DARI RANTAI PASOK

Cargill

Pelacak keluhan Cargill¹⁹⁰ menunjukkan bahwa perusahaan tersebut menghentikan sementara perdagangannya dengan Ciliandry Anky Abadi pada bulan Februari 2018 akibat kerja Greenpeace (yang mengidentifikasi kelompok usaha keluarga Fangiono). Namun, tampaknya perusahaan ini tidak menghentikan perdagangan dengan First Resources atau Fangiono Agro Plantation, yang juga terkait dengan kelompok usaha keluarga Fangiono, dan daftar pabrik terbarunya¹⁹¹ menunjukkan kaitan rantai pasok ke First Resources. Pelacak keluhan juga menyatakan bahwa Gama tidak lagi berada dalam rantai pasok Cargill karena penangguhan perdagangan oleh Wilmar dengan semua perusahaan yang terkait dengan keluarga Ganda dan Martua pada bulan Juni 2018, namun daftar pabrik Cargill menunjukkan kaitan rantai pasok ke PT Gandaerah Hendana – sebuah perusahaan perkebunan yang dimiliki oleh S&G Biofuel, perusahaan patungan antara Gama dengan Samsung C&T¹⁹² – dan daftar keluhan Wilmar menunjukkan bahwa mereka melanjutkan kembali hubungan dagang dengan Gama pada bulan Maret 2019.¹⁹³ Terakhir, pelacak keluhan Cargill menyatakan bahwa pada bulan Mei 2018, Indofood/Salim tidak lagi berada dalam rantai pasoknya; namun, daftar pabrik Cargill terbaru (untuk Q1 2019, yang dengan demikian seharusnya mencerminkan pengeluaran perusahaan-perusahaan ini dari rantai pasok) mengungkapkan pembelian dari pabrik ‘Gunta Samba’, yang merupakan bagian dari Salim Group namun tampaknya tidak digolongkan sebagai itu oleh Cargill.

Klaim dalam pelacak keluhan bahwa PT Surya Panen Subur dan PT Tunas Baru Lampung tidak lagi berada dalam rantai pasok Cargill didukung oleh daftar pabrik terbarunya.

Dalam memberikan kesempatan kepada Cargill untuk mengomentari temuan-temuan laporan ini, Greenpeace meminta agar setiap perubahan pada temuan rantai pasoknya dikonfirmasi dengan mencantumkan pabrik/konsesi yang telah dikeluarkan. Mengingat kegagalan perusahaan untuk menyediakan daftar pabrik yang telah diperbarui, Greenpeace tidak dapat mengkonfirmasi pengeluaran kelompok-kelompok produsen tertentu dari rantai pasok. Oleh karena itu, pada Tabel 1, berdasarkan informasi yang tersedia untuk umum pada tanggal 1 Oktober 2019, Greenpeace telah mencantumkan Cargill sebagai yang terpapar ke Fangiono, Gama, dan Salim melalui rantai pasoknya.

Musim Mas

Pelacak keluhan Musim Mas¹⁹⁴ menyatakan bahwa telah ada 'penghentian sementara' dalam hubungan bisnisnya dengan IndoAgri/ Indofood/Salim (pembelian terakhir adalah bulan Agustus 2018). Perusahaan ini juga menyatakan bahwa Sungai Budi/Tunas Baru Lampung tidak lagi berada dalam rantai pasoknya (pembelian terakhir adalah bulan Juli 2018), dan bahwa mereka tidak memiliki 'hubungan bisnis aktif' dengan Gama sejak bulan April 2017.

Greenpeace memperhatikan bahwa daftar pabrik terbaru Musim Mas¹⁹⁵ menunjukkan kaitan rantai pasok ke PT Gandaerah Hendana, sebuah perusahaan perkebunan yang dimiliki oleh S&G Biofuel, yang merupakan perusahaan patungan antara Gama dan Samsung C&T.¹⁹⁶

Dalam memberikan kesempatan kepada Musim Mas untuk mengomentari temuan-temuan laporan ini, Greenpeace meminta agar setiap perubahan pada temuan rantai pasoknya dikonfirmasi dengan mencantumkan pabrik/konsesi yang telah dikeluarkan. Mengingat kegagalan perusahaan untuk menyediakan daftar pabrik yang telah diperbarui, Greenpeace tidak dapat mengkonfirmasi pengeluaran pabrik-pabrik yang tidak dikaitkan dengan benar dengan kelompok-kelompok produsen dalam daftar pabrik terbaru yang tersedia. Oleh karena itu, pada Tabel 1, berdasarkan informasi yang tersedia untuk umum pada tanggal 1 Oktober 2019, Greenpeace telah mencantumkan Musim Mas sebagai yang terpapar ke Gama dalam rantai pasoknya.

Sinar Mas/Golden Agri-Resources

Diberi kesempatan untuk memberi tanggapan atas kajian Greenpeace saat ini tentang rantai pasoknya, Golden Agri-Resources tidak menawarkan informasi apa pun yang dapat menambah pemahaman Greenpeace.

Wilmar

Diberi kesempatan untuk memberi tanggapan atas kajian Greenpeace saat ini tentang rantai pasoknya, Wilmar menyatakan bahwa PT Arjuna Sawit Utama [sic - perusahaan tersebut adalah PT Arjuna Utama Sawit] tidak lagi menjadi bagian dari rantai pasoknya,¹⁹⁷ meskipun PT AUS tidak muncul di daftar keluhan publik milik Wilmar.¹⁹⁸ Wilmar menyatakan tidak dapat mengkonfirmasi apakah kepentingan keluarga Rachmat berada dalam rantai pasoknya karena tidak jelas entitas mana yang merupakan kelompok usaha.

Mondelēz

Diberi kesempatan untuk memberi tanggapan atas kajian Greenpeace saat ini tentang rantai pasoknya, Mondelēz menyatakan bahwa delapan kelompok telah ditangguhkan, namun tidak menunjukkan kelompok yang mana.¹⁹⁹ Perusahaan ini menyatakan bahwa daftar pabriknya tidak berisi pabrik yang namanya diasosiasikan oleh pemasoknya dengan 12 kelompok usaha lainnya yang dikaitkan oleh Greenpeace. Greenpeace memperhatikan bahwa daftar pabrik publik perusahaan²⁰⁰ tidak mencantumkan nama kelompok usaha sebagai salah satu butir informasi.

Nestlé

Nestlé tidak memiliki pelacak keluhan, namun situs webnya memuat beberapa informasi tentang kelompok-kelompok usaha yang dikeluarkan dari rantai pasoknya.²⁰¹ Diberi kesempatan untuk memberi tanggapan atas kajian Greenpeace saat ini tentang rantai pasoknya, Nestlé menyatakan bahwa sejak pemetaan rantai pasok pada bulan April 2018, 'beberapa pabrik telah ditangguhkan atau dihapus. Ini termasuk sepuluh perusahaan rantai pasok hulu yang dipublikasikan di situs web kami, seperti Korindo Group dan Salim. Hal ini menggarisbawahi komitmen kami untuk mewujudkan rantai pasok bebas deforestasi.'²⁰²

Meskipun demikian, daftar pabrik terbaru Nestlé yang tersedia untuk umum²⁰³ menunjukkan kaitan rantai pasok ke PT Mitra Indo Cemerlang tanpa mengaitkan perusahaan ini dengan Korindo secara benar. Daftar pabrik Nestlé juga menunjukkan pabrik Salim Ivomas Pratama tidak dikaitkan dengan Salim Group.

Dalam memberikan Nestlé kesempatan untuk memberi tanggapan atas temuan-temuan laporan ini, Greenpeace meminta agar setiap perubahan pada temuan rantai pasoknya dikonfirmasi dengan mencantumkan pabrik/konsesi yang telah dikeluarkan. Mengingat kegagalan perusahaan untuk menyediakan daftar pabrik yang telah diperbarui, Greenpeace tidak dapat mengkonfirmasi pengeluaran pabrik-pabrik yang tidak dikaitkan dengan benar dengan kelompok-kelompok produsen dalam daftar pabrik terbaru yang tersedia. Oleh karena itu, pada Tabel 1, berdasarkan informasi yang tersedia untuk umum pada tanggal 1 Oktober 2019, Greenpeace telah mencantumkan Nestlé sebagai yang terpapar ke Korindo dan Salim melalui rantai pasoknya.

Procter & Gamble (P&G)

Diberi kesempatan untuk memberi tanggapan atas kajian Greenpeace saat ini tentang rantai pasoknya, P&G menyatakan bahwa sejak publikasi daftar pabrik yang digunakan untuk analisis Greenpeace (data untuk tahun 2017),²⁰⁴ tiga kelompok produsen telah dikeluarkan dari rantai pasoknya akibat ketidakpatuhan, dan menyatakan bahwa ini akan tercermin dalam daftar pabrik terbaru yang akan diterbitkan pada bulan November 2019. Tiga kelompok produsen yang dikeluarkan ini adalah Austindo Nusantara Jaya, Gama dan Salim Group.²⁰⁵ Informasi ini tidak ditempatkan di domain publik.²⁰⁶

Daftar pabrik P&G untuk umum²⁰⁷ menunjukkan kaitan rantai pasok ke PT Gandaerah Hendana – perusahaan perkebunan yang dimiliki oleh S&G Biofuel, yang merupakan perusahaan patungan antara Gama dengan Samsung C&T²⁰⁸ – dan menghubungkan perusahaan ini dengan Samsung. Daftar pabrik P&G untuk tahun kalender 2018, yang tidak ditempatkan di domain publik namun dibagikan kepada Greenpeace AS,²⁰⁹ menunjukkan paparan terus-menerus ke Gama melalui PT Gandaerah Hendana; daftar tersebut juga menunjukkan pasokan berkelanjutan dari London Sumatra, yang merupakan bagian dari divisi IndoAgri milik Salim, meskipun kepemilikan ini tidak ditunjukkan dalam pengungkapan.

Dalam memberikan P&G kesempatan untuk memberi tanggapan atas temuan-temuan laporan ini, Greenpeace meminta agar setiap perubahan pada temuan rantai pasoknya dikonfirmasi dengan mendaftarkan pabrik/konsesi yang telah dikeluarkan. P&G menyatakan dalam jawabannya bahwa 'PT Gandaerah Hendana adalah pemasok Wilmar dan berada di bawah Samsung Group dan tidak di bawah GAMA'; P&G juga menyatakan bahwa 'London Sumatra berada di rantai pasok Musim Mas tetapi dihapus pada Juni 2018 dan dikeluarkan dari semua rantai pasok mereka.'²¹⁰

Dalam hal ini, P&G tidak mengeluarkan pabrik yang terkait dengan Gama (dan mengingat berlanjutnya hubungan dagang Wilmar dengan perusahaan ini,²¹¹ paparannya cenderung akan meningkat). Mengenai Salim, meskipun P&G gagal memberikan daftar pabrik yang telah diperbarui dan ketergantungannya yang nyata pada pemasoknya untuk mengidentifikasi kelompok produsen minyak kelapa sawit, Greenpeace menerima bahwa London Sumatra, yang tampaknya menjadi sumber utama paparan ke Salim dan muncul dalam pengungkapan P&G, telah dikeluarkan dari rantai pasoknya.

Oleh karena itu, dalam Tabel 1, berdasarkan informasi yang tersedia untuk umum pada tanggal 1 Oktober 2019, Greenpeace telah mencantumkan P&G sebagai yang terpapar ke Gama dalam rantai pasoknya, namun mengindikasikan bahwa Salim mungkin telah dihapus.

Pelacak keluhan Unilever²¹² menyatakan bahwa semua pemasok telah mengadopsi posisi tidak-membeli untuk Austindo Nusantara Jaya dan bahwa Unilever 'tidak memiliki hubungan bisnis langsung' dengan Indofood/Salim. Mereka juga menyatakan bahwa Korindo tidak lagi ada dalam rantai pasoknya pada bulan Juni 2018.

Selanjutnya, menanggapi kesempatan yang diberikan Greenpeace untuk mengomentari temuan-temuan laporan ini, Unilever menyatakan 'kami telah menanggihkan pengambilan pasokan dari enam pemasok tidak langsung yang diidentifikasi dalam tabel Greenpeace. Mereka adalah: Austindo Nusantara Jaya (ANJ); Best Agri Plantation; Citra Borneo Indah (SSMS); Jaya Agra Wattie; Salim Group [...]; Sungai Budi/Tunas Baru Lampung. Keenam kelompok usaha yang ditanggihkan ini tidak lagi ada dalam rantai pasok kami dan tidak akan muncul dalam pembaruan daftar pabrik kami berikutnya.'²¹³

Namun, daftar pabrik terbaru Unilever²¹⁴ menunjukkan kaitan rantai pasok ke beberapa pabrik yang dikaitkan dengan Sarana Sumber Mas Sarana, yang berkaitan dengan Citra Borneo Indah (meskipun Unilever mengklaim telah mengeluarkan kelompok tersebut sejak 2017²¹⁵); ke PT Kintap Jaya Wattindo, yang berkaitan dengan Jaya Agra Wattie namun tidak disebutkan terkait; dengan PT Mitra Indo Cemerlang dan Dimex Selaras, yang merupakan bagian dari Korindo namun tidak disebutkan terkait; dan ke pabrik-pabrik milik Salim Ivomas Pratama yang tidak dikaitkan dengan Salim Group.

Dalam memberikan kesempatan kepada Unilever untuk mengomentari temuan-temuan laporan ini, Greenpeace meminta agar setiap perubahan pada temuan rantai pasoknya dikonfirmasi dengan mendaftarkan pabrik/konsesi yang telah dikeluarkan. Mengingat kegagalan perusahaan untuk menyediakan daftar pabrik yang telah diperbarui, Greenpeace tidak dapat mengkonfirmasi pengeluaran pabrik yang tidak dikaitkan dengan benar dengan kelompok produsen dalam daftar pabrik terbaru yang tersedia. Oleh karena itu, dalam Tabel 1, berdasarkan informasi yang tersedia untuk umum pada tanggal 1 Oktober 2019, Greenpeace telah mencantumkan Unilever sebagai yang terpapar ke Citra Borneo Indah, Jaya Agra Wattie, Korindo dan Salim melalui rantai pasoknya.

LAMPIRAN 4: RESPONS KELOMPOK PRODUSEN ATAS ANALISIS GREENPEACE TERHADAP TITIK API DAN DATA BEKAS KEBAKARAN PEMERINTAH

Agro Inti Semesta

Kelompok usaha ini tidak merespons pemberian kesempatan dari Greenpeace untuk mengomentari bukti-bukti yang disajikan dalam laporan ini.

Astra Agro Lestari

Menanggapi pemberian kesempatan dari Greenpeace untuk mengomentari bukti-bukti yang disajikan dalam laporan ini, Astra Agro Lestari menanggapinya secara umum, menggiring perhatian Greenpeace pada upayanya untuk mencegah dan memberantas kebakaran namun tidak menawarkan bukti-bukti untuk menentang temuan Greenpeace dalam laporan ini mengenai kaitan mereka dengan kebakaran.²¹⁶

Austindo Nusantara Jaya (ANJ)

Kelompok usaha ini tidak merespons pemberian kesempatan dari Greenpeace untuk mengomentari bukti-bukti yang disajikan dalam laporan ini.

Bakrie

Menanggapi pemberian kesempatan dari Greenpeace untuk mengomentari bukti-bukti yang disajikan dalam laporan ini, dalam tanggapan tertulisnya Bakrie menyangkal mengetahui tentang kebakaran di sekitar PT Monrad Intan Barakat dan meminta Greenpeace untuk mengklarifikasi sumber data tersebut.²¹⁷ Respons tersebut tidak disertai bukti-bukti yang mengubah analisis Greenpeace.

Best Agro Plantation

Kelompok usaha ini tidak merespons pemberian kesempatan dari Greenpeace untuk mengomentari bukti-bukti yang disajikan dalam laporan ini.

Bumitama

Menanggapi pemberian kesempatan dari Greenpeace untuk mengomentari bukti-bukti yang disajikan dalam laporan ini, Bumitama menyatakan bahwa PT Agro Sejahtera Manunggal saat ini sudah tidak disegel dan bahwa penyelidikan KLHK tidak menemukan pelanggaran yang berkaitan dengan kebakaran yang terjadi dalam konsesi tersebut.

Terkait analisis Greenpeace tentang data bekas kebakaran resmi yang mendapati 3.803 ha bekas kebakaran dalam konsesi Bumitama antara tahun 2015 dan 2018, kelompok usaha tersebut menjawab: 'Selama periode 2015-2018 kami telah mencatat 257 kejadian kebakaran, yang berdampak pada area seluas 1.477 ha.'²¹⁸

Respons kelompok usaha tersebut tidak disertai bukti-bukti yang mengubah analisis Greenpeace.

Citra Borneo Indah

Kelompok usaha ini tidak merespons pemberian kesempatan dari Greenpeace untuk mengomentari bukti-bukti yang disajikan dalam laporan ini.

Keluarga Fangiono (First Resources, Fangiono Agro Plantation, Ciliandry Anky Abadi)

Menanggapi pemberian kesempatan dari Greenpeace untuk mengomentari bukti-bukti yang disajikan dalam laporan ini, First Resources mengulangi klaimnya (sebelumnya pernah diajukan ke Greenpeace akibat publikasi Hitung Mundur Terakhir tahun 2018²¹⁹) bahwa 'First Resources tidak terkait dengan CAA lewat hubungan kepemilikan formal atau informal dan tumpang tindih dalam manajemen atau kontrol operasional.'²²⁰ Mereka tidak memberikan bukti baru untuk pernyataannya ini, namun hanya merujuk Greenpeace ke tanggapannya pada tahun 2018.

First Resources kemudian menyangkal bahwa konsesi PT Limpah Sejahtera telah disegel sepanjang tahun 2019, meskipun mereka mengakui bahwa kebakaran dalam konsesi tersebut telah diselidiki – mungkin karena penulis surat tersebut salah mengartikan implikasi dari istilah 'disegel'. First Resources selanjutnya membantah bahwa perintah paksaan yang dikeluarkan untuk PT Priatama Riau tahun 2016 berkaitan dengan terjadinya kebakaran di lahannya, menyatakan bahwa perintah tersebut sebenarnya berkenaan dengan kurangnya peralatan kebakaran dan pengelolaan limbah di tempat.

First Resources juga berterima kasih kepada Greenpeace karena mengecualikan dari laporan ini, terkait informasi yang diberikan oleh perusahaan, konsesi PT Surya Dumai Agrindo, yang telah dikaitkan dengan First Resources dalam dokumen pengarahannya singkat Greenpeace Asia Tenggara pada September 2019. Terakhir, First Resources menyatakan bahwa 'kami tidak sependapat dengan indikasi yang ditunjukkan dalam laporan tersebut bahwa kami sengaja menggunakan api untuk membersihkan hutan dan lahan gambut'. Namun, laporan saat ini tidak menyatakan bahwa First Resources terlibat dalam penggunaan api secara sengaja.

Respons First Resources tidak disertai bukti-bukti yang mengubah analisis Greenpeace.

Gagah Putera Satria

Kelompok usaha ini tidak merespons pemberian kesempatan dari Greenpeace untuk mengomentari bukti-bukti yang disajikan dalam laporan ini.

Gama

Kelompok usaha ini tidak merespons pemberian kesempatan dari Greenpeace untuk mengomentari bukti-bukti yang disajikan dalam laporan ini.

Genting

Menanggapi dokumen pengarahannya Greenpeace Asia Tenggara bulan September 2019, yang merujuk pada area terbakar seluas sekitar 8.100 ha di seluruh konsesi Genting antara tahun 2015 dan 2018.²²¹ Genting menyatakan bahwa 'Berdasarkan peta bekas kebakaran KLHK tahun 2016–2018 tidak ada kebakaran yang signifikan. Area yang terbakar biasanya berada di luar konsesi. Perbandingan dengan data perusahaan untuk PT [Globalindo Agung Lestari] menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir ada area seluas 6,8 ha terbakar di area milik masyarakat. Dari penyelidikan yang dilakukan, penyebabnya tidak jelas atau tidak diakibatkan oleh pembukaan lahan untuk tanaman pangan.'²²²

Namun, perlu diperhatikan bahwa peta konsesi dan analisis yang diberikan oleh perusahaan kepada wartawan setelah publikasi dokumen pengarahannya bulan September tersebut berbeda dari yang telah dibagikan perusahaan kepada RSPO sebagai bagian dari persyaratan keanggotaannya.²³ Peta PT GAL yang dibagikan kepada wartawan juga berbeda dari peta HGU (Hak Guna Usaha) yang dipegang Kementerian Reforma Agraria/Perencanaan Tata Ruang Indonesia dan dari catatan yang disimpan di tingkat provinsi. Hasil yang diperoleh perusahaan tidak dapat direplikasi menggunakan batas-batas konsesi yang sama dengan yang telah disampaikan Genting ke RSPO.

Pemberian kesempatan dari Greenpeace untuk mengomentari bukti-bukti yang disajikan dalam laporan ini secara eksplisit merujuk respons perusahaan ke Greenpeace Asia Tenggara dan terlihat bahwa respons itu tidak membahas temuan-temuan untuk tahun 2015. Greenpeace meminta agar kelompok usaha tersebut mencantumkan posisinya mengenai temuan-temuan Greenpeace terkait kebakaran di tahun 2015 (tahun yang menyaksikan area kebakaran terbesar di seluruh Indonesia selama periode 2015–2018). Selain itu, Greenpeace mendesak kelompok usaha tersebut untuk menyediakan peta yang memungkinkan dilakukannya verifikasi terhadap klaimnya bahwa pembakaran biasanya terjadi di luar wilayah konsesinya atau di area yang dikelola masyarakat. Di antara dokumen yang disertakan bersama surat Greenpeace kepada Genting adalah sebuah tabel yang merujuk pada penangkapan dua manajer di perkebunan PT Surya Agro Palma milik Genting di Agustus 2019.

Genting menjawab, 'Kami tidak mampu mengomentari keakuratan data Greenpeace namun berdasarkan catatan tim pemantauan kami, luas kebakaran terlalu dilebih-lebihkan. Hal ini sebelumnya telah dijelaskan melalui surat kami kepada Greenpeace pada bulan September 2019. Selanjutnya, kami juga ingin mengklarifikasi bahwa tidak ada manajer anak perusahaan Genting Plantations yang ditangkap, namun sebaliknya, manajer kami telah bekerja sama dan membantu penyelidikan yang sedang dilakukan.'²⁴

Respons kelompok usaha tersebut tidak disertai bukti-bukti yang mengubah analisis Greenpeace.

Menanggapi pemberian kesempatan dari Greenpeace untuk mengomentari bukti-bukti yang disajikan dalam laporan ini, IOI mengakui bahwa konsesi PT Sukses Karya Sawit diselidiki oleh KLHK di bulan September 2019 namun menyatakan bahwa konsesi tersebut tidak disegel.²²⁵ Seperti dalam kasus konsesi PT Limpah Sejahtera milik First Resources (lihat di atas), mungkin penulis surat itu salah mengartikan istilah 'disegel' sebagai menyiratkan penutupan secara permanen.

Respons kelompok usaha tersebut tidak disertai bukti-bukti yang mengubah analisis Greenpeace.

Jaya Agra Wattie

Kelompok usaha ini tidak merespons pemberian kesempatan dari Greenpeace untuk mengomentari bukti-bukti yang disajikan dalam laporan ini.

Kuala Lumpur Kepong (KLK)

Menanggapi pemberian kesempatan dari Greenpeace untuk mengomentari bukti-bukti yang disajikan dalam laporan ini, sehubungan dengan proses pengadilan terhadap perusahaan perkebunan yang dimiliki oleh kelompok usaha tersebut, KLK menyatakan: 'Dalam situasi PT Adei, kami didapati lalai karena tidak dapat mencegah pelaku sebenarnya menyelip ke dalam area plasma untuk menyulut api... Adapun mengenai para direktur, hukuman yang dijatuhkan pada mereka tidak terkait dengan kebakaran. Karena area yang dikembangkan adalah untuk keperluan kebun plasma, orang-orang tersebut telah dijatuhi hukuman dan denda karena beroperasi tanpa Izin Usaha Perkebunan (IUP) meskipun itu adalah proyek bersama masyarakat dan pemilik tanahnya adalah masyarakat itu sendiri.'²²⁶ KLK tidak memberikan tanggapan tentang kasus 2019, menyatakan bahwa 'karena penyelidikan masih berlangsung, kami tidak akan berkomentar apa pun tentang masalah ini'.

Respons kelompok usaha ini tidak disertai bukti-bukti yang mengubah analisis Greenpeace.

Korindo

Sehubungan dengan analisis Greenpeace terhadap data resmi bekas kebakaran yang menemukan 11.461 ha bekas kebakaran di konsesi Korindo, kelompok usaha ini mengakui bahwa memang terjadi kebakaran-kebakaran di konsesinya pada tahun 2015 namun menyatakan kebakaran-kebakaran tersebut diketahui tidak dimulai dengan sengaja: 'Tahun 2015, setelah musim kemarau berulang, terjadi kerusakan akibat kebakaran di seluruh Indonesia. Kebakaran di konsesi Grup Korindo diselidiki oleh pemerintah Indonesia pada bulan Februari dan Agustus 2016, dan didapati bukanlah kebakaran yang disengaja. Itu adalah kebakaran alamiah karena faktor eksternal (exogenous) yang tidak kami mulai dan tidak bisa kami kendalikan.'²²⁷

Korindo juga mempertanyakan angka-angka yang disajikan: 'Kami sungguh tak mengerti bagaimana Anda menyatakan ada 11.461 ha bekas kebakaran. Anda tidak seharusnya mencantumkan kami dalam laporan tersebut kecuali ada bukti lain. Jika ada bukti, silakan berbagi dengan kami.'²²⁸ Respons perusahaan menyatakan bahwa data bekas kebakaran KLHK yang digunakan untuk analisis tersebut menunjukkan bahwa 'Di tahun 2016, 7.000 ha diklaim sebagai bekas kebakaran, sebenarnya itu adalah pembukaan lahan yang terjadi antara tahun 2015 dan 2016.'

Respons Korindo kemudian menyangkal keberadaan bekas kebakaran dalam konsesinya pada tahun 2017 dan 2018 – meskipun Greenpeace tidak menuduh bahwa ada bukti bekas kebakaran untuk tahun-tahun itu – dan menolak kemungkinan bahwa kelompok usaha tersebut menggunakan api dengan sengaja.

Sehubungan dengan analisis bekas kebakaran, Greenpeace memperhatikan bahwa area yang mengalami kebakaran yang signifikan di wilayah tersebut pada paruh kedua tahun 2015 hanya diidentifikasi sebagai bekas kebakaran oleh KLHK pada tahun 2016, kemungkinan dikarenakan tutupan awan tebal sebelumnya. Akibatnya, tanggal pencatatan bekas kebakaran tidak serta merta sama dengan tanggal kejadiannya. Sebagian besar area bekas kebakaran yang diidentifikasi KLHK yang berada dalam konsesi Korindo sesuai dengan data titik api yang mencakup periode dari Januari 2015 hingga Februari 2016 – dan citra satelit menunjukkan tanda-tanda yang konsisten dengan kebakaran yang meluas. Namun, beberapa blok tidak menunjukkan kluster titik api dan bisa dibilang adalah positif palsu, terutama di wilayah timur laut PT Papua Agro Lestari dan wilayah tengah dan barat PT Dongin Prabhawa. Positif palsu (kesalahan klasifikasi) dalam data bekas kebakaran KLHK tahun 2016 dapat mencakup sekitar 1.800 ha di PT Papua Agro Lestari dan 930 ha di PT Dongin Prabhawa (total seluas 2.730 ha), karena blok-blok besar ini tidak menunjukkan titik api di periode 2015–2016, dan klasifikasi pun tidak dapat dikonfirmasi melalui interpretasi citra-citra satelit. Dengan mengandaikan area seluas 2.730 ha ini merupakan positif palsu, Korindo masih tetap menyisakan bekas kebakaran seluas 8.731 ha.

Di dalam area lain dari konsesi Korindo yang diklasifikasikan sebagai bekas kebakaran oleh KLHK, Greenpeace telah mengamati bukti-bukti yang jelas tentang keberadaan kebakaran, baik secara langsung melalui citra satelit maupun melalui keberadaan titik-titik api.

Angka-angka area bekas kebakaran dalam laporan ini semuanya telah dihitung berdasarkan data bekas kebakaran pemerintah. Sementara citra satelit menunjukkan bahwa peta pemerintah mungkin melebih-lebihkan kebakaran di konsesi Korindo, perhitungan Greenpeace belum pernah diubah, karena alasan konsistensi metodologis. Selanjutnya, terlepas dari pernyataan Korindo, bukti tetap menunjukkan bahwa telah terjadi kebakaran yang meluas di dalam konsesi Korindo, dengan indikasi kuat akan penggunaan api secara sengaja.



26 Maret 2013, PT Dongin Prabhawa, 7°20'9.79" S 139°45'30.946" T. Asap membumbung dari deretan panjang puing-puing membara akibat pembukaan hutan di konsesi kelapa sawit PT Dongin Prabhawa milik Korindo di Papua. Deretan semacam itu dan penyebaran api di dalamnya merupakan indikator kuat penggunaan api secara sengaja. Daftar pabrik Nestlé dan Unilever terus menunjukkan paparan ke Korindo. ©Rante/Greenpeace

Matahari Kahuripan Indonesia (Makin)

Kelompok usaha ini tidak merespons pemberian kesempatan dari Greenpeace untuk mengomentari bukti-bukti yang disajikan dalam laporan ini.

Musim Mas

Sehubungan dengan analisis Greenpeace tentang data bekas kebakaran resmi yang menemukan 6.066 ha bekas kebakaran di konsesi Musim Mas antara tahun 2015 dan 2018, kelompok usaha ini menjawab bahwa 'kami ingin memperjelas bahwa angka ini tidak akurat. Catatan kami menunjukkan bahwa untuk periode tahun 2015–2018 ada akumulasi secara kumulatif [sic] sebanyak 1.632,7 ha area terbakar yang tidak disengaja, dan kami telah mempublikasikan angka ini dalam Laporan Keberlanjutan kami.²²⁹ Sebaliknya, kelompok usaha tersebut memberikan angka 92 titik api yang terdeteksi '[d]i seluruh operasi kami' antara bulan Januari dan September 2019, yang secara signifikan lebih tinggi daripada 61 yang dilaporkan Greenpeace, meskipun mereka mengklaim hanya 13 di antaranya yang terbukti merupakan kebakaran sesungguhnya.

Mengenai bukti-bukti dari Greenpeace tentang penyegelan PT Musim Mas, tanggapan kelompok usaha tersebut menerima bahwa ada kebakaran di daerah NKT, namun berpendapat bahwa kebakaran itu mungkin dimulai oleh orang luar dan menyatakan bahwa kelompok usaha tersebut 'langsung melaporkan kasus tersebut ke kepolisian.'

Respons mereka tidak disertai bukti-bukti yang mengubah analisis Greenpeace.

Respons tentang masalah rantai pasok dibahas dalam Lampiran 3.

NPC Resources

Kelompok usaha ini tidak merespons pemberian kesempatan dari Greenpeace untuk mengomentari bukti-bukti yang disajikan dalam laporan ini.

Pasifik Agro Sentosa

Kelompok usaha ini tidak merespons pemberian kesempatan dari Greenpeace untuk mengomentari bukti-bukti yang disajikan dalam laporan ini.

Perkebunan Nusantara

Kelompok usaha ini tidak merespons pemberian kesempatan dari Greenpeace untuk mengomentari bukti-bukti yang disajikan dalam laporan ini.

Rachmat (Amara/Dharma Satya Nusantara/ Triputra Agro Persada [including Union Sampoerna Triputra Persada])

Di luar surel klarifikasi awal dari salah satu divisinya,²³⁰ kelompok usaha tersebut tidak merespons pemberian kesempatan dari Greenpeace untuk mengomentari bukti-bukti yang disajikan dalam laporan ini.

Rajawali/Eagle High

Respons Eagle High terhadap pemberian kesempatan dari Greenpeace untuk mengomentari bukti-bukti yang disajikan dalam laporan ini tidak mengomentari data titik api Greenpeace 'karena kami tidak yakin dengan peta aktual yang digunakan dan metode pengukuran titik api dalam kajian Anda'.²³¹ Sebaliknya, mereka hanya menyatakan bahwa kelompok usaha tersebut memiliki 'Kebijakan Tanpa Pembakaran Lahan' dan moratorium penanaman baru. Respons mereka tidak disertai bukti-bukti yang mengubah analisis Greenpeace.

Salim (IndoAgri, Indofood and IndoGunta)

Respons IndoAgri tidak menjawab data titik api dan bekas kebakaran Greenpeace dengan alasan bahwa 'informasi dan data Anda tidak spesifik dan tidak terperinci'.²³² Namun, respons mereka disertai beberapa dokumen yang berkaitan dengan konsesi kelompok usaha tersebut yang disegel PT Kebun Ganda Prima, yang mengindikasikan bahwa penyelidikan atas konsesi tersebut menemukan bahwa kebakaran terjadi di lahan masyarakat namun tidak menunjukkan bahwa penyelidikan itu sendiri tidak dilangsungkan di dalam area konsesi. Responsnya terhadap sebuah surat tindak lanjut tidak dapat menjawab permasalahan ini.²³³ Respons mereka tidak disertai bukti-bukti yang mengubah analisis Greenpeace.

Sime Darby

Respons Sime Darby Plantations tidak mengomentari atau menentang data bekas kebakaran dan titik api Greenpeace, namun hanya menyatakan bahwa mereka melakukan pemantauan titik api mereka sendiri yang dapat diakses publik untuk menentukan 'jumlah kejadian kebakaran aktual yang terjadi di dalam atau di luar wilayah konsesi global kami dan penyebab kebakaran-kebakaran ini berdasarkan penyelidikan kami', dan menyatakan bahwa 'Kami ... berharap dapat memahami dasar dan bukti yang digunakan Greenpeace untuk menghasilkan data titik api yang akan disajikan dalam laporan mendatang.'²²⁴

Sehubungan dengan analisis Greenpeace tentang penyegelan konsesi dan kaitan kelompok, Sime Darby menjawab: 'Mohon diperhatikan bahwa pada tanggal 25 Juni 2019, PT [Mitra Austral Sejahtera] tidak lagi menjadi anak perusahaan SDP karena kami secara efektif telah menjual saham kami di sana kepada PT Inti Nusa Sejahtera.' Mengenai PT Sime Indo Agro, Sime Darby menyatakan: 'Kami dapat mengkonfirmasi bahwa area yang ditempati oleh masyarakat setempat yang mengalami kebakaran, yang berada di luar wilayah operasional PT SIA, telah disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mencegah aktivitas lebih lanjut sambil menunggu selesainya penyelidikan.'²²⁵ Tidak jelas dari respons perusahaan apakah area yang disegel tersebut berada di dalam atau di luar batas konsesi mereka (bukan merujuk pada area perkebunan yang aktif).

Greenpeace telah mengisyaratkan perubahan kepemilikan PT Mitra Austral Sejahtera menjelang akhir periode yang dianalisis dalam laporan ini. Di luar penjelasan di atas, respons mereka tidak disertai bukti-bukti yang mengubah analisis Greenpeace.

Sinar Mas/Golden Agri-Resources

Menanggapi bukti-bukti akan sanksi terhadap perusahaan perkebunan milik kelompok usaha tersebut, GAR²²⁶ mengakui adanya sanksi administratif terhadap PT Bahana Karya Semesta pada tahun 2015 akibat kebakaran seluas 106 ha. Mereka mengklaim telah menetapkan tim manajemen baru dan menyatakan bahwa reboisasi telah dimulai.

Respons mereka tidak disertai bukti-bukti yang mengubah analisis Greenpeace.

SIPEF

Menanggapi pemberian kesempatan dari Greenpeace untuk mengomentari bukti-bukti yang disajikan dalam laporan ini, SIPEF memberikan dokumen-dokumen (shapefiles) tentang konsesinya dan pembahasan yang transparan tentang masalah-masalah yang tengah mereka tangani.²³⁷

SIPEF menyatakan, sehubungan dengan PT Dendymarker Indah Lestari, bahwa mereka baru mengakuisisi konsesi tersebut bulan Agustus 2017 dan 'karenanya manajemen SIPEF seharusnya tidak dimintai pertanggung jawaban atas kebakaran sebelum waktu itu. Kami sungguh akui bahwa ada laporan-laporan terus-menerus tentang kebakaran di PT Dendy Marker [sic] tahun ini.' Mereka mengklaim bahwa sebagian besar kebakaran disulut oleh penghuni liar akibat konflik yang sedang berlangsung dengan perusahaan.

Balasan sebelumnya dari SIPEF²³⁸ menanggapi laporan Greenpeace Asia Tenggara bulan September 2019 menyatakan bahwa catatannya sendiri menunjukkan bahwa PT Dendymarker Indah Lestari menyaksikan 4.817 ha terbakar pada tahun 2015, sedikit di bawah 5.544 ha yang muncul dari analisis Greenpeace terhadap data pemerintah.

Tak satu pun dari kedua tanggapan mereka ini disertai bukti-bukti yang mengubah analisis Greenpeace.

Sungai Budi/Tunas Baru Lampung

Menanggapi dokumen pengarahan Greenpeace Asia Tenggara bulan September 2019 tentang krisis kebakaran hutan, Sungai Budi mengklaim bahwa lahan yang terdampak kebakaran yang dipetakan Greenpeace sebagai PT Samora Usaha Jaya berdasarkan Surat Pelepasan Kawasan Hutan Tahun 2012 bukan terletak di lokasi perkebunannya. (Sungai Budi tidak memberikan peta konsesi miliknya sendiri atau bukti lain untuk klaimnya).

Sebuah dokumen di situs web perusahaan tersebut di bulan Januari 2019, berkaitan dengan tinjauan pihak ketiga atas pemantauan sebelumnya terhadap konsesi ini oleh Chain Reaction Research (CRR), menyertakan peta ringkasan konsesi ini yang diterbitkan oleh CRR.²³⁹ Peta ini cocok dengan area yang oleh analisis Greenpeace Asia Tenggara terhadap data bekas kebakaran pemerintah diidentifikasi sebagai area yang terdampak kebakaran. Dalam dokumen ini, Sungai Budi tidak memberikan peta alternatif dari konsesi mereka.

Respons mereka tidak disertai bukti-bukti yang mengubah analisis Greenpeace.

Tianjin Julong

Kelompok usaha ini tidak merespons pemberian kesempatan dari Greenpeace untuk mengomentari bukti-bukti yang disajikan dalam laporan ini.

TSH Resources

Kelompok usaha ini tidak merespons pemberian kesempatan dari Greenpeace untuk mengomentari bukti-bukti yang disajikan dalam laporan ini.

Wilmar

Tanggapan Wilmar terhadap temuan Greenpeace mengenai kebakaran di konsesinya merinci upayanya untuk memantau dan menanggapi kebakaran, namun tidak menentang angka-angka titik api dan bekas kebakaran yang diberikan Greenpeace. Meskipun begitu, mereka tetap bersikeras bahwa semua peringatan kebakaran terkait dengan pemasoknya yang telah mereka selidiki sendiri terbukti merupakan peringatan palsu atau kebakaran-kebakaran tersebut tidak dimulai dengan sengaja oleh para pemasoknya.²⁴⁰ Disebutkan bahwa karena sebagian besar kebakaran terjadi di luar batas konsesi kelapa sawit, maka upaya-upaya yang dilakukan perusahaan untuk memantau dan memadamkan kebakaran di dalam konsesinya 'hanya merupakan setetes air di dalam ember masalah-masalah pembangunan yang lebih besar'.

Respons mereka tidak disertai bukti-bukti yang mengubah analisis Greenpeace.

Respons tentang masalah rantai pasok dibahas dalam Lampiran 3.



23 September 2019, Palangkaraya, Kalimantan Tengah ©Sukarno/Greenpeace

REFERENSI

- Accountability Framework website 'Definitions' https://accountability-framework.org/definitions/?definition_category=41 accessed 25 October 2019
- Agence France-Press (2019) 'Indonesian forest fires putting 10 million children at risk' 24 September 2019 France 24 <https://www.france24.com/en/20190924-indonesian-forest-fires-putting-10-million-children-at-risk-un>
- Agustin H (2017) 'Gunakan strict liability, hakim hukum perusahaan ini ratusan miliar' 8 February 2017 HukumOnline.com <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt589a96375f9f4/gunakan-istrict-liability-i--hakim-hukum-perusahaan-ini-ratusan-miliar>
- Aidenvironment (2017) 'Nordic investment in banks financing Indonesian palm oil' <https://www.framtiden.no/aktuelle-rapporter/822-nordic-investments-in-banks-financing-indonesian-palm-oil/file.html>
- ANJ Group website 'Board of Commissioners' <https://anj-group.com/en/board-of-commissioners> accessed 28 October 2019
- ANJ Group website 'Group structure' <https://anj-group.com/en/group-structure> accessed 28 October 2019
- ANJ Group website 'Our profile' <https://anj-group.com/en/our-profile> accessed 28 October 2019
- ANJ Group website 'Ownership structure' <https://anj-group.com/en/ownership-structure> accessed 28 October 2019
- Artha Graha Network website 'About us' <https://arthagraha.net/about-us/> accessed 28 October 2019
- Artha Graha Network website 'PT Pasifik Agro Sentosa' <https://arthagraha.net/project/pt-pasifik-agro-sentosa/> accessed 28 October 2019
- Asian Agri (2019) 'Sustainability report 2017-2018' <https://www.asianagri.com/images/pdf/2019/Asian%20Agri%20Sustainability%20Report%202017-2018.pdf>
- Astra Agro Lestari (2019) Letter to Greenpeace International, 1 November 2019
- Bahrie S (2018) 'Kasasi JPU kajari muarajambi dikabulkan - Pimpinan PT RKK divonis 1,5 tahun dan denda Rp 2 M' 7 May 2018 Tribun Jambi <http://jambitribunnews.com/2018/05/07/kasasi-jpu-kajari-muarajambi-dikabulkan-pimpinan-pt-rkk-divonis-15-tahun-dan-denda-rp-2-m>
- Bakrie & Brothers website 'Investments' https://www.bakrie-brothers.com/#/our_business/investments accessed 28 October 2019
- Bakrie & Brothers website 'Our company' <https://www.bakrie-brothers.com/#/home> accessed 28 October 2019
- Bakrie Sumatera Plantations website 'Business group structure' <https://www.bakriesumatera.com/index.php/en/corporate-information/corporate-structure/business-group-structure> accessed 28 October 2019
- Bakrie Sumatera Plantations website 'Products' <https://www.bakriesumatera.com/index.php/en/> accessed 28 October 2019
- BBC News (2019) 'Kebakaran hutan: Dari denda belasan triliun rupiah, pemerintah klaim baru terima Rp400 miliar dari perusahaan pembakar lahan' 16 September 2019 <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49716140>
- Beritajambi.co (2019) 'Dalam sidang perkara pidana korporasi Karhutla, saksi budi sebut PT. Kaswari Unggulkan 2 sanksi' 13 August 2019 <http://beritajambi.co/read/2019/08/27/7118/dalam-sidang-perkara-pidana-korporasi-karhutla-saksi-budi-sebut-pt-kaswari-unggulkan-2-sanksi/>
- Bumitama Agri Ltd (2019a) 'Annual report 2018' <http://ir.bumitama-agri.com/static-files/2e0c8a3e-f0fc-4b78-838f-e043b6543237>
- Bumitama Agri Ltd (2019b) Email to Greenpeace International, 31 October 2019
- CAMS (2019) 'The Copernicus Atmosphere Monitoring Service tracks extent and pollution from fires across Indonesia' 20 September 2019 press release <https://atmosphere.copernicus.eu/copernicus-atmosphere-monitoring-service-tracks-extent-and-pollution-fires-across-indonesia>
- Cargill website 'Managing grievances' <https://www.cargill.com/page/managing-grievances> accessed 31 October 2019
- Cargill (2019a) 'Cargill global mill list - Quarter 1, 2019' <https://www.cargill.com/doc/1432144258479/q1-mill-list-2019.pdf>
- Cargill (2019b) Email to Greenpeace International, 1 November 2019
- Chain Reaction Research (2015) 'Triputra Agro Persada' <https://chainreactionresearch.files.wordpress.com/2015/05/triputra-agro-persada-crr-report.pdf>
- Channel News Asia (2019) 'Malaysian environment minister brushes off calls for resignation amid alleged conflict of interest in handling haze issue' 25 September 2019 <https://www.channelnewsasia.com/news/asia/malaysia-yeo-bee-yin-haze-resign-conflict-of-interest-11940298>
- Cipta H (2019) 'Manajer PT SISU dan PT SAP ditetapkan sebagai tersangka karhutla di Kalbar' 19 September 2019 Kompas.com <https://regional.kompas.com/read/2019/09/19/12173611/manajer-pt-sisu-dan-pt-sap-ditetapkan-sebagai-tersangka-karhutla-di-kalbar>
- ClimateWatch website 'Historical GHG emissions' <https://www.climatewatchdata.org/ghg-emissions?regions=EU28§ors=509> accessed 25 October 2019
- CNN Indonesia (2019) 'KLHK segel 10 lahan konsesi perusahaan terkait karhutla Riau' 16 September 2019 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190916115351-20-430826/klhk-segel-10-lahan-konsesi-perusahaan-terkait-karhutla-riau>
- Consumer Goods Forum (2015) 'Sustainable palm oil sourcing guidelines' <https://www.theconsumergoodsforum.com/wp-content/uploads/2017/10/20150810-Sustainable-Plam-Oil-Sourcing-Guidelines-Final-Version-1.pdf>
- Consumer Goods Forum website 'Towards zero net deforestation' <https://www.theconsumergoodsforum.com/initiatives/environmental-sustainability/key-projects/deforestation/> accessed 25 October 2019
- Deputi Bidang Penginderaan Jauh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional - LAPAN (2016) 'Panduan teknis - V.01: Informasi titik panas (hotspot) kebakaran hutan/ lahan' http://pusfatja.japan.go.id/files_upload_ebook/publikasi/Panduan_hotspot_2016%20versi%20draft%201_LAPAN.pdf
- Diana E (2019) 'Photos: Forest fires rage on Sumatra oil palm concessions' 11 September 2019 Mongabay <https://news.mongabay.com/2019/09/photos-forest-fires-rage-on-sumatra-oil-palm-concessions/>
- Eagle High Plantations (2019a) 'Annual report 2018: Growth' http://www.eaglehighplantations.com/uploads/1/0/8/4/108415631/ehp_ar2018_small-compressed.pdf
- Eagle High Plantations (2019b) Email to Greenpeace Southeast Asia, 31 October 2019
- Earthdata website 'Firms FAQ' <https://earthdata.nasa.gov/faq/firms-faq> accessed 31 October 2019
- First Resources (2018a) 'Changes in shareholding in subsidiaries' 25 June 2018 http://www.first-resources.com/upload/file/20180625/20180625091430_28970.pdf

First Resources (2018b) 'Response to report released by Chain Reaction Research on "Shadow companies present palm oil investor risks and undermine NDPE efforts"' 12 July 2018 http://www.first-resources.com/upload/file/20180712/20180712034900_73317.pdf

First Resources (2018c) 'Response to report "Final Countdown" released by Greenpeace' 26 September 2018 http://www.first-resources.com/upload/file/20191018/20191018064810_97802.pdf

First Resources (2019) Letter to Greenpeace International, 1 November 2019

First Resources website 'Stock information' <http://www.first-resources.com/irInfo.php?pc=stockinfo> accessed 28 October 2019

Forbes (2013) 'Indonesian Teddy Rachmat's long career journey' 3 April 2013 <https://www.forbes.com/sites/forbesasia/2013/04/03/paying-himself-back/#6ff99c931855>

Forest 500 website 'Tianjin Julong Group Co.' <https://forest500.org/rankings/companies/tianjin-julong-group-co> accessed 28 October 2019

Forest Peoples Programme website '5 new complaints filed against Indonesia's largest palm oil company' <https://www.forestpeoples.org/en/node/50274> accessed 28 October 2019

FSC (2015) 'Policy for the association of organizations with FSC' FSC-POL-01-004 V3-0 EN draft 4-1 <https://ic.fsc.org/file-download/fsc-pol-01-004-v3-d4-1-as-reference-for-consultation-procedures.a-546.pdf>

Gama Plantation website 'Home' <http://gamaplantation.com/> accessed 31 October 2019

GAR (2019a) Email to Greenpeace Southeast Asia, 1 November 2019

GAR (2019b) 'GAR statement regarding the Greenpeace report "Burning Down the House" published online on 4 November 2019' <https://goldenagri.com.sg/wp-content/uploads/2019/11/GAR-statement-regarding-the-greenpeace-report-burning-down-the-house.pdf>

GAR website 'Corporate structure' <https://goldenagri.com.sg/about-gar/corporate-structure/> accessed 28 October 2019

GAR website 'Grievance list' <https://goldenagri.com.sg/sustainability-dashboard/grievance-data> accessed 31 October 2019

GAR website 'Ownership structure' <https://goldenagri.com.sg/investors/shareholder-information/ownership-structure/> accessed 28 October 2019

GAR website 'Supply chain map' <https://goldenagri.com.sg/sustainability-dashboard/supply-chain-map> accessed 31 October 2019

Gatra.com (2019) 'KLHK segel 19 perusahaan yang diduga penyebab karhutla' 16 August 2019 <https://www.gatra.com/detail/news/438081/politik/klhk-segel-19-perusahaan-yang-diduga-penyebab-karhutla>

Genting (2019a) Email to Greenpeace Southeast Asia, 23 September 2019

Genting (2019b) Email to Greenpeace International, 1 November 2019

Genting Berhad (2019) 'Annual report 2018' <http://www.genting.com/wp-content/uploads/2019/04/Genting-Berhad-Annual-Report-2018.pdf>

Genting Berhad website 'Directors & management' <http://www.genting.com/director-management/> accessed 28 October 2019

Genting Plantations Berhad (2019) Letter to Greenpeace International, 1 November 2019

Genting Plantations website 'Directors & management' http://www.gentingplantations.com/corporate_profile/director-management/ accessed 28 October 2019

Global Fire Emissions Database, version 4 (GFED4) <http://www.globalfiredata.org/index.html>

Gomez J & Armini N (2019) 'Haze from Indonesian fires now affecting Philippines' 20 September 2019 AP/US News & World Report <https://www.usnews.com/news/world/articles/2019-09-20/haze-from-indonesian-fires-now-affecting-philippines>

Greenpeace (2018a) 'Dying for a cookie: How Mondelez dirty palm oil is feeding the climate and extinction crisis' <https://www.greenpeace.org/international/publication/19274/dying-cookie-mondelez-feeding-climate-extinction-crisis/>

Greenpeace (2018b) 'Final countdown: Now or never to reform the palm oil industry' <https://www.greenpeace.org/finalcountdown>

Greenpeace (2018c) 'Moment of truth: Time for brands to come clean about their links to forest destruction for palm oil' <https://www.greenpeace.org/international/publication/15395/moment-of-truth/>

Greenpeace (2018d) 'Rogue trader: Keeping deforestation in the family' <https://www.greenpeace.org/international/publication/17241/rogue-trader-indonesia-deforestation-wilmar-gama/>

Greenpeace (2019) 'Countdown to extinction: What will it take to get companies to act?' <https://www.greenpeace.org/international/publication/22247/countdown-extinction-report-deforestation-commodities-soya-palm-oil/>

Greenpeace Southeast Asia (2019) 'Indonesian forest fires crisis: Palm oil and pulp companies with largest burned land areas are going unpunished' 24 September 2019 <https://www.greenpeace.org/southeastasia/publication/3106/3106/>

Halim D & Ristiano C (2019) 'BNPB: Luas lahan terbakar capai sekitar 857.000 hektar' 22 October 2019 Kompas.com <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/22/15460191/bnpb-luas-lahan-terbakar-capai-sekitar-857000-hektar?page=all>

Hanafiah J (2018) 'Bakar Rawa Tripa, tiga petinggi PT.SPS masuk penjara' 30 June 2018 Mongabay <https://www.mongabay.co.id/2018/06/30/bakar-rawa-tripa-tiga-petinggi-pt-sps-masuk-penjara/>

Hanafiah J (2019a) 'Akhirnya, PT.SPS II Divonis Bersalah Bakar Rawa Tripa' 23 September 2019 ' <https://www.mongabay.co.id/2019/09/27/akhirnya-pt-sps-ii-divonis-bersalah-bakar-rawa-tripa/>

Hanafiah J (2019b) 'Kasus pembakar Rawa Tripa, PT. Kallista Alam terus melawan' 10 September 2019 Mongabay <https://www.mongabay.co.id/2019/09/10/kasus-pembakar-rawa-tripa-pt-kallista-alam-terus-melawan/>

Haniy SU et al (2019) 'Intense forest fires threaten to derail indonesia's progress in reducing deforestation' 7 October 2019 World Resources Institute <https://www.wri.org/blog/2019/10/intense-forest-fires-threaten-derail-indonesia-s-progress-reducing-deforestation>

HCS Approach website 'The High Carbon Stock Approach' <http://highcarbonstock.org/the-high-carbon-stock-approach/> accessed 31 October 2019

Indofood Agri Resources (2019a) Email to Greenpeace Southeast Asia, 31 October 2019

Indofood Agri Resources (2019b) Letter to Greenpeace International, 4 November 2019

IOI Corporation Berhad (2019) Email to Greenpeace Southeast Asia, 8 November 2019

- IOI Group website 'Group structure' https://www.ioigroup.com/Content/G/G_Structure accessed 28 October 2019
- Jong HN (2017) 'First real test for Jokowi on haze as annual fires return to Indonesia' 8 August 2017 Mongabay <https://news.mongabay.com/2017/08/indonesian-president-jokowis-first-real-test-begins-as-annual-fires-return/>
- Jong HN (2019a) '81% of Indonesia's oil palm plantations flouting regulations, audit finds' 25 August 2019 Mongabay <https://news.mongabay.com/2019/08/81-of-indonesias-oil-palm-plantations-flouting-regulations-audit-finds/>
- Jong HN (2019b) 'Audit BPK temukan banyak perkebunan sawit besar bermasalah' 27 August 2019 Mongabay <https://www.mongabay.co.id/2019/08/27/audit-bpk-temukan-banyak-perkebunan-sawit-besar-bermasalah/>
- Jong HN (2019c) 'Indonesian court fines palm oil firm \$18.5m over forest fires in 2015' 28 October 2019 Mongabay <https://news.mongabay.com/2019/10/palm-oil-indonesia-arjuna-utama-sawit-musim-mas-forest-fires/>
- Jope A (2019) 'Nature's immense power to halt our climate crisis' 23 September 2019 <https://www.linkedin.com/pulse/natures-immense-power-halt-our-climate-crisis-alan-jope/>
- Julong Group website 'Organizational structure' <http://www.julongchina.com/en/zzgj.asp?r=2> accessed 28 October 2019
- Julong Group website 'Our history' <http://www.julongchina.com/en/jldsjdj.asp?q=31> accessed 28 October 2019
- Julong Indonesia website 'About us' <https://julongindonesia.com/about.html> accessed 28 October 2019
- KLHK (2017a) 'Banding PT WAJ ditolak, KLHK menangkan kasus Karhutla' 28 November 2017 http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/903
- KLHK (2017b) 'Tiga tahun Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan: 2015 - 2017' <http://gakkum.menlhk.go.id/compro/docs/CapaianGakkum2017.pdf>
- KLHK (2019) 'Pemerintah terus lakukan upaya pencegahan, pengendalian, hingga penegakan hukum karhutla' 29 August 2019 http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2085
- Kompas (2019) 'Sanksi bagi perusahaan' 2 October 2019 <http://www.fmb9.id/images/10519org.pdf>
- Koplitz SN et al (2016) 'Public health impacts of the severe haze in Equatorial Asia in September–October 2015' Environmental Research Letters 11(9): 094023 <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/11/9/094023>
- Korindo Group (2019) Letter to Greenpeace International, 1 November 2019
- Korindo website 'Group profile' <https://www.korindo.co.id/group-profile/> accessed 28 October 2019
- KPN Corp website 'Agriculture' http://www.kpn-corp.com/?page_id=24 accessed 31 October 2019
- kumparanNEWS (2017) 'Vonis denda Rp 1 miliar bagi korporasi pembakar hutan Riau' 11 July 2017 <https://kumparan.com/kumparannews/vonis-denda-rp-1-miliar-bagi-korporasi-pembakar-hutan-riau>
- Kuala Lumpur Kepong (2019a) 'Annual report 2018' <https://www.klk.com.my/wp-content/uploads/2019/01/20190104-AR-2018-Full.pdf>
- Kuala Lumpur Kepong (2019b) Email to Greenpeace International, 1 November 2019
- Kuala Lumpur Kepong website 'Our company: Overview' <https://www.klk.com.my/company-profile/> accessed 28 October 2019
- Kulim (Malaysia) Berhad (2007) 'KULIM announcement 2007.06.22' Bursa Malaysia announcement 22 June 2007 <http://www.bursamalaysia.com/market/listed-companies/company-announcements/555001#>
- Kusumaningtyas R & van Gelder JW (2017) 'Towards responsible and inclusive financing of the palm oil sector' CIFOR Occasional Paper 175 http://www.cifor.org/publications/pdf_files/OccPapers/OP-175.pdf
- LAPAN online monitoring platform <http://modis-catalog.lapan.go.id/monitoring/>
- Listiyorini E & Rusmana Y (2019) 'Indonesia finds one-fifth of palm oil plantations are illegal' 10 October 2019 Bloomberg <https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-10/indonesia-finds-one-fifth-of-palm-oil-plantations-are-illegal>
- Makin Group website 'About Makin Group' http://www.makingroup.com/company_profile.html accessed 28 October 2019
- Malaysia Kini (2019) 'Felda claims "cheated" in Eagle High stake purchase, lodges report' 9 April 2019 <https://www.malaysiakini.com/news/471464>
- Minister of Agriculture (2013) 'Ministerial regulation on plantation business permitting procedures / Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia no. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan' 30 September 2013 <http://www.iopri.org/wp-content/uploads/2016/10/PERMENTAN-98-2013-PERIZINAN-USAHA-PERKEBUNAN.pdf>
- MondelDz (2019a) Email to Greenpeace USA, 1 November 2019
- MondelDz (2019b) 'Palm oil mill list: 26 April 2019' https://www.mondelezinternational.com/impact/sustainable-resources-and-agriculture/agricultural-supply-chain/~media/mondelezcorporate/uploads/downloads/Mills_Data_2019.pdf?la=en
- Mongabay (2018) 'Terbukti salah lahan terbakar, hakim hukum Triomas bayar Rp14 miliar' 18 October 2018 <https://www.mongabay.co.id/2018/10/18/terbukti-salah-lahan-terbakar-hakim-hukum-triomas-bayar-rp14-miliar/>
- Musim Mas (2019) Letter to Greenpeace International, 1 November 2019
- Musim Mas website 'About us: Introduction' <http://www.musimmas.com/about-us/introduction> accessed 28 October 2019
- Musim Mas website 'Grievance list' <http://www.musimmas.com/sustainability/group-supplier-engagement-grievance/grievance-list> accessed 31 October 2019
- Musim Mas website 'List of suppliers' <http://www.musimmas.com/sustainability/traceable-supply-chain/list-of-suppliers> accessed 31 October 2019
- Nestlé (2019a) Letter to Greenpeace International, 1 November 2019
- Nestlé (2019b) 'Supply chain disclosure palm oil: Snapshot: April 2018' <https://www.nestle.com/sites/default/files/2019-08/supply-chain-disclosure-palm-oil.pdf>
- Nestlé website 'Palm oil' <https://www.nestle.com/csv/raw-materials/palm-oil> accessed 1 November 2019
- New York Declaration on Forests website 'Home' <https://nydfglobalplatform.org/> accessed 25 October 2019
- NPC Resources (2015) 'Group structure as at 31.12.2015' <https://www.npc.com.my/2015/GroupStructure.pdf>
- NPC Resources website 'Main' <https://www.npc.com.my/> accessed 28 October 2019
- Nugraha I & Arumingtyas L (2019) 'Setahun kebijakan moratorium: Sulitnya benahi tata kelola sawit' 18 October 2019 Mongabay <https://www.mongabay.co.id/2019/10/18/setahun-kebijakan-moratorium-sulitnya-benahi-tata-kelola-sawit/>

NYDF Assessment Partners (2019) 'Protecting and restoring forests: A story of large commitments yet limited progress' New York Declaration on Forests Five-Year Assessment Report, Climate Focus (coordinator and editor), <https://forestdeclaration.org>

P&G (nd) '2017 palm oil mills' https://assets.ctfassets.net/oggad6svuzkv/2xX5B437BSwMYCqoGeWeQ/bca79c23d7d023c3f7718f911d7756e7/P_G_2017_Palm_Oil_Mills.pdf

P&G (2019) Email to Greenpeace USA, 31 October 2019

Perusahaan Pertambangan Batu Bara Direktori Online website 'PT Gagah Putera Satria' <https://tambangbatubara01.wordpress.com/pt-gagah-putera-satria/> accessed 28 October 2019

POIG website 'About POIG' <http://poig.org/> accessed 31 October 2019

Povera A (2019) 'Haze: Kok raises concern over Indonesia's action against 4 Malaysian companies' 13 September 2019 New Straits Times <https://www.nst.com.my/news/nation/2019/09/521216/haze-kok-raises-concern-over-indonesias-action-against-4-malaysian>

PT Astra Agro Lestari (2019) 'Annual report 2018' <https://www.astra-agro.co.id/wp-content/uploads/2019/04/annual-report-2018-web.pdf>

PT Batara Elok Semesta Terpadu (2017) 'Annual communication of progress 2017' <https://rspo.org/file/acop2017/submissions/pt.%20batara%20elok%20semesta%20terpadu-ACOP2017.pdf>

PT Dharma Satya Nusantara (2019) 'Annual report 2018: Breaking our limits' <http://www.dsn.co.id/uploads/AR%20DSNG%202018%20OK.pdf>

PT Jaya Agra Wattie website 'Palm oil profile' <http://www.jawattie.com/our-business/our-products/palm-oil> accessed 28 October 2019

PT Monrad Intan Barakat (2019) Letter to Greenpeace International, 31 October 2019

PT Sawit Sumbermas Sarana (2019a) 'Annual report 2018' https://ssms.co.id/uploads/2019/06/AR-SSMS-2018_0k_new1561373548.pdf

PT Sawit Sumbermas Sarana (2019b) 'Management update September 2019' <https://ssms.co.id/uploads/2019/09/PT-SSMS-Tbk---Management-Update-1H19---September1568703295.pdf>

PT Sawit Sumbermas Sarana website 'Our business' <https://ssms.co.id/en/our-business> accessed 28 October 2019

Putri A (2019) 'Daftar perusahaan di Kalbar yang disegel KLHK karena lahan konsesinya terbakar' 16 September 2019 Tribun Pontianak <https://pontianak.tribunnews.com/2019/09/16/daftar-perusahaan-di-kalbar-yang-disegel-klhk-karena-lahan-konsesinya-terbakar?page=all>

Rainforest Action Network et al (2018) 'Perilous: Korindo, land grabbing & banks' https://www.ran.org/wp-content/uploads/2018/11/RAN_Perilous_FINAL.pdf

Ratnasari E & Soesetiyono JB (2012) 'Business strategy - Sukanto Tanoto: The pulp & paper king shares his story' 24 June 2012 Fortune Indonesia (English translation) http://www.rgei.com/files/media_releases/Fortune%20Indonesia%20Magazine%20article%20-%20English%20translation.pdf

Regan H (2019) 'Indonesia arrests around 200 as thick smog from forest fires reaches hazardous levels' 18 September 2019 CNN <https://edition.cnn.com/2019/09/18/asia/indonesia-malaysia-haze-arrests-intl-hnk/index.html>

Reuters (2019) 'Haze crisis: Blood red skies unsettle Indonesians' 24 September 2019 New Straits Times <https://www.nst.com.my/world/2019/09/524240/haze-crisis-blood-red-skies-unsettle-indonesians>

Reuters website 'Jaya Agra Wattie Tbk PT' <https://www.reuters.com/companies/JAWAta.JK> accessed 28 October 2019

RGE website 'FAQs' <https://www.rgei.com/about/faqs> accessed 28 October 2019

RGE website 'Our company' <https://www.rgei.com/about/our-company> accessed 28 October 2019

RSPO (2017) 'RSPO membership rules 2016' <https://www.rspo.org/publications/download/638ae27c7f6b004>

RSPO (2019) 'RSPO hotspot monitoring' 13 September 2019 <https://rspo.org/news-and-events/news/rspo-hotspot-monitoring>

RSPO website 'About' <https://rspo.org/about> accessed 29 October 2019

RSPO website 'Complaint: Golden Agri-Resources Ltd' <https://askrspo.force.com/Complaint/s/case/5009000002AtWiNAAV/> accessed 28 October 2019

RSPO website 'Members: Musim Mas Holdings Pte. Ltd.' <https://www.rspo.org/members/7582/Musim-Mas-Holdings-Pte.-Ltd> accessed 28 October 2019

RSPO website 'Members: PT. Agro Inti Semesta' <https://www.rspo.org/members/7852/PT.-AGRO-INTI-SEMESTA> accessed 28 October 2019

RSPO website 'Members: PT. Dharma Satya Nusantara' <https://www.rspo.org/members/1891/PT.-DHARMA-SATYA-NUSANTARA> accessed 28 October 2019

RSPO website 'Members: PT Tripura Agro Persada' <https://www.rspo.org/members/1023/PT-Tripura-Agro-Persada> accessed 28 October 2019

Samsung C&T (2008) 'Samsung C&T expands into biodiesel business' 22 July 2008 http://trading.samsungcnt.com/EN/trading/ne/501000/articleRead.do?board_id=6&article_id=1476&page_index=9

Samsung C&T Corporation and Subsidiaries (2017) 'Consolidated interim financial statements June 30, 2017 and 2016' <http://www.samsungcnt.com/download/File.do?fileSeqNum=rkqaliicmbfy>

Sapie MA (2018) 'Jokowi imposes moratorium on palm oil plantations' 20 September 2018 Jakarta Post <https://www.thejakartapost.com/news/2018/09/20/jokowi-imposes-moratorium-on-palm-oil-plantations.html>

Saputra A (2019) 'Tok! MA menangkan KLHK vs pembakar hutan digugatan Rp 1 triliun' 2 January 2019 detikNews <https://news.detik.com/berita/d-4367535/tok-ma-menangkan-klhk-vs-pembakar-hutan-di-gugatan-rp-1-triliun>

Satriastanti FE (2016) 'Jokowi bans new oil palm and mining concessions' 16 April 2016 Mongabay <https://news.mongabay.com/2016/04/jokowi-announces-moratorium-new-oil-palm-mining-concessions/>

Sime Darby (2019a) 'Annual report 2018' <http://www.simedarbyplantation.com/sites/default/files/download/SDP-Annual-Report-2018.pdf>

Sime Darby (2019b) Email to Greenpeace Southeast Asia, 1 November 2019

Sime Darby website 'Statement on the intention to sell off 100% interest of PT Mitra Austral Sejahtera (PT MAS)' <http://www.simedarbyplantation.com/media/press-releases/statement-intention-sell-100-interest-of-pt-mitra-austral-sejahtera-pt-mas> accessed 2 November 2019

Sinar Mas website 'Agribusiness and food' <http://www.sinarmas.com/en/agribusiness-and-food.html> accessed 28 October 2019

SIPEF (2019a) 'Annual report 2018' https://www.sipef.com/media/2105/2018_sipef_annual-report-uk-web.pdf

SIPEF (2019b) Email to Greenpeace International, 1 November 2019

SIPEF (2019c) Email to Greenpeace Southeast Asia, 23 September 2019

Sizer N et al (2013) 'Peering through the haze: What data can tell us about the fires in Indonesia' 21 June 2013 <https://www.wri.org/blog/2013/06/peering-through-haze-what-data-can-tell-us-about-fires-indonesia>

- Straits Times (2019) 'Malaysia's environment minister ignores calls to resign' 26 September 2019 <https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysias-environment-minister-ignores-calls-to-resign>
- Tani S (2019) 'Indonesian billionaire who founded Sinar Mas Group dies: reports' 27 January 2019 Nikkei Asian Review <https://asia.nikkei.com/Life-Arts/Obituaries/Indonesian-billionaire-who-founded-Sinar-Mas-Group-dies-reports>
- Tanjung JW (2017) 'Divonis hukuman beragama, 3 bos PT Adei terus diburu kejadi Pelalawan' 13 December 2017 Tribun Pelalawan <https://pekanbaru.tribunnews.com/2017/12/13/divonis-hukuman-beragama-3-bos-pt-adei-terus-diburu-kejadi-pelalawan>
- Tanjung JW (2019) 'Tak kunjung eksekusi Putusan MA terhadap vonis PT Adei Plantation, ini penjelasan kejadi pelalawan' 21 August 2019 Tribun Pelalawan <https://pekanbaru.tribunnews.com/2019/08/21/tak-kunjung-eksekusi-putusan-ma-terhadap-vonis-pt-adei-plantation-ini-penjelasan-kejadi-pelalawan>
- Tempo.co (2019) 'BNPB: Korban ISPA akibat karhutla mencapai 900 ribu jiwa' 23 September 2019 <https://nasional.tempo.co/read/1251408/bnpb-korban-ispa-akibat-karhutla-mencapai-900-ribu-jiwa>
- Tirto.id (2019) 'Lahan perusahaan sawit Malaysia yang diduga dibakar disegel KLHK' 14 September 2019 <https://tirto.id/lahan-perusahaan-sawit-malaysia-yang-diduga-dibakar-disegel-klhk-eh4G>
- Today Online (2019) 'Singapore sends diplomatic note to Indonesia over forest fires' 28 September 2019 New Straits Times <https://www.nst.com.my/world/2019/09/525372/singapore-sends-diplomatic-note-indonesia-over-forest-fires>
- Triptra Agro Plantation (2019) Email to Greenpeace Southeast Asia, 31 October 2019
- Triptra Group website 'Agribusiness' <https://www.triptra-group.com/bisnis?cat=agro> accessed 28 October 2019
- Triptra Group website 'Home' <https://www.triptra-group.com/index> accessed 28 October 2019
- TSH Resources (2019) 'Annual report 2018' <https://www.tsh.com.my/annual-report-2018/>
- Tunas Baru Lampung (2019) 'Summary of third-party verification of PT Samora Usaha Jaya (SUJ) case' 8 January 2019 <http://www.tunasbarulampung.com/en/summary-of-third-party-verification-of-pt-samora-usaha-jaya-suj-case/>
- Tunas Baru Lampung website 'Head office / factories / subsidiaries' <http://www.tunasbarulampung.com/en/head-office-factories-subsidiaries/> accessed 28 October 2019
- Tunas Baru Lampung website 'Management' <http://www.tunasbarulampung.com/en/management/> accessed 28 October 2019
- Unilever (2018) '2018 palm oil mills' https://www.unilever.com/Images/-unilever-s-universal-palm-oil-mill-list_h1-2018_final_tcm244-530097_1_en.pdf
- Unilever (2019a) Letter to Greenpeace International, 2 November 2019
- Unilever (2019b) 'Unilever's palm oil grievance tracker, updated June 17, 2019' https://www.unilever.com/Images/unilever-palm-oil-grievance-tracker_tcm244-530071_en.pdf
- Varkkey H (2013) 'Patronage politics, plantation fires and transboundary haze' Environmental Hazards 12 https://www.researchgate.net/publication/256988719_Patronage_politics_plantation_fires_and_transboundary_haze
- Widhiarto H (2014) 'Malaysian firm fined, executives get prison for role in forest fires' 11 September 2014 Jakarta Post <https://www.thejakartapost.com/news/2014/09/11/malaysian-firm-fined-executives-get-prison-role-forest-fires.html>
- Wikipedia website 'Perkebunan Nusantara' https://id.wikipedia.org/wiki/Perkebunan_Nusantara accessed 28 October 2019
- Wilmar International (2019a) 'Annual report 2018: Towards sustainable palm oil' <https://www.wilmar-international.com/annualreport2018/pdf/00-wilmarAR2018.pdf>
- Wilmar International (2019b) Email to Greenpeace Southeast Asia, 1 November 2019
- Wilmar International website 'Grievance procedure' <https://www.wilmar-international.com/sustainability/grievance-procedure> accessed 31 October 2019
- Wilmar International website 'Supply chain map' www.wilmar-international.com/sustainability/traceability/supply-chain-map accessed 31 October 2019
- Winahyu AI (2019) 'Menko Perekonomian bantah moratorium sawit jalan di tempat' 10 October 2019 Media Indonesia <https://mediaindonesia.com/read/detail/264586-menko-perekonomian-bantah-moratorium-sawit-jalan-di-tempat>
- Wismabrata MH (2018) 'Kronologi guru besar IPB digugat Rp 510 miliar hingga munculnya petisi bela Prof Bambang, ini faktanya' 25 October 2018 Kompas.com <https://regional.kompas.com/read/2018/10/25/16542351/kronologi-guru-besar-ipb-digugat-rp-510-miliar-hingga-munculnya-petisi-bela?page=all>
- World Bank (2016) 'The cost of fire: An economic analysis of Indonesia's 2015 fire crisis' Indonesia sustainable landscapes knowledge note 1 <http://documents.worldbank.org/curated/en/776101467990969768/The-cost-of-fire-an-economic-analysis-of-indonesia-s-2015-fire-crisis>
- World Resources Institute (2019) 'RELEASE: Palm oil industry to jointly develop radar monitoring technology to detect deforestation' 31 October 2019 <https://www.wri.org/news/2019/10/release-palm-oil-industry-jointly-develop-radar-monitoring-technology-detect>

21 September 2019, PT Wira Karya Sakti, 1° 19'3.979"S 103° 45'30.499" E: Kabut merah tebal mengelilingi sebuah kanal di lahan gambut yang terbakar di konsesi kayu pulp Sinar Mas Forestry di Jambi. © Adimaja/Greenpeace





CATATAN AKHIR

- 1 JopeA(2019)
- 2 Dalam laporan ini, sebutan 'Greenpeace' perlu dipahami sebagai merujuk pada Greenpeace International kecuali dinyatakan lain..
- 3 Untuk informasi lengkap tentang RSPO dan perannya dalam industri sawit, lihat situs web RSPO 'About'.
- 4 Masih perlu dilihat apakah pembekuan atau komitmen 'tidak membeli' ini diterapkan keseluruhan tingkat rantai pasok atau tidak, mengingat adanya kegagalan dalam mengidentifikasi kelompok produsen secara akurat.
- 5 Situs web Consumer Goods Forum 'Towards zero net deforestation'
- 6 Situs web New York Declaration on Forests 'Home'
- 7 NYDF Assessment Partners (2019) hlm. 14
- 8 Lihat misalnya Greenpeace (2018a, b, c, d) dan Greenpeace (2019).
- 9 Komposisi dari banyak kelompok-kelompok ini, dan landasan di balik interpretasi Greenpeace terhadap mereka (secara umum dan masing-masing), diuraikan dalam Greenpeace (2018b). Konsep dari sebuah kelompok melampaui hubungan induk-anak perusahaan formal, mempertimbangkan tidak hanya kepemilikan yang sama namun juga kendali finansial, manajerial dan/atau operasional bersama. Lihat Lampiran 2 untuk rincian kelompok-kelompok perusahaan yang dibahas dalam laporan ini.
- 10 Lihat misalnya Reuters (2019) dan Gomez J & Armini N (2019).
- 11 Agence France-Press (2019)
- 12 World Bank (2016) hlm. 2
- 13 Koplitz SN et al (2016)
- 14 Berdasarkan prinsip 'tanggung jawab mutlak' yang terkandung dalam UU Lingkungan Hidup (2009), perusahaan bertanggung jawab atas kerusakan akibat kebakaran yang terjadi di tanah yang mereka kuasai, terlepas dari apakah perusahaan dapat dibuktikan telah berkontribusi terhadap kebakaran-kebakaran tersebut atau tidak. Hakim Mahkamah Agung dan juru bicara Andi Samsan Nganro menegaskan prinsip hukum ini ketika menanggapi keputusan final dalam kasus PT National Sago Prima tanggal 2 Januari 2019: 'Pada dasarnya, perusahaan bertanggung jawab atas kebakaran sesuai dengan 'prinsip tanggung jawab mutlak' ini. Lihat Saputra A (2019). Juga lihat Agustin H (2017).
- 15 UU Kehutanan (49/1999) menetapkan bahwa 'Pemegang hak atau izin harus bertanggung jawab atas kebakaran apapun yang terjadi di area kerjanya' (klausul 49) dan UU Lingkungan Hidup (32/2009) secara lebih umum menetapkan tanggung jawab mutlak tanpa perlu pembuktian (klausul 88) dan tanggung jawab atas kelalaian yang menyebabkan kerusakan lingkungan (klausul 99).
- 16 Lihat misalnya HaniySU et al (2019) dan Jong HN (2017).
- 17 Halim D & Ristianto C (2019)
- 18 CAMS (2019)
- 19 Sumber Global Fire Emissions Database, version 4 (GFED4), berdasarkan hubungan statistik antara defeksi kebakaran dan emisi untuk ecoregion tertentu. Perkiraan emisi karbon dan CO2 untuk Indonesia diambil secara teratur dari hari ke hari.
- 20 Sumber: Global Fire Emissions Database, version 4 (GFED4).
- 21 Emisi total GRK Inggris adalah 490Mt CO2e di tahun 2014. Sumber: situs web ClimateWatch 'Historical GHG emissions'.
- 22 Reuters (2019)
- 23 Agence France-Press (2019)
- 24 Tempo.co (2019)
- 25 Regan H (2019)
- 26 GAR (2019b)
- 27 Greenpeace Southeast Asia (2019). Data dari pemerintah tersedia di <http://geoportal.menhk.go.id/arcgis/rest/services/KLHK/>.
- 28 Sebagian data dalam tabel ini tidak sama dengan data yang digunakan dalam Greenpeace Southeast Asia (2019). Hal ini disebabkan akibat revisi kecil terhadap pemetaan setelah ada tanggapan terhadap laporan sebelumnya, dan semakin meningkatnya pemahaman mengenai struktur kendali dari sebagian kelompok, yang membuat beberapa perusahaan dianggap sebagai satu kelompok (Rachmat) di mana mereka awalnya dipandang sebagai empat perusahaan (Amara, DSN, Triputra Agro Persada dan Union Sampoerna Triputra Persada). Lihat Lampiran 2 untuk keterangan lengkapnya. Selain itu, laporan ini pada dasarnya menganggap area yang terbakar dalam tahun-tahun berbeda sebagai total area terbakar setiap tahunnya ('total area kebakaran'), termasuk area yang terbakar lebih dari sekali. Dokumen pengarah bulan September menggunakan pengukuran alternatif 'area lahan yang terdampak kebakaran' yang disebutkan dalam tabel ini, yang mengurangi kebakaran berulang di lahan yang sama.
- 29 Lihat Jong HN (2019a, b). Salinan 'Laporan penyelidikan khusus terhadap perizinan dan sertifikasi perkebunan kelapa sawit' milik Badan Pemeriksa Keuangan (diterbitkan 28 Februari 2019) berada pada Greenpeace.
- 30 Listiyorini E & Rusmana Y (2019) dan Winahyu AI (2019)
- 31 Satriastanti FE (2016)
- 32 Sapiie MA (2018)
- 33 Nugraha I & Arumingtyas L (2019)
- 34 Greenpeace Southeast Asia (2019)
- 35 Lihat Tabel 5. Dokumentasi berada pada Greenpeace. Salah satu kasus kebakaran kabarnya telah dibayar, namun bukan atas kebakaran dalam konsesi kelapa sawit; lihat BBC News (2019).
- 36 Today Online (2019)
- 37 Povera A (2019)
- 38 Lihat Straits Times (2019) dan Channel News Asia (2019).
- 39 Dokumen berada pada Greenpeace.
- 40 Informasi tentang tuntutan perdata dan pidana untuk penggunaan api, termasuk perusahaan perkebunan yang dihukum dan mereka yang terlibat dalam kasus yang sedang berlangsung, diperoleh dari sejumlah sumber. Laporan media dirujuk dalam tabel. Sumber-sumber KLHK termasuk KLHK (2017a), KLHK (2017b) hlm. 16 dan balasan kementerian untuk permintaan Kebebasan Informasi yang dikeluarkan oleh Greenpeace.
- 41 Diana E (2019)
- 42 Jong HN (2019c)
- 43 Wismabrata MH (2018)
- 44 Hanafiah J (2019b)
- 45 Diana E (2019)
- 46 Hanafiah J (2019a)
- 47 Rp.1,5 milyar untuk perannya dalam kebakaran-kebakaran tersebut dan Rp.5,1 milyar untuk restorasi area yang terbakar. Lihat Widhiarto H (2014).
- 48 Tirta.id (2019)
- 49 Varkkey H (2013) hlm. 19
- 50 Kuala Lumpur Kepong (2019b)
- 51 Lihat Tanjung JW (2019); KLK membenarkan kepada Greenpeace bahwa denda Rp.15,1 milyar tersebut terkait kasus tahun 2015 (Kuala Lumpur Kepong (2019b)).
- 52 Widhiarto H (2014)
- 53 Tanjung JW (2017)
- 54 Kuala Lumpur Kepong (2019b)
- 55 Povera A (2019)
- 56 kumparanNEWS (2017)
- 57 Beritajambi.co (2019)
- 58 Bahrie S (2018)
- 59 Cipta H (2019)
- 60 Genting (2019b)
- 61 Hanafiah J (2018)
- 62 Rp.13 milyar dari jumlah ini diperuntukan untuk restorasi area yang terbakar. Lihat Mongabay (2018).
- 63 Tanggapan KLHK atas permintaan Kebebasan Informasi dari Greenpeace, Mei-Juli 2019. Dokumen berada pada Greenpeace.
- 64 KLHK (2019)

- ⁶⁵ Informasi dari KLHK menanggapi permintaan Greenpeace Asia Tenggara untuk data tentang sanksi administrasi atas kebakaran, informasi yang diberikan tidak memadai untuk menegaskan sanksi administrasi yang khusus dijatuhkan untuk kasus kebakaran. Sumber: tanggapan KLHK atas permintaan Kebebasan Informasi, 17 Juli 2019. Dokumen berada pada Greenpeace.
- ⁶⁶ Dokumen berada pada Greenpeace.
- ⁶⁷ Kompas (2019)
- ⁶⁸ Mis. CNN Indonesia (2019), Gatra.com (2019) dan Putri A (2019).
- ⁶⁹ Komunikasi dengan Bumitama (Bumitama Agri Ltd (2019b)) mengindikasikan bahwa penyelidikan KLHK mendapati tidak ada pelanggaran dan penyelesaian konsesi telah dicabut.
- ⁷⁰ Di bulan Juni 2019, kepemilikan PT Mitra Austral Sejahtera dialihkan dari Sime Darby ke Inti Nusa Sejahtera. Lihat situs web Sime Darby 'Statement on the intention to sell-off 100% interest of PT Mitra Austral Sejahtera (PT MAS)'.
- ⁷¹ Lihat Kusumaningtyas R & van Gelder JW (2017) hlm. 7.
- ⁷² Keempat perusahaan ini secara konsisten menjadi merek konsumen yang menghasilkan keuntungan paling besar di dunia dan merupakan pembeli utama minyak kelapa sawit dan produk-produk turunannya, berdasarkan laporan Komunikasi Tahunan Kemajuan RSP0 tahun 2018. (<https://rspo.org/members/acop>).
- ⁷³ Daftar keluhan (juga dikenal sebagai pelacak keluhan) adalah catatan pengaduan rantai pasok yang diterima yang tersedia untuk umum. Sebagian besar pedagang utama memiliki daftar keluhan untuk umum (lihat Cargill (2019a), situs web GAR 'Grievance list', situs web Musim Mas 'Grievance list' dan situs web Wilmar International 'Supply chain map'). Unilever saat ini adalah satu-satunya merek konsumen yang diketahui menyediakan daftar lengkap keluhannya untuk umum. (lihat Unilever (2019b)), meskipun Nestlé juga mencantumkan daftar sebagian kelompok usaha yang mereka keculikan di situs web mereka (lihat situs web Nestlé 'Palm oil').
- ⁷⁴ 21 dari 30 kelompok usaha. Lengkapnya lihat Lampiran 2.
- ⁷⁵ Lihat situs web RSP0 'About'.
- ⁷⁶ RSP0 (2017) hlm. 6–7, klausul 5.2
- ⁷⁷ RSP0 sendiri mengklaim bahwa pada tanggal 10 September 2019, kurang dari 0,5% dari semua kebakaran yang terdeteksi (tidak hanya kebakaran di dalam konsesi kelapa sawit) di Malaysia dan Indonesia berada di dalam konsesi para anggotanya (lihat RSP0 (2019)). Data Greenpeace menunjukkan persentase yang jauh lebih tinggi, sekitar 5%, dari semua titik api di Indonesia antara Januari dan September 2019 (dan sekitar 26% dari semua titik api di konsesi kelapa sawit) yang terjadi dalam konsesi ke-21 kelompok produsen terkait RSP0 yang disebutkan di antara 30 kelompok usaha yang paling kuat terkait kebakaran yang diidentifikasi dalam laporan ini. Khususnya, penilaian RSP0 gagal untuk memperhitungkan pelanggaran peraturannya yang meluas tentang keanggotaan tingkat kelompok (lihat RSP0 (2017) hal 6–7, klausul 5.2) – yang berarti bahwa banyak kelompok memiliki keanggotaan parsial dan gagal melaporkan semua konsesi terkait mereka ke RSP0 (lihat Lampiran 2), apalagi menyerahkan peta mereka. Akibatnya, RSP0 tidak memperhitungkan (dan bahkan mungkin tidak tahu) sepenuhnya tentang kepentingan perkebunan anggotanya – pemahaman yang tidak lengkap yang secara fundamental membahayakan data titik api kebakaran organisasi tersebut.
- ⁷⁸ Salinan tanggapan perusahaan tersedia di https://drive.google.com/drive/folders/1XadmdtXMzT_Xg8vQM7tigywjF6MjBKyb?usp=sharing.
- ⁷⁹ Bulan Juni 2019, kepemilikan PT Mitra Austral Sejahtera dialihkan dari Sime Darby ke Inti Nusa Sejahtera. Lihat situs web Sime Darby 'Statement on the intention to sell-off 100% interest of PT Mitra Austral Sejahtera (PT MAS)'.
- ⁸⁰ Mitra Penilaian NYDF (2019) hlm. 77
- ⁸¹ Lihat definisi kelompok korporat di situs web Accountability Framework 'Definitions'.
- ⁸² RSP0 (2017) hlm. 6–7, klausul 5.2
- ⁸³ Consumer Goods Forum (2015)
- ⁸⁴ FSC (2015)
- ⁸⁵ Lihat Greenpeace (2018b).
- ⁸⁶ Bekas kebakaran (burn scar) adalah suatu istilah yang merujuk pada area yang secara kasat mata terbakar/hangus setelah peristiwa kebakaran. Saat dilihat dari udara menggunakan citra satelit, area-area ini umumnya tampak sebagai area kehitaman atau gelap. Dengan citra-citra yang diambil secara berkala, sangat mungkin untuk mengidentifikasi dan memetakan bekas-bekas kebakaran dengan melihat perubahan pada lanskap dari waktu ke waktu. Data bekas kebakaran pemerintah disajikan dalam bentuk peta. Greenpeace menghitung angka-angka dalam dokumen pengarahannya ini dengan menggunakan data pemetaan dari pemerintah yang tersedia di <http://geoportal.menlhk.go.id/arcgis/rest/services/KLHK/>
- ⁸⁷ UU Kehutanan (49/1999) menetapkan bahwa 'Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya' (Pasal 49) dan UU Lingkungan Hidup (32/2009) lebih umum lagi menetapkan tanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan (Pasal 88) dan tanggung jawab atas kelalaian yang mengakibatkan kerusakan lingkungan (Pasal 99).
- ⁸⁸ Data ini tersedia lewat platform daring di <http://modis-catalog.lapan.go.id/monitoring/>.
- ⁸⁹ Peringatan titik api yang diturunkan dari sensor satelit memberikan informasi spasial dan temporal tentang kemungkinan lokasi suatu kebakaran pada saat satelit Terra, Aqua dan SNPP melintas. Untuk informasi lengkap tentang sistem deteksi kebakaran yang digunakan lihat situs web Earthdata 'Firms FAQ' dan Deputi Bidang Penginderaan Jauh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional – LAPAN (2016).
- ⁹⁰ Lihat 'What is the detection confidence?' di situs web Earthdata 'Firms FAQ' untuk pembahasan tentang nilai kepercayaan. Untuk MODIS rentangnya adalah dari 0% hingga 100%; untuk VIIRS rentangnya ditetapkan sebagai rendah, nominal atau tinggi. Untuk beragam penerapan – atau kawasan berbeda – rentang berbeda (yang disebut kelas kebakaran) mungkin lebih sesuai. Semakin tinggi penetapannya, semakin sedikit peringatan palsu tertentu, namun lebih banyak kebakaran sebenarnya yang akan terlewatkan.
- ⁹¹ Sizer N et al (2013)
- ⁹² Ini mencakup, namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:
- Peta Pelepasan Kawasan Hutan Negara untuk perkebunan, KLHK, 2018 http://geoportal.menlhk.go.id/arcgis/rest/services/KLHK_EN/Releasing_Forest_Area_for_Plantation/MapServer
 - Peta konsesi kelapa sawit, RSP0, 2017 <https://rspo.org/members/geospo>
 - Peta Hak Guna Usaha (HGU), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (KemenATR/BPN), 2018 <http://peta.bpn.go.id/>
 - Peta Ijin Usaha Perkebunan (IUP), Dinas Perkebunan Kabupaten (hanya kabupaten-kabupaten dan tahun-tahun tertentu yang tersedia)
 - Peta moratorium indikatif revisi 13, KLHK, 2017 http://geoportal.menlhk.go.id/arcgis/rest/services/KLHK_EN/Moratorium_13th_Revision/MapServer
 - Peta Kawasan Hutan Negara, KLHK, 2018 http://geoportal.menlhk.go.id/arcgis/rest/services/KLHK_EN/Forest_Area_/MapServer

- Peta tutupan lahan, KLHK, 2018 http://geoportal.menhk.go.id/arcgis/rest/services/KLHK_EN/Land_Cover_2017/MapServer
 - Peta Usaha Perkebunan, Matapapua.org, 2018 <http://maps.matapapua.org/maps/matapapua>
 - Atlas Sawit Papua, Pusaka, 2015 <https://awasmifree.potager.org/uploads/2015/04/atlas-low-resolution-Final-id.pdf>
 - Peta sawit, kebakaran, deforestasi dan konflik, Sawitwatch, 2018 <http://sharedlandscapes.maps.arcgis.com/apps/Style/index.html?appid=b7504de0d147495b9f8c9aec74c4e572>
 - Peta konsesi perkebunan sawit, WWF Indonesia, 2009 <https://www.wwf.or.id/?13020/Peta-Konsesi-Perkebunan-Sawit>
 - Peta Blok Kerja, Jikalahari, 2018 <http://jikalahari.or.id/category/database/peta/blok-kerja-jikalahari/>
- ⁹³ Dokumen berada pada Greenpeace. Sebuah versi ringkasan dari informasi-informasi ini tersedia di <https://drive.google.com/drive/folders/1VXHnAJkj2J7MB0jQENoBeYyqACqUBqA>.
- ⁹⁴ Laporan media terkait dapat dilihat di Tabel 5. Sumber-sumber dari KLHK mencakup KLHK (2017a) dan KLHK (2017b) hlm. 16.
- ⁹⁵ Dokumen berada pada Greenpeace.
- ⁹⁶ Kompas (2019)
- ⁹⁷ Mis. CNN Indonesia (2019), Gatra.com (2019) dan Putri A (2019).
- ⁹⁸ KLHK (2019)
- ⁹⁹ Greenpeace (2018b)
- ¹⁰⁰ Greenpeace menganalisis data pabrik dari pedagang minyak kelapa sawit dan perusahaan-perusahaan barang konsumen berikut, yang mencakup periode paling baru yang tersedia pada tanggal 1 Oktober 2019.
- Perdagangan:
- Cargill: Q1 2019. Sumber: Cargill (2019a).
 - GAR: Januari hingga Juni 2019. Sumber: situs web GAR 'Supply chain map'.
 - Musim Mas: Juli 2018 hingga Juni 2019. Sumber: situs web Musim Mas 'List of suppliers'.
 - Wilmar: Juli 2018 hingga Juni 2019. Sumber: situs web Wilmar International 'Supply chain map'.
- Perusahaan barang konsumen:
- Mondel z: 'Snapshot based on data provided late 2018' (diterbitkan April 2019) – periode yang dicakup oleh data ini tidak disebutkan. Sumber: Mondel z (2019b).
 - Nestlé: 'Snapshot: April 2018' (diterbitkan Agustus 2019). Sumber: Nestlé (2019b).
 - P&G: 2017. Sumber: P&G (nd).
 - Unilever: 2018. Sumber: Unilever (2018).
- ¹⁰¹ World Resources Institute (2019)
- ¹⁰² Kementerian Pertanian (2013) hlm. 4
- ¹⁰³ Greenpeace (2018b)
- ¹⁰⁴ Pendekatan Stok Karbon Tinggi (SKT) mengidentifikasi area hutan dan area Nilai Konservasi Tinggi (NKT) yang harus dilindungi karena karbon, keanekaragaman hayati dan nilai sosialnya. Pendekatan ini melibatkan penggunaan data satelit dan kerja dengan masyarakat tradisional untuk memetakan suatu daerah, memutuskan rencana konservasi dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat. Perusahaan anggota dan pemasoknya harus menghentikan pembukaan area SKT yang potensial atau lahan gambut hingga proses tersebut selesai dilaksanakan. Pendekatan ini terus diawasi dan selanjutnya disempurnakan oleh Kelompok Pengarah Stok Karbon Tinggi multipihak, yang melibatkan LSM internasional termasuk Greenpeace serta produsen dan pedagang minyak kelapa sawit. Lihat situs web Pendekatan HCS 'The High Carbon Stock Approach'. Palm Oil Innovation Group/POIG (Kelompok Inovasi Minyak Kelapa Sawit) adalah sekelompok organisasi industri dan masyarakat sipil yang bertujuan melampaui standar RSPo dalam berbagai masalah lingkungan, sosial, rantai pasok, dan tata kelola. Lihat situs web POIG 'About POIG'.
- ¹⁰⁵ Situs web RSPo 'Members: PT. Agro Inti Semesta'. Kelompok usaha ini diidentifikasi sebagai LIPPO di Greenpeace Asia Tenggara (2019). Di sini diidentifikasi sebagai PT Agro Inti Semesta (anak perusahaan minyak kelapa sawit) sebagaimana diidentifikasi oleh RSPo.
- ¹⁰⁶ PT Astra Agro Lestari (2019) hlm. 61–64
- ¹⁰⁷ Situs web ANJ Group 'Our profile', 'Ownership structure' dan 'Board of Commissioners'
- ¹⁰⁸ Situs web ANJ Group 'Group structure'
- ¹⁰⁹ Situs web Bakrie & Brothers 'Our company'
- ¹¹⁰ Situs web Bakrie & Brothers 'Investments' dan Situs web Bakrie Sumatera Plantations 'Products'
- ¹¹¹ Situs web Bakrie Sumatera Plantations 'Business group structure'
- ¹¹² Anak perusahaan PT BEST dulunya adalah anggota sampai akhir tahun 2017 dan menyerahkan Komunikasi Kemajuan Tahunan untuk tahun tersebut (lihat PT Batara Elok Semesta Terpadu (2017)). Perusahaan ini tidak muncul dalam daftar anggota saat ini (<https://www.rspo.org/members/all>) namun RSPo tidak memiliki mekanisme publik untuk melacak keluarannya anggota, yang berarti status PT BEST saat ini tidak jelas.
- ¹¹³ Aidenvironment (2017) hlm. 26
- ¹¹⁴ Bumitama Agri Ltd (2019a) hlm. 41, 134–135
- ¹¹⁵ Bumitama Agri Ltd (2019a) hlm. 84–86
- ¹¹⁶ Greenpeace (2018b) hlm. 38–45
- ¹¹⁷ Situs web PT Sawit Sumbermas Sarana 'Our business'
- ¹¹⁸ PT Sawit Sumbermas Sarana (2019a) hlm. 65
- ¹¹⁹ PT Sawit Sumbermas Sarana (2019a) hlm. 11
- ¹²⁰ PT Sawit Sumbermas Sarana (2019a) hlm. 68–71 dan PT Sawit Sumbermas Sarana (2019b) hlm. 13
- ¹²¹ Greenpeace (2018b) hlm. 48
- ¹²² Situs web First Resources 'Stock information'
- ¹²³ First Resources (2018b)
- ¹²⁴ Profil registri perusahaan.
- ¹²⁵ Profil registri perusahaan. Lihat juga catatan akhir 5 Greenpeace (2018b) untuk sumber-sumber yang berkaitan dengan hubungan keluarga Fangiono.
- ¹²⁶ Lihat analisis dalam Greenpeace (2018b) hlm. 60–61.
- ¹²⁷ First Resources (2018a)
- ¹²⁸ Lihat analisis dalam Greenpeace (2018b) hlm. 60–61.
- ¹²⁹ Situs web Direktori Online Perusahaan Pertambangan Batu Bara 'PT Gagah Putera Satria'
- ¹³⁰ Samsung C&T (2008)
- ¹³¹ Analisis Greenpeace terhadap profil registri perusahaan. Lihat Greenpeace (2018d) dan Greenpeace (2018b) hlm. 68.
- ¹³² Lihat Greenpeace (2018b) hlm. 68.
- ¹³³ profil registri perusahaan PT Gandaerah Hendana dan PT Inecda serta perusahaan-perusahaan induk mereka, dan Samsung C&T Corporation and Subsidiaries (2017) hlm. 23
- ¹³⁴ Lihat misalnya situs web KPN Corp 'Agriculture' dan situs web Gama Plantation 'Home'.
- ¹³⁵ Genting Berhad (2019) hlm. 25, 193–211
- ¹³⁶ PT Varita Majutama. Lihat Genting Berhad (2019) hlm. 196.
- ¹³⁷ PT Permata Sawit Madiri. Lihat pembahasan di Greenpeace (2018b) hlm. 78.
- ¹³⁸ Genting Berhad (2019) hlm. 24–25
- ¹³⁹ Situs web Genting Berhad 'Directors & management' dan situs web Genting Plantations
- ¹⁴⁰ Situs web IOI Group 'Group structure'
- ¹⁴¹ Dipegang melalui Oakridge Investments Pte Ltd dan Lynwood Capital Resources Pte Ltd, yang keduanya sepenuhnya memiliki anak perusahaan IOI Corporation Berhad. Sumber: Bumitama Agri Ltd (2019a) hlm. 135.
- ¹⁴² Lihat situs web Reuters 'Jaya Agra Wattie Tbk PT' dan situs web PT Jaya Agra Wattie 'Palm oil profile'.
- ¹⁴³ Situs web Kuala Lumpur Kepong 'Our company: Overview'
- ¹⁴⁴ Kuala Lumpur Kepong (2019a) hlm. 84
- ¹⁴⁵ Rainforest Action Network et al (2018) hlm. 13
- ¹⁴⁶ Situs web Korindo 'Group profile'
- ¹⁴⁷ Situs web Makin Group 'About Makin Group'
- ¹⁴⁸ Situs web Musim Mas 'About us: Introduction'
- ¹⁴⁹ Situs web RSPo 'Members: Musim Mas Holdings Pte. Ltd.'
- ¹⁵⁰ Situs web NPC Resources 'Main'
- ¹⁵¹ NPC Resources (2015)
- ¹⁵² Situs web Artha Graha Network 'PT Pasifik Agro Sentosa'
- ¹⁵³ Situs web Artha Graha Network 'About us'
- ¹⁵⁴ Situs web Wikipedia 'Perkebunan Nusantara'
- ¹⁵⁵ Forbes (2013)
- ¹⁵⁶ Situs web Triputra Group 'Home'
- ¹⁵⁷ Situs web Triputra Group 'Agribusiness'
- ¹⁵⁸ Situs web RSPo 'Members: PT Triputra Agro Persada'
- ¹⁵⁹ Greenpeace Southeast Asia (2019)
- ¹⁶⁰ Chain Reaction Research (2015) hlm. 2
- ¹⁶¹ Forbes (2013)

- 162 Kulim (Malaysia) Berhad (2007)
- 163 Forbes (2013)
- 164 PT Dharma Satya Nusantara (2019) hlm. 20–21, 33–35
- 165 Situs web RSPD 'Members: PT. Dharma Satya Nusantara'
- 166 Eagle High Plantations (2019a) hlm. 67, 87 (pernyataan konsolidasi posisi keuangan hlm. 7)
- 167 Eagle High Plantations (2019a) hlm. 66–73
- 168 Malaysiakini (2019)
- 169 Greenpeace (2018b) hlm. 63
- 170 Keanggotaan RSPD dari anak perusahaan Indo Agri PT PP London Sumatra (Lonsum) dan PT Salim Ivomas Pratama (SIMP) berakhir awal tahun 2019.
- 171 Greenpeace (2018b) hlm. 130–131
- 172 Sime Darby (2019a) hlm. 311–321
- 173 Sime Darby (2019a) hlm. 140, 27
- 174 Situs web Sinar Mas 'Agribusiness and food'
- 175 Tani S (2019)
- 176 Situs web GAR 'Ownership structure'
- 177 Situs web GAR 'Corporate structure'
- 178 Situs web Sinar Mas 'Agribusiness and food'
- 179 Lihat situs web RSPD 'Complaint: Golden Agri-Resources Ltd' dan situs web Forest Peoples Programme '5 new complaints filed against Indonesia's largest palm oil company'.
- 180 SIPEF (2019a) hlm. 4, 49–71, 143
- 181 SIPEF (2019a) hlm. 98
- 182 Situs web Tunas Baru Lampung 'Management'
- 183 Situs web Tunas Baru Lampung 'Head office/factories/subsidiaries'
- 184 Situs web Forest 500 'Tianjin Julong Group Co.' dan situs web Julong Group 'Our history'
- 185 Situs web Julong Group 'Organizational structure'
- 186 Situs web Julong Indonesia 'About us'
- 187 TSH Resources (2019) hlm. 36–37
- 188 Wilmar International (2019a) hlm. 184–188
- 189 Greenpeace International (2018d)
- 190 Situs web Cargill 'Managing grievances'
- 191 Cargill (2019a)
- 192 Profil registri perusahaan PT Gandaerah Hendana dan PT Inecda serta perusahaan-perusahaan induk mereka, dan Samsung C&T Corporation and Subsidiaries (2017) hlm. 23
- 193 Situs web Wilmar International 'Grievance procedure'
- 194 Situs web Musim Mas 'Grievance list'
- 195 Situs web Musim Mas 'List of suppliers'
- 196 Profil registri perusahaan PT Gandaerah Hendana dan PT Inecda serta perusahaan-perusahaan induk mereka, dan Samsung C&T Corporation and Subsidiaries (2017) hlm. 23
- 197 Wilmar International (2019b)
- 198 Situs web Wilmar International 'Grievance procedure'
- 199 Mondel z (2019a)
- 200 Mondel z (2019b)
- 201 Situs web Nestlé 'Palm oil'
- 202 Nestlé (2019a)
- 203 Nestlé (2019b)
- 204 Lihat P&G (nd).
- 205 P&G (2019)
- 206 Rincian kelompok produsen yang dikeluarkan dari rantai pasok P&G akibat ketidakpatuhan dengan Kebijakan Pengambilan Pasok yang Bertanggung Jawab miliknya disampaikan kepada Greenpeace dalam P&G (2019).
- 207 P&G (nd)
- 208 Profil registri perusahaan PT Gandaerah Hendana dan PT Inecda serta perusahaan-perusahaan induk mereka, dan Samsung C&T Corporation and Subsidiaries (2017) hlm. 23
- 209 Dokumen dibagikan bulan Mei 2019.
- 210 P&G (2019)
- 211 Lihat situs web Wilmar International 'Grievance procedure'.
- 212 Unilever (2019b)
- 213 Unilever (2019a)
- 214 Unilever (2018)
- 215 Unilever (2019b) hlm. 27
- 216 Astra Agro Lestari (2019)
- 217 PT Monrad Intan Barakat (2019)
- 218 Bumitama Agri Ltd (2019b)
- 219 First Resources (2018c)
- 220 First Resources (2019)
- 221 Greenpeace Southeast Asia (2019)
- 222 Genting (2019a)
- 223 Dokumen berada pada Greenpeace Southeast Asia.
- 224 Genting Plantations Berhad (2019)
- 225 IOI (2019)
- 226 Kuala Lumpur Kepong (2019b)
- 227 Korindo Group (2019)
- 228 Korindo Group (2019)
- 229 Musim Mas (2019)
- 230 Triputra Agro Plantation (2019)
- 231 Eagle High Plantations (2019b)
- 232 Indofood Agri Resources (2019a)
- 233 Indofood Agri Resources (2019b)
- 234 Sime Darby (2019b)
- 235 Sime Darby (2019b)
- 236 GAR (2019a)
- 237 SIPEF (2019b)
- 238 SIPEF (2019c)
- 239 PT Tunas Baru Lampung (2019) hlm. 2
- 240 Wilmar International (2019b)



21 September 2019, PT Kaswari Unggul, 1°17'50.699" S 103°45'41.92" T. Ekskavator sedang bekerja dalam kabut dari kebakaran lahan gambut di konsesi PT Bukit Barisan Indah Prima di Jambi. Perusahaan perkebunan tersebut saat ini tengah menghadapi pengadilan perdata. PT Kaswari Unggul disebut sebagai pemasok untuk Unilever, Mondel z, Nestlé dan Procter & Gamble serta Wilmar, GAR dan Cargill. ©Adimaja/Greenpeace



GREENPEACE

November 2019 (diperbaharui 12 November)

Diterbitkan oleh Greenpeace International

Ottho Heldringstraat 5

1066 AZ Amsterdam

Belanda

enquiries@greenpeace.org

Dicetak menggunakan kertas daur ulang